



Pemerintah Kota Malang
Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2023



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023



malangkota.go.id @pemkotmalang Pemerintah Kota Malang

malangkota.go.id @pemkotmalang Pemerintah Kota Malang

KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban urusan pemerintahan dilaporkan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Substansi LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2023 terdiri atas 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. **Capaian pelaksanaan program dan kegiatan**, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan Tahun Anggaran 2023;
2. **Kebijakan strategis Kepala Daerah** dan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2023; dan
3. **Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Malang tahun 2023 menunjukkan tren positif pada 17 indikator dibandingkan capaian pada tahun 2022. Pemerintah Kota Malang juga memperoleh 61 penghargaan selama Tahun 2023 yang terdiri dari 35 penghargaan tingkat nasional, 25 penghargaan tingkat provinsi dan 1 penghargaan tingkat regional Malang Raya. Namun demikian masih terdapat kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah/pelaksanaan pembangunan, hal ini mendorong kami untuk terus mencari terobosan inovasi demi pelayanan yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi yang komprehensif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang untuk memacu Pemerintah Kota Malang agar meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun mendatang secara efektif, efisien dan akuntabel.

Melalui laporan ini **diharapkan juga dapat disampaikan berbagai hal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2023 secara bersama dalam satu kesatuan sistem.**

Untuk itu disampaikan rasa **terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta masyarakat Kota Malang** yang senantiasa berselaras langkah bersama Pemerintah Kota Malang untuk tetap melaksanakan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan meridhoi langkah kita bersama. Akhirnya kami berharap bahwa **kebersamaan dan kekompakan tetap terjalin utuh dan berkelanjutan** demi terwujudnya visi “**KOTA MALANG BERMARTABAT**”.

PJ. WALIKOTA MALANG,



Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum	3
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	6
1.2.1. Visi	6
1.2.2. Misi	7
1.3. Data Umum Daerah	8
1.3.1. Data Geografis Wilayah	8
1.3.2. Jumlah Penduduk	9
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk	11
1.3.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara	12
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	14
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	15
1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	16
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	17
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	25
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	25
3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	39
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	39
3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan	40
3.2. Kebijakan Strategis yang Diterapkan	40
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan	115
Bab V Penutup	122

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023	10
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	11
Tabel 1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	12
Tabel 1.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	13
Tabel 1.5	Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	14
Tabel 1.6	Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya Tahun 2023	15
Tabel 1.7	Realisasi Belanja Menurut Jenisnya Tahun 2023	15
Tabel 1.8	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya Tahun 2023	16
Tabel 2.1	Isu Strategis Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023	18
Tabel 2.2	Perubahan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2023	20
Tabel 2.3	Penjabaran Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023	23
Tabel 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023	37
Tabel 3.2	Kebijakan Strategis yang Diterapkan	42
Tabel 3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2022	45
Tabel 3.4	Daftar Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023	106
Tabel 4.1.1a	Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana APBN dan APBD (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	117
Tabel 4.1.1b	Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana APBN dan APBD Provinsi (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2022-2023	26
Gambar 3.2	Realisasi Indeks Kesehatan Tahun 2022-2023	27
Gambar 3.3	Realisasi Indeks Daya Beli Tahun 2022-2023	28
Gambar 3.4	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	28
Gambar 3.5	Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2022-2023	29
Gambar 3.6	Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2023	30
Gambar 3.7	Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022-2023	30
Gambar 3.8	Realisasi Persentase penurunan PPKS Tahun 2022-2023	31
Gambar 3.9	Realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat Tahun 2022-2023	32
Gambar 3.10	Realisasi Pembangunan Gender Tahun 2022-2023	32
Gambar 3.11	Realisasi Persentase Perda yang ditegakkan Tahun 2022-2023	33
Gambar 3.12	Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022-2023	34
Gambar 3.13	Realisasi Opini BPK Tahun 2022-2023	34
Gambar 3.14	Maturitas SPIP Tahun 2022-2023	35
Gambar 3.15	Rasio PAD Tahun 2022-2023	35
Gambar 3.16	Indeks Profesional ASN Tahun 2022-2023	36
Gambar 3.17	Indeks Kematangan SPBE	37

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan satu kesatuan sistem yang bergerak secara sistemik serta tersinergi antara pusat, tingkat provinsi hingga tingkat kota/kabupaten. Hal ini merupakan perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dalam kerangka tersebut, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, direncanakan, dirancang serta disusun dengan mempertimbangkan isu nasional dan isu di daerah. Pada tahun 2023 Kota Malang seperti halnya daerah lain di Indonesia dan dunia masih harus menghadapi disrupsi dampak pandemi Covid-19.

Kota Malang dalam fase bangkit dari keterpurukan saat pandemi, geliat ekonomi mulai bangkit, inovasi-inovasi terus digulirkan dalam rangka percepatan pembangunan, penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan menjaga kestabilan harga. Sentimen positif menjadi salah satu modal utama menyongsong program pembangunan pada tahun anggaran 2024. Pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 pada angka -2,26 persen mulai menunjukkan indikasi kebangkitan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 4,21 persen dan terus melaju menjadi 6,32 persen di tahun 2022 dan sebesar 6,07 di tahun 2023.

Dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2023 selaras dengan trend ekonomi nasional yang juga menunjukkan perlambatan dari 5,31 persen pada tahun 2022

menjadi 5,05 persen pada tahun 2023. Namun demikian secara positif dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang secara konsisten berada pada level yang lebih tinggi dari rata-rata nasional pada tahun 2023. Sisi positif lain ditengah perlambatan ekonomi pada tahun 2023 tetapi secara nilai, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Malang pada tahun 2023 sebesar Rp93.053,43 (miliar rupiah) lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar Rp84.807,43 (miliar rupiah).

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang menetapkan 4 (empat) langkah strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun anggaran 2023, meliputi strategi penguatan layanan bidang kesehatan dan pendidikan, strategi penguatan pemulihan (*recovery*) ekonomi, strategi penguatan infrastruktur dan strategi penguatan bantalan sosial. Kesemuanya diramu dengan pendekatan *hexahelix* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang.

Tumbuhnya ekonomi kreatif yang bergerak secara linier dengan terbangunnya gedung *Malang Creative Center*, Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, aktivasi Kayutangan *Heritage* serta belanja pengadaan yang berorientasi pada UMKM (Jatim Bejo) dengan jumlah transaksi tertinggi di Jawa Timur sebesar Rp91,66 (miliar) mampu melahirkan capaian signifikan pada tahun 2023.

Selain laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang terjaga di angka 6 persen pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari angka 83,38 menjadi 84. Secara komparatif angka IPM tahun 2023 tersebut menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 74,39.

Adapun angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 4,37 persen menjadi 4,26 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil diturunkan dari 7,66 persen menjadi 6,80 persen.

Apresiasi atas berbagai capaian kinerja positif Kota Malang pun hadir dalam wujud raihan 61 penghargaan sepanjang tahun 2023. Catatan prestasi tersebut meliputi 35 penghargaan tingkat nasional, 25 penghargaan tingkat provinsi dan 1 penghargaan tingkat regional Malang Raya. Termasuk diantaranya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu 147 inovasi daerah terus dikembangkan hingga tahun 2023.

Seluruh prestasi dan inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses reformasi birokrasi yang terus diakselerasi serta meningkatkan daya tarik Kota Malang sebagai destinasi kunjungan kerja dari berbagai daerah di Indonesia sehingga turut berdampak positif menjadi stimulus pergerakan ekonomi di Kota Malang.

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 174);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025. Mengacu tema pembangunan daerah pada RPJPD ke-4 yakni “Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan dalam rangka Menyejahterakan Masyarakat Kota Malang” disandingkan dengan keadaan termutakhir tahun 2018, Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan Kota Malang Bermartabat sebagai visi pembangunan Kota Malang tahun 2018-2023.

Kota Malang Bermartabat diharapkan menjadi capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2023, dimana capaian itu dapat menunjukkan karakter mulia seluruh warga Kota Malang sebagai negeri makmur yang diridhoi Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) yang dicirikan dengan masyarakat paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, dan penuh kesadaran positif.

Dengan berbagai keunggulan itu, Kota Malang akan memiliki daya saing sebagai kota terkemuka yang berprestasi di berbagai bidang.

1.2.2 Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kota Malang Bermartabat, berikut ini rumusan 4 (empat) misi pembangunan daerah tahun 2018-2023.

Misi 1 : Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2 : Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3 : Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi

keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4 : Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Kota Malang sebagai pusat pengembangan kawasan tengah Provinsi Jawa Timur, secara geografis berada pada 112°34'38.83"BT-112°40'59.41"BT dan 07°54'38.97"LS-08°02'47.04"LS (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012).

Kota Malang berjarak 89 km di sebelah selatan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, secara geografis berada di daerah pegunungan pada ketinggian 395 sampai dengan 618 mdpl (Peta Rupabumi Bakosurtanal 2002). Di sebelah Utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah Timur terdapat Gunung Semeru, serta di sebelah Barat terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman. Selain itu, Kota Malang dialiri oleh Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, Sungai Amprong dan Sungai Sukun.

Curah hujan di Kota Malang Tahun 2023 pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei lebih rendah dibandingkan Tahun 2022. Namun curah hujan sangat

tinggi terjadi pada bulan September, yaitu mencapai 8.888,00 mm selama 1 hari, meningkat secara signifikan dibanding curah hujan tertinggi Tahun 2022. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu mencapai 0,50 mm selama 3 hari (Kota Malang Dalam Angka, 2023). Hal ini menyebabkan rerata kelembaban udara kota mencapai 60,8%-80,4%, dengan kelembaban minimum mencapai 26% dan kelembaban maksimum mencapai 98%. Rerata suhu udara kota adalah 24°C-27,3°C (suhu udara minimum mencapai 14,8°C dan suhu udara maksimum mencapai 34°C).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042 Luas wilayah Kota Malang 11.108 Ha atau 111,08 km², secara administratif berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang :

- **Sebelah utara** berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;
- **Sebelah timur** berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
- **Sebelah selatan** berbatasan dengan Kecamatan Tajinan, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakisaji;
- **Sebelah barat** berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Mencermati publikasi Badan Pusat Statistik Kota Malang yang rilis tahun 2024, jumlah penduduk Kota Malang tahun 2023 mencapai 847.182 jiwa terdiri atas 421.340 jiwa penduduk laki-laki dan 425.842 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk pada tahun 2023 bertambah 1.056 jiwa dibandingkan jumlah penduduk

pada tahun 2022 sebanyak 846.126 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kedungkandang yakni mencapai 209.375 jiwa, disusul oleh Kecamatan Sukun sebesar 196.860 jiwa, Kecamatan Blimbing sebanyak 182.851 jiwa, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 164.106 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Klojen sebanyak 93.990 jiwa. Secara rinci keadaan penduduk di masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah, Laju dan Kepadatan Penduduk
Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2023	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Kedungkandang	209.375	0,31	5.254
2	Sukun	196.860	0,10	9.435
3	Blimbing	182.851	0,09	10.313
4	Lowokwaru	164.106	0,10	6.895
5	Klojen	93.990	-0,04	10.646
Jumlah/Rata-rata		847.182	0,13	7.627

Sumber: BPS Kota Malang, Tahun 2024

Penduduk Kota Malang tahun 2023 menurut kelompok umur terbanyak berada pada umur 30-34 mencapai 66.436 jiwa, dan tersedikit berada pada umur 75+ mencapai 20.665 jiwa.

Secara agregat kelompok umur balita yakni umur 1 tahun sampai dengan 4 tahun mencapai 59.394 jiwa, sedangkan umur sekolah yakni 5 tahun sampai dengan 24 tahun mencapai 248.643 jiwa. Penduduk Usia produktif yakni 25 tahun sampai dengan 59 tahun mencapai 424.801

jiwa. Adapun jumlah penduduk umur lansia yakni 60 tahun lebih mencapai 114.344 jiwa.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	30.506	28.888	59.394
2	5-9	31.469	30.119	61.588
3	10-15	31.770	30.283	62.053
4	15-19	31.182	29.690	60.872
5	20-24	32.671	31.459	64.130
6	25-29	33.414	32.254	65.668
7	30-34	33.952	32.483	66.435
8	35-39	33.763	32.533	66.296
9	40-44	32.019	31.269	63.288
10	45-49	29.248	29.717	58.965
11	50-54	26.392	28.336	54.728
12	55-59	23.348	26.073	49.421
No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
13	60-64	19.454	21.687	41.141
14	65-69	14.652	17.216	31.868
15	70-74	9.343	11.327	20.670
16	75+	8.157	12.508	20.665
	Jumlah Total	421.340	425.842	847.182

Sumber: BPS Kota Malang, Tahun 2023, Sensus Penduduk

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Dengan rerata laju pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 0,13% selama tahun 2020 sampai dengan 2023, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kedungkandang mencapai 0,31%. Di urutan berikut Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru sebesar 0,10%, Kecamatan Blimbing sebesar 0,09% dan

laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Klojen sebesar -0,04%. Laju pertumbuhan penduduk yang demikian menyebabkan Kecamatan Klojen menjadi kecamatan yang terpadat penduduknya mencapai 10.646 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Blimbing sebesar 10.313 jiwa per km², Kecamatan Sukun sebesar 9.435 jiwa per km², Kecamatan Lowokwaru sebesar 6.895 jiwa per km² dan Kecamatan Kedungkandang sebesar 5.254 jiwa per km².

1.3.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Malang pada tahun 2023 berjumlah 7004 orang. Karakteristik ASN Kota Malang didominasi oleh pejabat fungsional sebanyak 4549 orang, disusul pejabat pelaksana sebanyak 1908 orang dan Selebihnya sebanyak 547 orang menduduki jabatan struktural mulai Pengawas, Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	PNS	2620	2917	5537
1	JPT	22	7	29
2	Jabatan Administrasi	296	222	518
	2.1 Administrator	80	42	122
	2.2 Pengawas	216	180	396
3	Pelaksana	1478	430	1908
4	Fungsional	824	2258	3082
B	PPPK	494	973	1467
1	Fungsional	494	973	1467
Jumlah Total		3114	3890	7004

Sumber : BKPSDM Kota Malang, 2024

Dari jumlah ASN sebanyak 7.004 orang yang terdiri atas 3.114 pegawai laki-laki dan 3.890 pegawai perempuan, terbanyak sudah meningkat kualitas pendidikan formalnya mencapai 4.157 pegawai berkualifikasi sarjana. Sedangkan dalam tataran kelompok ruang terbanyak adalah III/b mencapai 1.178 orang, disusul oleh PNS golongan ruang III/a berjumlah 647 orang dan III/d berjumlah 714 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Malang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	PNS	2620	2917	5537
1	D4/S1/S2/S3	1201	2247	3448
2	D1/D2/D3/ Sarjana Muda	183	483	666
3	Sma/Sederajat	861	175	1036
4	Smp/Sederajat	263	10	273
5	SD	112	2	114
B	PPPK	494	973	1467
1	D4/S1/S2/S3	457	879	1336
2	D2/D3	32	92	124
3	Sma/Sederajat	5	2	7
Jumlah Total		3114	3890	7004

Sumber : BKPSDM Kota Malang, 2024

Tabel 1.5
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Malang
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	PNS	2620	2917	5537
1	Golongan IV	268	491	759
	Pembina Utama (IV/e)	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	19	23	42
	Pembina Tk. I (IV/b)	76	195	271
	Pembina (IV/a)	172	272	444
2	Golongan III	1059	2039	3098
	Penata Tingkat I (III/d)	243	471	714
	Penata (III/c)	200	359	559
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	350	828	1178
	Penata Muda (III/a)	366	381	647
3	Golongan II	1107	380	1487
	Pengatur Tingkat I (II/d)	332	129	461
	Pengatur (II/c)	250	227	577
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	238	20	258
	Pengatur Muda (II/a)	187	4	191
4	Golongan I	186	7	193
	Juru Tingkat I (I/d)	173	7	180
	Juru (I/c)	13	-	13
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-
	Juru Muda (I/a)	-	-	-
B	PPPK	494	973	1467
	PPK/X	-	1	1
	PPPK/IX	466	888	1354
	PPPK/VII	26	84	110
	PPPK/V	2	-	2
Jumlah Total		3114	3890	7004

Sumber : BKPSDM Kota Malang, 2024

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 (*unaudited*), realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.344.815.945.277,81 terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp792.120.013.218,17; pendapatan transfer sebesar Rp1.552.647.976.062,00; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp47.955.997,64. Realisasi pendapatan menurut jenisnya terinci sebagai berikut:

Tabel 1.6
Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)
1	PENDAPATAN	2.344.815.945.277,81
1.1	Pendapatan Asli Daerah	792.120.013.218,17
1.2	Pendapatan Transfer	1.552.647.976.062,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.955.997,64

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2024, *unaudited*

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah pada tahun 2023 mencapai Rp2.596.706.284.209,93, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2.188.051.811.802,93 berikutnya belanja modal sebesar Rp405.779.018.058,00 dan belanja tak terduga sebesar Rp2.875.454.349,00. Realisasi belanja menurut jenisnya terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Realisasi Belanja Menurut Jenisnya Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)
2	Belanja Daerah	2.596.706.284.209,93
2.1	Belanja Operasi	2.188.051.811.802,93
2.2	Belanja Modal	405.779.018.058,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.875.454.349,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2024, *unaudited*

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp451.516.784.066,22 terdiri atas: penerimaan pembiayaan sebesar Rp460.204.464.066,22; dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.687.680.000,00. Realisasi pembiayaan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp.)
3	Pembiayaan Daerah	451.516.784.066,22
3.1	Penerimaan Pembiayaan	460.204.464.066,22
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.687.680.000,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2024, *unaudited*

BAB II

**PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2023 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pembangunan Kota Malang tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kota Malang periode 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun terakhir RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan harus segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Selain itu, tahun 2023 Pemerintah Kota Malang fokus pada pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah, penuntasan

masalah utama perkotaan seperti kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, penguatan sistem kesehatan masyarakat pasca pandemi, aktivasi serta perluasan ekosistem ekonomi kreatif.

Isu strategis secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Isu Strategis Prioritas Pembangunan
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023

No.	Isu Strategis RKPD
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan <i>co-working space</i> dalam rangka meningkatkan kemandirian industri kreatif; b. Transformasi digital dalam pemasaran produk usaha mikro; c. Peran Revolusi Industri 4.0 dalam Pemulihan ekonomi; d. Peningkatan kunjungan wisata dengan memadukan event kreatif dan olahraga <i>virtual</i>; e. Optimalisasi eksplorasi karakter dan identitas kota sebagai pengembangan destinasi pariwisata perkotaan; f. Optimalisasi upaya pembinaan wirausaha baru sebagai alternatif pemulihan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja; g. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar modern berbasis pasar rakyat dalam bentuk perbaikan lingkungan fisik dan tata kelola pasar; h. Optimalisasi distribusi dan pemasaran produk lokal melalui <i>e-commerce</i>; i. Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang cukup banyak; j. <i>Branding</i> taman kota sebagai destinasi wisata baru.
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerataan persebaran pendidik yang berkompentensi pada lima kecamatan, sehingga kualitas pendidikan di setiap sekolah lebih merata; b. Optimalisasi kemudahan akses sarana prasarana pendidikan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka buta huruf; c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pendidikan dasar terutama program wajib belajar 12 tahun; d. Peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI); e. Peningkatan angka stunting; f. Vaksin <i>booster</i> dalam rangka menekan jumlah kasus aktif Covid-19 g. Pemerataan sebaran tenaga kesehatan di 5 (lima) kecamatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; h. Peningkatan penyakit <i>degenerative</i>;

	<ul style="list-style-type: none"> i. Percepatan penanggulangan TBC; j. Optimalisasi ketersediaan sarana prasarana olahraga di ruang publik; k. Penguatan ketahanan pangan melalui program urban farming; l. Peningkatan harga bahan pokok; m. Pemerataan sekolah ibu (Sekolah Kartini) dalam rangka peningkatan kualitas keluarga; n. Kemiskinan ekstrem nol persen; o. Belum terentaskannya PMKS untuk menjadi mandiri; p. Optimalisasi bantuan sosial bagi penduduk miskin baik yang masuk kategori ekstrim maupun rentan; q. Kebijakan penanganan wabah penyakit hewan yang cepat, tepat, tanggap dan sesuai standar yang ditetapkan.
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; b. Optimalisasi ruang kreasi digital bagi pelaku seni budaya; c. Keberagaman Suku, Agama, Ras dan Antar golongan yang hidup berdampingan; d. Pengaruh kemajuan teknologi dan media sosial; e. Optimalisasi kesiapan <i>stakeholders</i> terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan volume lalu lintas merusak kondisi jalan; b. Bertambahnya cakupan titik banjir; c. Keterbatasan air bersih yang terintegrasi dan berkelanjutan; d. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terintegrasi; e. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui kerjasama Malang Raya.
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi keselarasan antara penyelenggaraan pembangunan dengan kualitas lingkungan hidup perlu, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan; b. Pengelolaan dan penambahan taman edukasi serta ruang terbuka hijau secara kreatif; c. Peningkatan kualitas pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun; d. Implementasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); e. Perubahan Iklim; f. Ketidakpastian bencana alam dan bencana non alam.
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan Perda dan Perkada; b. Penguatan manajemen pengelolaan arsip daerah melalui depo arsip; c. Kompetensi ASN masih ada yang belum memenuhi standar; d. Belum semua PNS memiliki kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi pada unit kerjanya; e. Pemanfaatan MPP sebagai sarana pelayanan publik yang mudah terjangkau masyarakat.

Berpedoman pada perubahan RKPD 2023, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2023 terdapat 173 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 495 dan 1.404 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Perubahan Program dan Kegiatan
pada RKPD Tahun 2023

Program			Kegiatan/Sub Kegiatan		
RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
173	173	173	495 (1404 Sub Kegiatan)	490 (1385 Sub Kegiatan)	499 (1432 Sub Kegiatan)

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. **Pendapatan Daerah** semula Rp2.561.829.733.353,00 berkurang sebesar Rp183.940.478.648,00 sehingga Pendapatan Daerah menjadi Rp2.377.889.254.705,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Pendapatan Asli Daerah** semula sebesar Rp1.179.181.683.130,00 berkurang sebesar Rp177.389.675.269,00 sehingga menjadi Rp1.001.792.007.861,00 meliputi:
 - 1) Pajak Daerah semula Rp1.000.006.000.000,00 berkurang sebesar Rp166.006.000.000,00 sehingga menjadi Rp834.000.000.000,00;
 - 2) Retribusi Daerah semula Rp53.267.985.400,00 bertambah sebesar Rp1.751.105.000,00 sehingga

- menjadi Rp55.019.090.400,00;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp28.696.022.152,00 bertambah sebesar Rp757.277.450,00 sehingga menjadi Rp29.453.299.602,00;
 - 4) Lain-lain PAD yang sah semula Rp97.211.675.578,00 berkurang sebesar Rp13.892.057.719,00 sehingga menjadi Rp83.319.617.859,00.
- b. **Pendapatan Transfer** semula Rp1.375.148.050.223,00 bertambah sebesar Rp949.196.621,00 sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan adalah sebesar Rp1.376.097.246.844,00 meliputi:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.245.305.766.000,00 bertambah sebesar Rp323.400.000,00 sehingga menjadi Rp1.245.629.166.000,00;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp129.842.284.223,00 bertambah sebesar Rp625.796.621,00 sehingga menjadi Rp130.468.080.844,00;
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** semula Rp7.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp7.500.000.000 sehingga menjadi Rp0,00 meliputi Pendapatan Hibah semula Rp7.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp7.500.000.000 sehingga menjadi Rp0,00.
2. **Belanja Daerah** semula Rp2.811.864.973.353,00 bertambah sebesar Rp17.790.253.602,00 sehingga Belanja Daerah menjadi Rp2.829.655.226.955,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. **Belanja Operasi** semula Rp2.368.756.367.362,00 bertambah sebesar Rp10.146.356.853,00 sehingga menjadi Rp2.378.902.724.215,00 meliputi:

- 1) Belanja Pegawai semula Rp1.056.432.968.040,00 berkurang sebesar Rp120.530.153.917,00 sehingga menjadi Rp935.902.814.123,00;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa semula Rp1.109.737.043.362,00 bertambah sebesar Rp134.123.644.770,00 sehingga menjadi Rp1.243.860.688.132,00;
 - 3) Belanja Hibah semula Rp180.004.485.960,00 berkurang sebesar Rp2.363.374.000,00 sehingga menjadi Rp177.641.111.960,00;
 - 4) Belanja Bantuan Sosial semula Rp22.581.870.000,00 berkurang sebesar Rp.1.083.760.000,00 sehingga menjadi Rp21.498.110.000,00.
- b. **Belanja Modal** semula Rp423.359.505.807,00 bertambah sebesar Rp9.924.886.200,00 sehingga menjadi Rp433.284.392.007,00 meliputi:
- 1) Belanja Modal Tanah semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp750.000.000,00 sehingga menjadi Rp750.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp78.911.993.631,00 bertambah sebesar Rp33.650.520.861,00 sehingga menjadi Rp112.562.514.492,00;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp86.376.388.993,00 berkurang sebesar Rp6.759.560.836,00 sehingga menjadi Rp79.616.828.157,00;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp248.010.179.549,00 berkurang sebesar Rp11.323.244.062,00 sehingga menjadi Rp236.686.935.487,00;

- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp10.060.943.634,00 berkurang sebesar Rp6.852.829.763,00 sehingga menjadi Rp3.208.113.871,00;
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp460.000.000,00 sehingga menjadi Rp460.000.000,00.
- c. **Belanja Tidak Terduga** semula Rp19.749.100.184,00 berkurang sebesar Rp2.280.989.451,00 sehingga menjadi Rp17.468.110.733,00.
3. **Pembiayaan Daerah** semula Rp250.035.240.000,00 bertambah sebesar Rp201.730.732.250,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp451.765.972.250,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. **Penerimaan Pembiayaan** semula Rp266.222.920.000,00 bertambah sebesar Rp194.230.732.250,00 sehingga menjadi Rp460.453.652.250,00;
- b. **Pengeluaran Pembiayaan** semula Rp16.187.680.000,00 berkurang sebesar Rp7.500.000.000,00 sehingga menjadi Rp8.687.680.000,00.

Tabel 2.3
Penjabaran Perubahan APBD Kota Malang
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.561.829.733.353,00	2.377.889.254.705,00	(183.940.478.648,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.179.181.683.130,00	1.001.792.007.861,00	(177.389.675.269,00)
4.1.01	Pajak Daerah	1.000.006.000.000,00	834.000.000.000,00	(166.006.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	53.267.985.400,00	55.019.090.400,00	1.751.105.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.696.022.152,00	29.453.299.602,00	757.277.450,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	97.211.675.578,00	83.319.617.859,00	(13.892.057.719,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.375.148.050.223,00	1.376.097.246.844,00	949.196.621,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.245.305.766.000,00	1.245.629.166.000,00	323.400.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.842.284.223,00	130.468.080.844,00	625.796.621,00

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000,00	0,00	(7.500.000.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	0,00	(7.500.000.000,00)
	Jumlah Pendapatan	2.561.829.733.353,00	2.377.889.254.705,00	(183.940.478.648,00)
5	BELANJA	2.811.864.973.353,00	2.829.655.226.955,00	17.790.253.602,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.368.756.367.362,00	2.378.902.724.215,00	10.146.356.853,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.056.432.968.040,00	935.902.814.123,00	(120.530.153.917,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.109.737.043.362,00	1.243.860.688.132,00	134.123.644.770,00
5.1.05	Belanja Hibah	180.004.485.960,00	177.641.111.960,00	(2.363.374.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.581.870.000,00	21.498.110.000,00	(1.083.760.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	423.359.505.807,00	433.284.392.007,00	9.924.886.200,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.911.993.631,00	112.562.514.492,00	33.650.520.861,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.376.388.993,00	79.616.828.157,00	(6.759.560.836,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	248.010.179.549,00	236.686.935.487,00	(11.323.244.062,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.060.943.634,00	3.208.113.871,00	(6.852.829.763,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.749.100.184,00	17.468.110.733,00	(2.280.989.451,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.749.100.184,00	17.468.110.733,00	(2.280.989.451,00)
	Jumlah Belanja	2.811.864.973.353,00	2.829.655.226.955,00	17.790.253.602,00
	Total Surplus/(Defisit)	250.035.240.000,00	451.765.972.250,00	201.730.732.250,00
6	PEMBIAYAAN	250.035.240.000,00	451.765.972.250,00	201.730.732.250,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	266.222.920.000,00	460.453.652.250,00	194.230.732.250,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	266.222.920.000,00	460.453.652.250,00	194.230.732.250,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.187.680.000,00	8.687.680.000,00	(7.500.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.187.680.000,00	8.687.680.000,00	(7.500.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	250.035.240.000,00	451.765.972.250,00	201.730.732.250,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2023

BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN
DAERAH**

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023, tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023 sebagai berikut.

Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan; dan
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan.

Tujuan 2 : Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif;
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana kota secara terpadu; dan
3. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup.

Tujuan 3 : Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender, dengan sasaran meliputi:

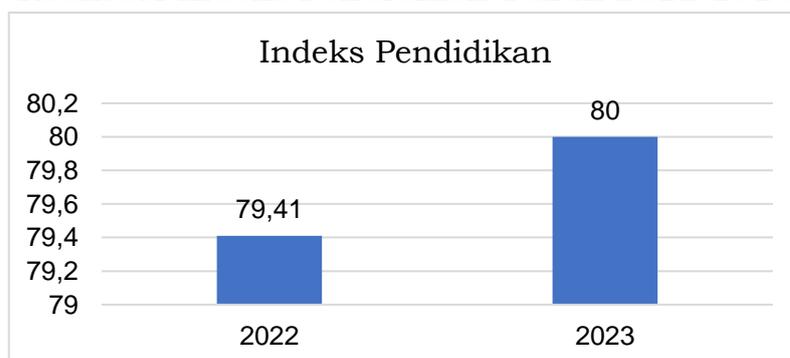
1. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial; dan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan.

Tujuan 4 : Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel, dengan sasaran meliputi:

1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum;
2. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif, yang mencakup nilai SAKIP, opini BPK, maturitas SPIP, dan rasio PAD;
3. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN; dan
4. Meningkatnya integrasi teknologi Informasi.

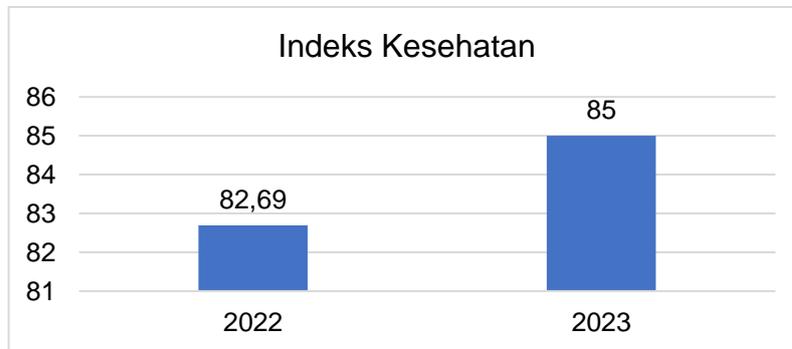
Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja daerah, pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Malang mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2022-2023



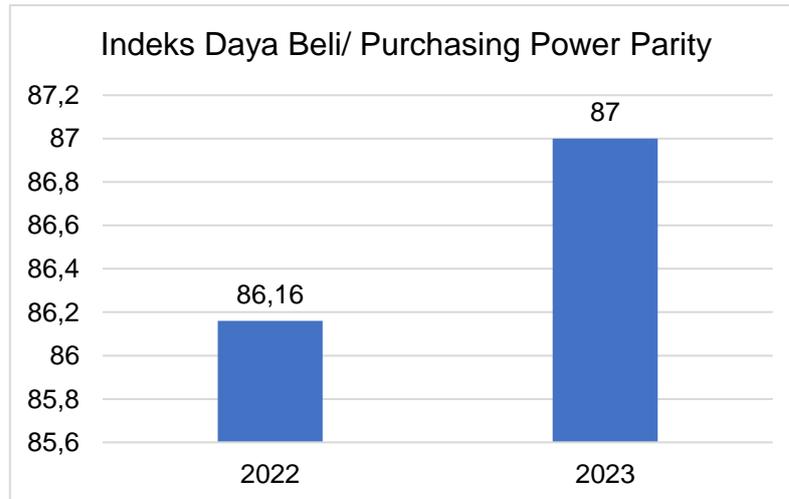
Dari diagram diatas, meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter dapat dilihat dengan meningkatnya realisasi indeks pendidikan, dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 80 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 79,41. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Gambar 3.2
Realisasi Indeks Kesehatan Tahun 2022-2023



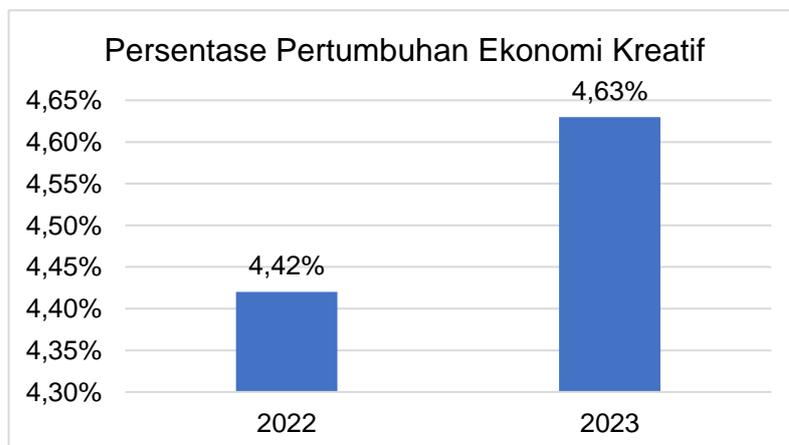
Dari diagram diatas, meningkatnya kualitas layanan kesehatan dapat dilihat dengan meningkatnya realisasi indeks kesehatan, dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 85 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 82,69. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Gambar 3.3
Realisasi Indeks Daya Beli Tahun 2022-2023



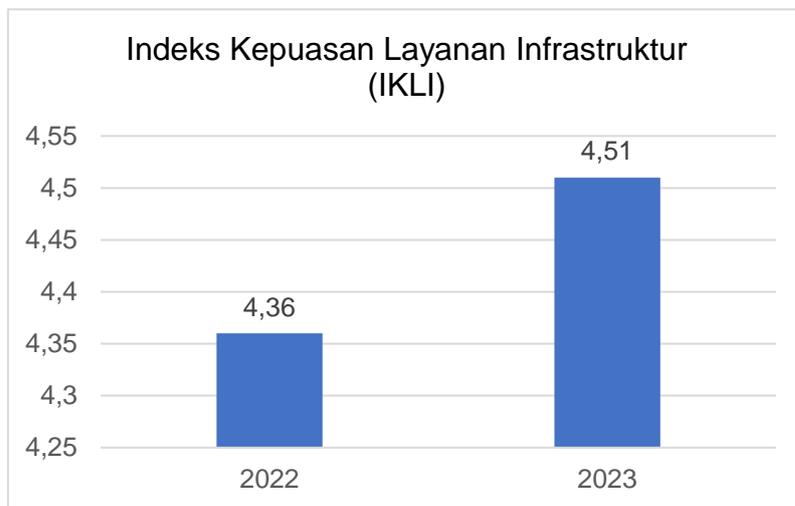
Dari diagram diatas, meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan dapat dilihat dengan meningkatnya realisasi indeks daya beli/purchasing power parity, dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 87 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 86,16. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan daya beli Masyarakat.

Gambar 3.4
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Tahun 2022-2023



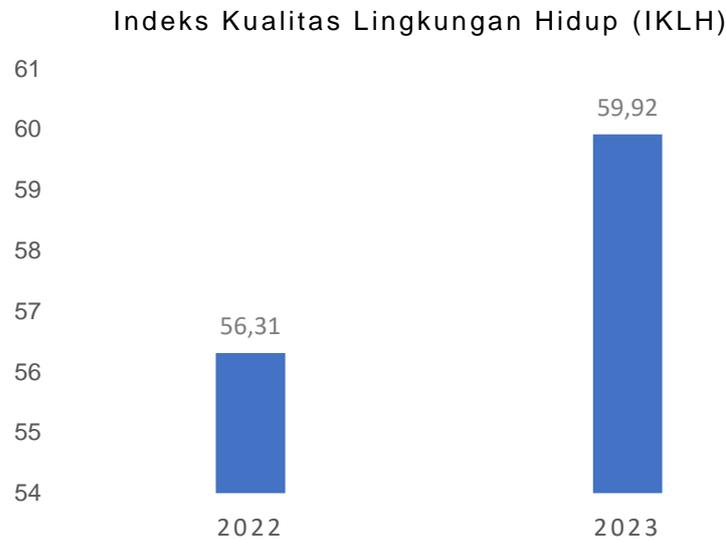
Dari diagram diatas, meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif dapat dilihat dengan meningkatnya realisasi persentase pertumbuhan ekonomi kreatif, dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 4,63% meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,42%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekosistem dan geliat ekonomi kreatif.

Gambar 3.5
Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Tahun 2022-2023



Dari diagram diatas, meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dapat dilihat dengan meningkatnya realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 4,51 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,36. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penyelenggaraan/pemeliharaan infrastruktur.

Gambar 3.6
Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022-2023

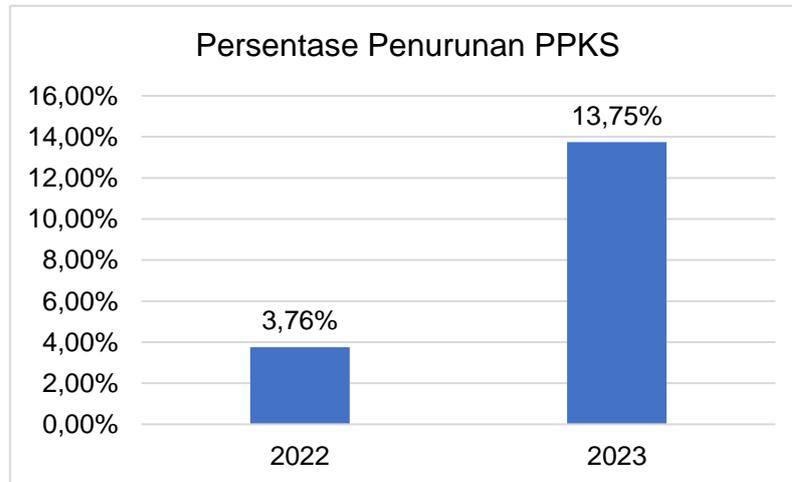


Dari diagram diatas, meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup dapat dilihat dengan meningkatnya realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 59,92 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 56,31. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Gambar 3.7
Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2022-2023

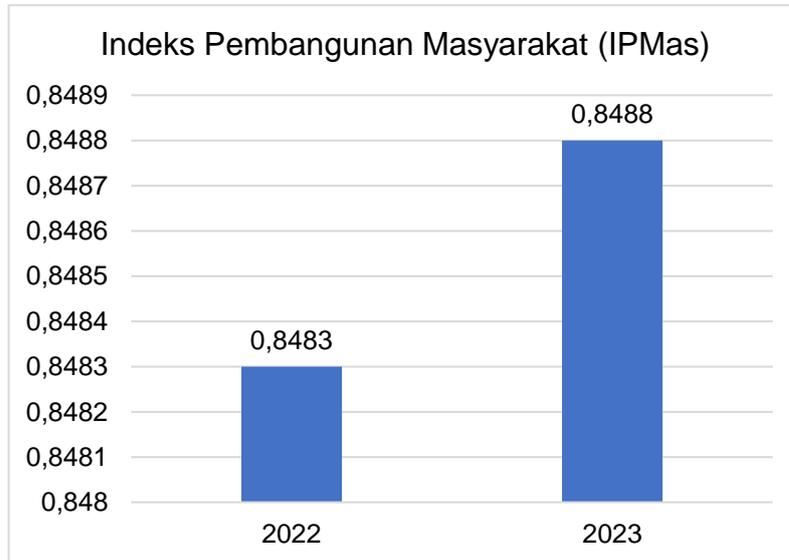


Gambar 3.8
Realisasi Persentase penurunan PPKS
Tahun 2022-2023

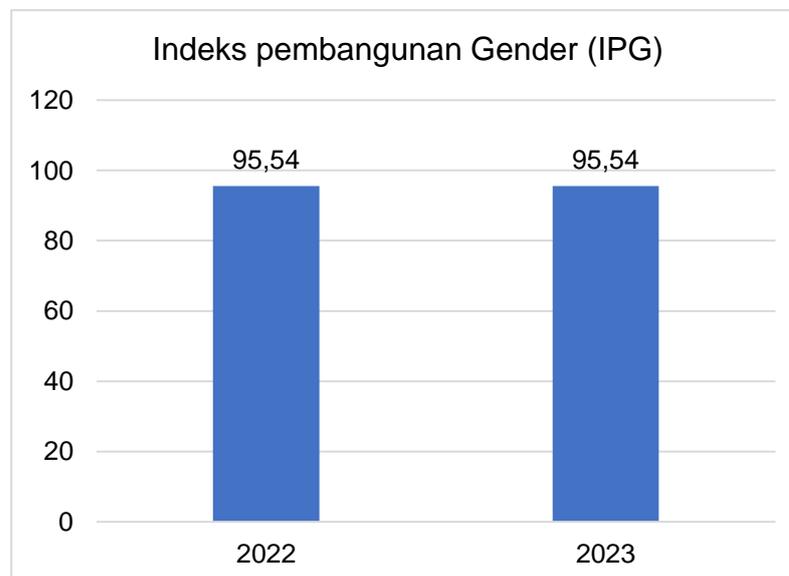


Dari diagram diatas, meningkatnya kualitas perlindungan sosial dapat dilihat dengan menurunnya realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka dimana pada tahun 2023 sebesar 6,80% menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,66%, dan menurunnya realisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dimana pada tahun 2023 sebesar 13,75% meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,76%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja sekaligus kesejahteraan sosial.

Gambar 3.9
Realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat
Tahun 2022-2023



Gambar 3.10
Realisasi Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2022-2023



Dari diagram diatas, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan dapat dilihat dengan meningkatnya realisasi Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dimana pada tahun 2023 sebesar 0,8488 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,8483, sedangkan

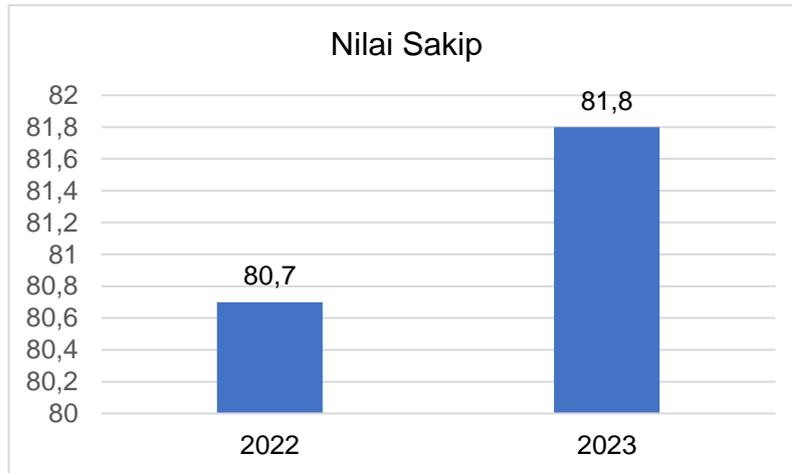
Indeks Pembangunan Gender (IPG) tetap dimana pada tahun 2023 sebesar 95,54 sama dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat.

Gambar 3.11
Realisasi Persentase Perda yang ditegakkan
Tahun 2022-2023

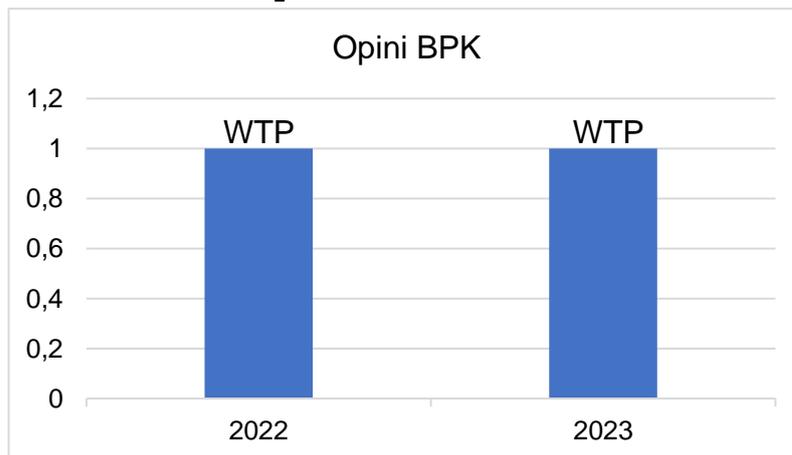


Dari diagram diatas, meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum dapat dilihat dengan realisasi persentase Perda yang ditegakkan, dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 100% sama dengan tahun 2022 yang sebesar 4,36. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakkan Perda terus dilakukan secara intensif.

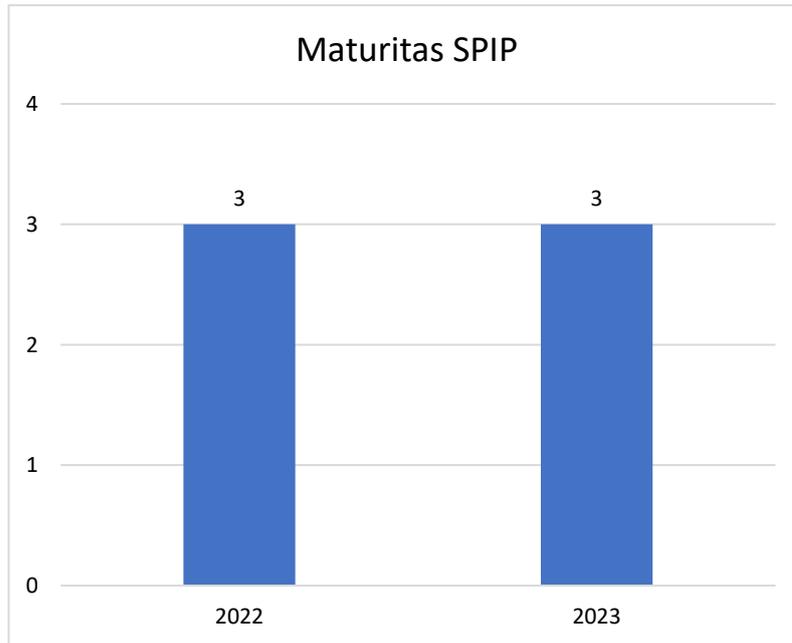
Gambar 3.12
Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2022-2023



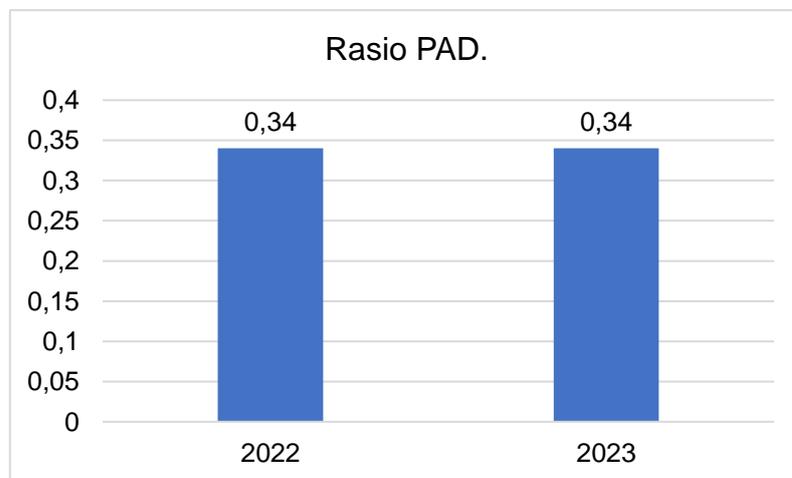
Gambar 3.13
Realisasi Opini BPK Tahun 2022-2023



Gambar 3.14
Maturitas SPIP Tahun 2022-2023



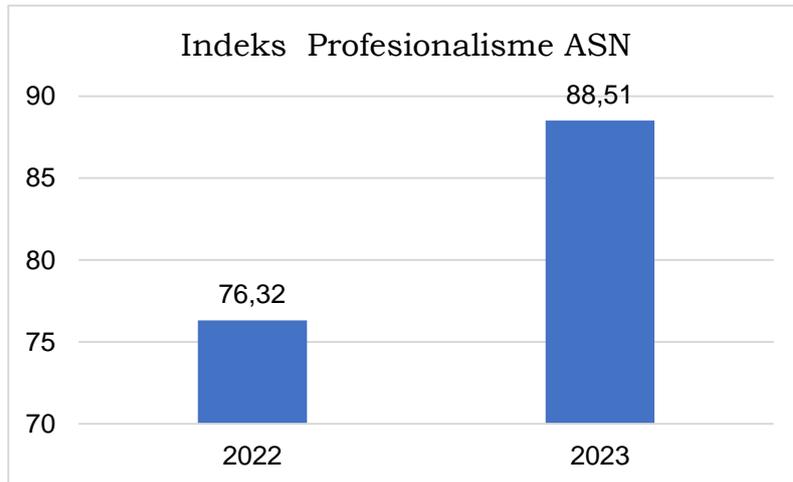
Gambar 3.15
Rasio PAD Tahun 2022-2023



Dari diagram diatas, meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif dapat dilihat dengan meningkatnya Nilai SAKIP dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar 81,8 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 80,7, dipertahankannya Opini BPK pada tahun 2023 untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, dipertahankannya Maturitas SPIP pada Level 3, serta dipertahankannya Rasio PAD

sebesar 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kelembagaan terlaksana secara efektif.

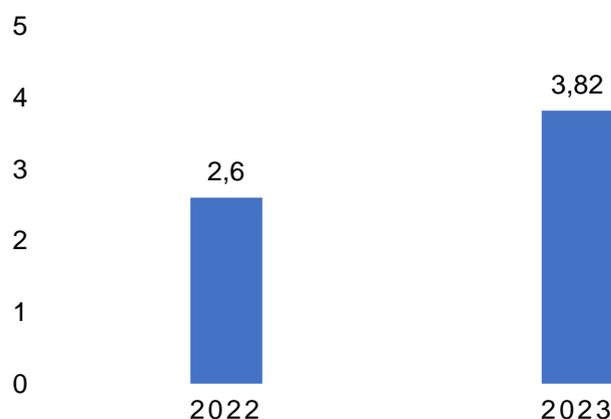
Gambar 3.16
Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022-2023



Dari diagram diatas, meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dapat dilihat dengan meningkatnya realisasi Indeks Profesionalisme ASN, di mana pada tahun 2023 tercapai sebesar 88,51 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 76,32. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas ASN terus meningkat.

Gambar 3.17
Indeks Kematangan SPBE

Indeks Kematangan SPBE



Dari diagram diatas, meningkatnya transformasi digital dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat dengan meningkat signifikannya Indeks Kematangan SPBE, di mana pada tahun 2023 tercapai 3,82 (predikat sangat baik) meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,6 (predikat baik). Hal ini terwujud kolaborasi seluruh pihak dalam mendorong penguatan kebijakan arsitektur dan peta rencana SPBE, perbaikan tata kelola dan manajemen, peningkatan keamanan informasi dan pengembangan sistem informasi yang semakin handal dan terintegrasi.

Adapun rekapitulasi realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		KETERANGAN
		2022	2023	
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	79,41	80	Meningkat
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	82,69	85	Meningkat
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	86,16	87	Meningkat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	4,42%	4,63%	Meningkat
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,36	4,51	Meningkat
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,31	59,92	Meningkat
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,66%	6,80%	Menurun

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		KETERANGAN
		2022	2023	
	Persentase Penurunan PMKS	3,76%	13,75 %	Meningkat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,8483	0,8488	Meningkat
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	95,54	95,54	Dipertahankan
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	100%	Dipertahankan
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	80,7	81,8	Meningkat
	Opini BPK	WTP	WTP	Dipertahankan
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Dipertahankan
	Rasio PAD	0,34	0,34	Meningkat
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	76,32	88,51	Meningkat
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,6	3,82	Meningkat

Adapun capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya dituangkan dalam tabel-tabel yang berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, dan urusan pemerintahan daerah lainnya.

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. Secara riil pelaksanaan urusan tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 menyelenggarakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan serta Kearsipan. Secara riil pelaksanaan urusan tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pemerintah Kota Malang pada tahun 2023 menyelenggarakan urusan pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian. Pelaksanaan urusan pilihan tersebut secara riil disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Selain urusan pemerintahan tersebut diatas, juga disajikan pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Umum Lainnya sebagaimana terlampir.

3.2 Kebijakan Strategis yang Diterapkan

Tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2023, ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan persiapan pelaksanaan Pemilu.

Pemerintah Kota Malang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 dan berbagai masalah yang dihadapi. Dalam kerangka itu Walikota Malang telah mengambil inisiatif untuk mempercepat atau menindaklanjuti permasalahan melalui kebijakan-kebijakan strategis selama tahun 2023 berupa penerbitan peraturan walikota, keputusan walikota, surat edaran dan/atau tindakan strategis.

Pada tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) keputusan walikota antara lain berkaitan dengan pembentukan tim/forum/gugus tugas, pencabutan keputusan walikota dan perubahan keputusan walikota yang sudah tidak sesuai.

Sedangkan peraturan walikota yang ditetapkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) peraturan walikota antara lain berkaitan dengan penjabaran APBD, kepegawaian, perencanaan.

Adapun peraturan daerah yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) peraturan daerah yang antara lain berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Perubahan APBD tahun anggaran 2023, dan APBD tahun anggaran 2024.

Berikut disampaikan kebijakan strategis walikota sebagai tindak lanjut dari isu strategis serta tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan untuk mendukung tercapainya:

Tabel 3.2
Kebijakan Strategis yang Diterapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Dana BOSDA untuk SD Negeri dan SMP Negeri; - Pemberian Dana Hibah untuk SD dan SMP Swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; - Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Biaya Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu; - Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasional Satuan Pendidikan Negeri; - Meringankan beban biaya operasional Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan; - Meningkatkan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan.
2.	Aktivasi Gedung <i>Malang Creative Center</i>	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang
3.	Aktivasi Koridor Kayutangan <i>Heritage</i>	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan	Mendorong program pengembangan ekonomi kreatif sebagai dukungan terhadap penataan kawasan Kayutangan <i>Heritage</i>

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
4.	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah meliputi jalan, jembatan, pasar dan kesehatan.	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan	Untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi lokal dan kesehatan masyarakat.
5.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang tahun 2025-2045	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Untuk memberikan pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang selaras dengan RPJPN
6.	Menerapkan Uji Kompetensi Daerah (UKD) sebagai standar penilaian pengganti nilai kelulusan karena Implementasi kurikulum merdeka belajar yang meniadakan Ujian Nasional	Misi Walikota Malang Nomor 1 Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.	Apresiasi terhadap siswa yang berprestasi secara akademik
7.	Pelaksanaan Warung Tekan Inflasi	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2022	Penanganan inflasi
8.	E-JKN Cekat (Cepat, Efektif, Akurat dan Terpadu) adalah aplikasi layanan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga Kota Malang	Misi Walikota Malang Nomor 1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga	Pelayanan warga Kota Malang yang mengajukan dan menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang (Peserta PBI Daerah).

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
9.	Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui pendataan menggunakan aplikasi PDKTSAM	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan program penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
10.	Percepatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Elektronik Kependudukan Terintegrasi (SIAPEL-TEGAS) dan penguatan inovasi Jemput Bola Administrasi Kependudukan (JEMBOL Adminduk).	Misi Walikota Nomor 4 Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Kemudahan masyarakat Kota Malang dalam mengurus dokumen kependudukan
11.	Digitalisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah	Misi Walikota Nomor 4 Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, professional dan akuntabel	Kemudahan masyarakat Kota Malang dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah
12.	Pelaksanaan Program Kemis Mbois	Misi Walikota Malang Nomor 2 Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan	Mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Malang
13.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan

Tabel 3.3
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2022

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
1.	Terkait Pendataan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdapat 2970 data DTKS yang didata oleh Puskesmas yang tidak termasuk kategori miskin/menerima bantuan justru yang miskin belum masuk ke DTKS sehingga diharapkan ada <i>update</i> data sesuai dengan temuan data yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Malang;	Pada Tahun 2022 telah dilakukan Validasi DTKS dan P3KE pada 2 kecamatan dan dilanjutkan untuk 3 Kecamatan lainnya (Blimbing, Kedungkandang dan Lowokwaru) pada bulan Mei s.d. bulan Juli Tahun 2023. Data kemiskinan ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan dengan memanfaatkan <i>Database</i> Kesejahteraan Sosial Kota Malang pada PDKTSAM. <i>Update</i> data secara rutin akan dilakukan oleh Puskesmas pada Dinas Sosial, P3AP2KB melalui proses Musyawarah Kelurahan yang dilakukan mulai tahun 2024.	Validasi DTKS dan P3KE pada 5 kecamatan telah dilakukan dan <i>Update</i> data dilakukan oleh Puskesmas pada Dinas Sosial, P3AP2KB melalui proses Musyawarah Kelurahan yang dilakukan mulai tahun 2024
2.	DPRD Kota Malang menyarankan kepada Pemerintah Kota Malang untuk melakukan kajian lebih mendalam dan berhati-hati tentang pengadaan barang dan jasa agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan sosial di kemudian hari seperti rencana pembelian tanah dan	Dinas Perhubungan sudah melakukan reviu kajian <i>feasibility study</i> lahan parkir kayutangan di tahun 2023 dan di tahun 2024 ada 2 (dua) kajian yang akan dilakukan dalam mendukung program pembelian lahan yang digunakan sebagai kantong parkir di kawasan kayutangan <i>heritage</i> , di	- Tersedianya lahan parkir di kawasan kayutangan <i>heritage</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara administrasi pengadaan barang jasa maupun secara legalitas; - Mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat terkait

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	bangunan di Jl. Basuki Rahmat No. 50 yang banyak mendapatkan sorotan publik dan akhirnya dibatalkan;	antaranya kajian jasa <i>appraisal</i> lahan serta kajian mal alun-alun yang digunakan sebagai alternatif kantong parkir.	penyelenggaraan perparkiran yang rapi, nyaman dan transparan serta mewujudkan arus lalu lintas dengan aman, lancar dan berkeselamatan.
3.	Terkait dengan gagalnya eksekusi terhadap rekomendasi dari DPRD Kota Malang tahun 2021 yang seharusnya dapat direalisasikan pada tahun 2022 tentang penyelesaian pembebasan tanah dan bangunan di Jl. Ki Ageng Gribig sebagai jalan masuk ke pintu Tol Madyopuro, rencana pembangunan Pasar Besar, pembangunan Pasar Blimbing, pembangunan Pasar Gadang, dan saluran air Jl. Bondowoso-Kali Metro, kedepannya agar Pemerintah Kota Malang mendukung upaya DPRD Kota Malang untuk membentuk panitia khusus yang membahas tentang pembebasan tanah dan bangunan di Jl. Ki Ageng Gribig sebagai jalan masuk ke pintu Tol Madyopuro, rencana pembangunan Pasar Besar, pembangunan Pasar Blimbing,	<p>Pembebasan Tanah dan Bangunan di Jalan Ki Ageng Gribig sudah direalisasikan Tahun 2023 karena penganggaran baru dapat dilaksanakan di tahun tersebut.</p> <p>a. Terkait Pasar Blimbing setelah Pemerintah Kota Malang mendapat pendampingan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI sejak bulan Februari 2022 dan telah mendapatkan <i>Legal Opinion</i> (Pendapat Hukum) dari Kejaksaan Negeri Kota Malang tertanggal 13 Oktober 2022, saat ini Pemerintah Kota Malang sedang mengkaji perjanjian kerja sama melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) tentang kesanggupan untuk melanjutkan kewajiban/hak masing - masing pihak karena</p>	Pemerintah Kota Malang dapat segera melakukan pembangunan kembali Pasar Besar Malang baik melalui skema penganggaran APBD maupun APBN dalam rangka percepatan pergerakan ekonomi daerah.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>pembangunan Pasar Gadang, dan saluran air Jl. Bondowoso-Kali Metro, Exit Tol, Pasar Besar, Jacking, Pasar Gadang dan Pasar Blimbing;</p>	<p>progres pekerjaan berhenti dan berlarut-larut, selanjutnya hasil kajian akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lanjut revitalisasi atau pengakhiran perjanjian).</p> <p>b. Untuk Pasar Induk Gadang setelah mendapatkan <i>Legal Opinion</i> (Pendapat Hukum) dari Kejaksaan Negeri Kota Malang tertanggal 31 Oktober 2022 saat ini Pemerintah Kota Malang sedang mengkaji perjanjian kerja sama melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) tentang kesanggupan untuk melanjutkan kewajiban/hak masing - masing pihak.</p> <p>c. Pasar Besar Malang : setelah berkonsultasi dan mendapatkan pandangan serta pertimbangan secara langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi selanjutnya Pemerintah</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		Kota Malang dan PT. Matahari Putra Prima bersepakat melakukan Perjanjian Pengakhiran Kerja Sama dengan nomor Pemerintah Kota Malang: 415.4/07/35.73.111/2023 dan Nomor PT. Matahari Putra Prima,Tbk: 003/PSM/MPPA-PKM/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.	
4.	Hendaknya Pemerintah Kota Malang memprioritaskan penyerahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan sehingga terproses serah terima administrasi dan fisiknya serta tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Malang agar hak-hak penghuni perumahan terhadap infrastruktur terlayani dengan baik. Di samping itu penerapan sanksi hukum atas keterlambatan penyerahan PSU oleh pengembang perumahan harus diterapkan dengan baik dan tegas;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi serah terima PSU kepada pengembang; 2. Melakukan penagihan terhadap pengembang yang telah selesai melaksanakan pembangunannya; 3. Mencatat penyerahan PSU ke Neraca berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan PSU dari pihak pengembang ke Pemerintah Kota Malang dan sudah dilakukan pengecekan fisik di lapangan oleh Tim verifikasi PSU. BAST yang dimaksud setidaknya dilengkapi detail harga perolehan per jenis barang (contoh Tanah, Jaringan Irigasi & Jalan) sesuai dengan Permendagri Nomor 108 tahun 2016 	Kota Malang telah melakukan serah terima PSU dengan total 180 perumahan dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020 = 63 perumahan 2. Tahun 2021 = 24 perumahan 3. Tahun 2022 = 41 perumahan 4. Tahun 2023 = 52 perumahan Terhadap PSU yang telah diserahterimakan dilakukan pencatatan.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, pencatatan sampai dengan Tahun 2023 sejumlah 17 PSU yang dicatatkan di Neraca Daerah dan 161 PSU yang harus di lakukan verifikasi lapangan untuk memperoleh data yang akurat.	
5.	Terkait penyelesaian jalan berlubang yang sampai saat ini belum tuntas terselesaikan, Pemerintah Kota Malang diharapkan lebih serius dalam penyelesaiannya dengan mengutamakan kualitas bahan dan pengerjaannya sekaligus disarankan untuk membentuk Satgas penanganan jalan rusak. Hal yang paling mendesak untuk saat ini adalah perbaikan jalan di depan Pasar Gadang menuju Kelurahan Bumiayu;	Upaya Pemerintah Kota Malang dalam penanganan jalan berlubang sudah cukup maksimal. DPUPR-PKP melalui Bidang Bina Marga sudah memiliki Satgas Khusus yang menangani permasalahan jalan berlubang. Akan tetapi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jalan-jalan menjadi cepat rusak antara lain adalah genangan, volume kendaraan, serta curah hujan yang cukup tinggi. Terkait kualitas bahan sudah menggunakan bahan yang berstandar nasional dan layak untuk digunakan. Pada penanganan jalan berlubang di tahun 2023 terdapat kurang lebih 150 jalan yang sudah dilakukan pemeliharaan.	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>Terkait pengerjaan jalan berlubang di wilayah Pasar Gadang sudah dianggarkan di tahun 2024, akan tetapi pada saat pembahasan anggaran terdapat pengurangan anggaran/<i>refocusing</i> anggaran. Sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana. Selain itu faktor yang membuat jalan berlubang semakin parah di area dimaksud yaitu limbah pasar selalu dibuang di jalan raya oleh para pedagang.</p>	
6.	<p>Pembangunan Kawasan Kayu Tangan atau sering disebut dengan Kajoe Tangan Heritage masih menimbulkan polemik di masyarakat, kita melihat output outcome dari pembangunan Kajoe Tangan Heritage tidak sesuai dengan perencanaan dan harapan awal yaitu untuk memajukan wisata kampung kayu tangan. Saat ini banyak kegiatan susulan yang terlihat sporadis tidak sesuai grand design awal di antaranya pemasangan kepala lokomotif lori di sebelah patung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sarana dan prasarana (lampu dekoratif, kursi taman, tempat sampah, bollard dan vegetasi) sudah sesuai dengan gambar perencanaan dan anggaran; 2. Pemasangan dan perletakan lori merupakan CSR yang artinya bukan dari anggaran Dinas PUPR/PPK. <p>Pembinaan pelaku wisata dengan terus melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan melakukan pelatihan pelatihan yg sudah dan terus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penataan sarana dan prasarana 2. Kegiatan susulan berupa pemasangan kepala lokomotif lori. <p>Untuk memajukan wisata kampung kayu tangan dengan berbasis pengembangan Kampung Heritage</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>Chairul Anwar. DPRD Kota Malang menyarankan agar Pemerintah Kota Malang segera melakukan penguatan penataan atas Kawasan Kayu Tangan tersebut termasuk sarana dan prasarana sebagai daerah tujuan wisata agar segera dapat dipenuhi;</p>	<p>dilakukan dengan mengikutsertakan dalam lomba ke tingkat provinsi. Berhasil memperoleh 10 besar pertama Dewi Cemara Tahun 2023 tingkat Nasional dengan diraihnya 5 terbaik ADWI kategori konten kreatif.</p> <p>Terkait dengan Pembangunan Kayu Tangan <i>heritage</i> telah terdapat desain penataan kawasan perumahan dan permukiman Jalan Basuki Rahmat oleh Kementerian PUPR dan Dinas PUPRPKP yang pelaksanaannya yang terbagi menjadi 3 zona. Selain itu ada kegiatan aktivasi pariwisata oleh Dinas Porapar. Sedangkan beberapa <i>ornament/dekorasi</i> kota dilaksanakan melalui program TSP/CSR yang pelaksanaannya telah dikoordinasi dengan DLH selaku penanggung jawab tusi dekorasi kota.</p>	<p>dan Kearifan Lokal.</p> <p>Pembangunan Kayu Tangan <i>heritage</i> bertujuan untuk menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kayu Tangan dan sekitarnya.</p>
7.	<p>Terkait dengan pengelolaan dan penanganan sampah Permasalahan utama adalah kurangnya armada dan SDM personil, luasan lahan dan umur TPA yang semakin berkurang dari</p>	<p>Terkait dengan kekurangan armada dan personil, upaya yang dilakukan adalah :</p>	<p>Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:</p> <p>a. Pengurangan Sampah Rumah</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>tahun ke tahun, dimana pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill ternyata bukan solusi utama penyelesaian masalah sampah, disarankan agar mengubah pengelolaan dengan sistem landfill meaning yaitu mengolah sampah dengan didaur ulang sehingga bernilai ekonomis dan bisa menopang PAD Kota Malang sekaligus perlu adanya penambahan armada pengangkut sampah dan penyiapan SDM yang profesional terutama driver dan co driver. Termasuk perlu adanya tambahan jumlah TPS yang memadai, menertibkan TPS liar dan yang terpenting insentif bagi pengangkut sampah dari sumber ke TPS;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan pemenuhan armada dan personil dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Regulasi/ketentuan tentang pengadaan tenaga/personil (ASN dan Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan) b. Ketersediaan anggaran; 2. Melakukan pengaturan/penjadwalan operasional personil, baik tenaga pengemudi/driver maupun pramu kebersihan seiring dengan berkurangnya jumlah personil (memasuki purna tugas); <p>Terkait dengan pengelolaan sampah, sampai saat ini telah dilakukan secara beriringan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>Sanitary Landfill</i> dilaksanakan di UPT Pengelolaan Sampah/TPA Supit Urang. 2. Pengelolaan sampah daur ulang baik melalui pemilahan sampah dan pengolahan kompos, dilaksanakan di TPS3R dan Rumah PKD 	<p>Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. <p>Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. <p>Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilahan; b. Pengumpulan; c. Pengangkutan; d. Pengolahan; dan

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>Terkait dengan penambahan jumlah TPS, dilaksanakan dengan memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran 2. Ketersediaan armada dan personil/driver truk pengangkut sampah 3. Ketersediaan tanah aset milik pemkot, minimal 48 m2 untuk membangun TPS 4. Jarak antar TPS minimal 3 km 5. Tersedianya akses jalan untuk mobil/truk pengangkut sampah ke TPS <p>Terkait dengan penertiban tempah pembuangan sampah liar, DLH telah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pembersihan dan pengangkutan sampah yang dibuang orang-orang yang tidak bertanggung jawab di setiap wilayah.</p> <p>Terkait dengan pemberian insentif pengangkut sampah dari sumber ke TPS, disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>e. Pemrosesan akhir</p> <p>Hasil capaian pemantauan di Tahun 2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Timbunan Sampah, Target : 250.095,00 ton/tahun, capaian: 284.095,41 ton/tahun; 2. Pengurangan, Target: 67.525,65 ton/tahun (27%), capaian: 77.330,37 ton/tahun (27,22%); <p>Penanganan, Target: 180.068,40 ton/tahun (72%), capaian: 203.007,87 ton/tahun (71,46%)</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkutan sampah dari sumber/rumah tangga ke TPS dilakukan secara swakelola oleh masyarakat/keompok masyarakat; 2. Armada pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Supit Urang setiap hari; 3. Pemberian insentif kepada pengangkut sampah, selama ini dilaksanakan oleh pengurus RT/RW secara swakelola melalui iuran warga. <p>Pengelolaan sampah yang ada di TPA Supit Urang Kota Malang saat ini menggunakan sistem sanitary landfill. Sistem <i>sanitary landfill</i> TPA Supit Urang dapat mengelola sampah sebanyak 15 ton/hari sampah siap daur ulang. Dengan jumlah timbunan sampah yang semakin hari semakin meningkat karena bertambahnya penduduk tetap dan pendatang di Kota Malang, maka jumlah sampah yang akan dihasilkan juga akan ikut bertambah. Maka perlu dilakukan pengelolaan sampah dari sumber. Salah satu cara pengelolaan sampah</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>dari sumber yaitu pembuatan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu). Ini adalah tempat pengelolaan sampah menjadi bahan bakar ricket dan lebih efisien dalam program penanganan sampah. Dengan adanya TPST tentu saja bisa menambah umur dan lahan TPA Supit Urang yang mana kurang lebih 3,5 tahun. Pembangunan TPST sangat bermanfaat bagi proses pengolahan sampah yang ada di Kota Malang.</p>	
8.	<p>DPRD Kota Malang mendorong agar pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah agar dapatnya segera direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;</p>	<p>Berdasarkan rekapitulasi ruang terbuka hijau (RTH) bahwasanya saat ini menurut IHBI rencana pola ruang RTRW, Ruang Terbuka Hijau memiliki total keseluruhan yaitu 17, 73%. Pada UU Nomor 26 Tahun 2007 diketahui bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit memiliki luasan yaitu 20%, sehingga menghasilkan defisit pemenuhan Ruang Terbuka Hijau yaitu sebesar 2,27%. Menurut RDTR yang terdapat di DPUPRPKP, pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau tersebut dapat dilakukan dengan</p>	<p>Pada tahun anggaran 2024 sudah teranggarkan penggandaan lahan makam dengan luas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makam karang Besuki: kurang lebih 0,308 ha 2. Makam Madyopuro: kurang lebih 0,1692 ha <p>Total 0,4775 ha</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>cara yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilihat dari keadaan Kecamatan, pemenuhan RTH dapat dilakukan dengan pembelian lahan seluas 680,72 hektar. 2. Dilihat dari keadaan Tipologi, pemenuhan RTH dapat dilakukan dengan pembelian lahan seluas 903,07 hektar. 	
9.	DPRD Kota Malang meminta perhatian dari Pemerintah Kota Malang atas banjir yang ternyata sampai hari ini tidak tertangani dengan baik;	Melakukan rehabilitasi dan normalisasi rutin saluran-saluran yang sudah berkurang fungsinya akibat sedimentasi maupun saluran yang rusak agar berfungsi kembali dan dapat meningkatkan tampungan dari saluran. Di tahun 2023 juga sudah dilakukan pembangunan bosem untuk mereduksi genangan di wilayah Kemirahan sebesar 15% dan juga penanganan di Sawojajar dengan kegiatan pembangunan saluran Jl.Danau Toba-Jl.Ki Ageng Gribig dan Jl.Braton Timur-Jl.Ki Ageng Gribig pada jalan akan mereduksi genangan di jalan sebesar 70%. Serta melakukan	Meningkatkan kapasitas saluran dengan adanya normalisasi dan juga penanganan gangguan di kawasan Sawojajar dan Kemirahan dengan dibangunnya busem dan Pembangunan saluran perkotaan Jl.Danau Toba-Jl.Ki Ageng Gribig dan juga pembangunan saluran drainase perkotaan Jl.Braton Timur-Jl.Ki Ageng Gribig. Serta penanganan di kawasan Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Merjosari di Tahun 2024.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>pembangunan dan peningkatan saluran sesuai dengan acuan yang ada di masterplan. Untuk tahun 2024 konsentrasi pekerjaan ada di kawasan kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Merjosari. Diharapkan dengan penanganan dimaksud dapat mengurangi genangan di kawasan tersebut.</p>	
10.	<p>Memperhatikan kondisi kemacetan di Kota Malang yang salah satu penyebabnya adalah tidak tertatanya dengan baik perparkiran di Kota Malang, DPRD Kota Malang merekomendasikan agar secepatnya dilakukan kajian yang dapat menghasilkan road map perparkiran di Kota Malang yang paling sedikit akan dapat menentukan potensi maksimal pendapatan parkir, penentuan lahan-lahan parkir, serta harus dikuatkan dengan payung hukum berupa peraturan daerah tentang perparkiran di Kota Malang;</p>	<p>Dinas Perhubungan Kota Malang sudah melakukan penyusunan kajian potensi parkir pada tahun 2021 dimana kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi retribusi parkir di setiap lokasi parkir dan di tahun 2023 Bapenda juga sudah melakukan kajian potensi retribusi parkir daerah.</p>	<p>Untuk melakukan pendataan serta mengetahui potensi pendapatan di setiap lokasi parkir di kota malang.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
11.	DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk memfasilitasi terbitnya sertifikasi tempat ibadah;	<p>BKAD sampai tahun 2023 sudah memproses hibah tanah untuk tempat ibadah sejumlah 22 bidang, untuk memberikan kepastian legalitas bagi pengelola tempat ibadah. Berkaitan dengan pensertifikatan tanah tempat ibadah, BKAD memberikan dokumen kelengkapan bagi pengelola tempat ibadah untuk pendaftaran di BPN.</p> <p>Telah dilakukan koordinasi intens antara Pemerintah Kota Malang dengan Kantor Pertanahan Kota Malang tentang sertifikasi tempat ibadah melalui program PTSL ataupun hibah aset pemerintah kota.</p> <p>Terbitnya sertipikat tempat ibadah difasilitasi pada Dana Hibah kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia)</p>	<p>Terjaminnya hak secara hukum melalui pensertipikasian tempat ibadah</p> <p>Koordinasi antara Pemerintah Kota Malang dengan Kantor Pertanahan Kota Malang tentang sertifikasi tempat ibadah.</p>
12.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang sejumlah 125.537 dan yang tertangani baru 46% atau 39.844 jiwa, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kota	Mempertahankan dan meningkatkan program Kota Malang yang mencapai 125.537 dengan hanya 46% atau 39.844 jiwa yang telah ditangani merupakan suatu permasalahan yang	Dengan langkah-langkah konkret peningkatan alokasi anggaran maka penjangkauan layanan akan terlaksana, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta implementasi

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>Malang untuk benar-benar memperhatikan masalah penanganan PMKS;</p>	<p>memerlukan perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah besar PMKS yang belum mendapatkan bantuan atau perhatian yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan upaya penanganan terhadap PMKS. Diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan implementasi program-program yang dapat secara efektif menjangkau lebih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang mencapai 125.537 jiwa. Namun, hanya 46% atau 39.844 jiwa yang telah ditangani. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah besar PMKS yang belum mendapatkan bantuan atau perhatian yang memadai.</p> <p>Untuk optimalisasi penanganan PMKS dan keberlanjutan program,</p>	<p>program-program yang dapat secara efektif menjangkau lebih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>Dengan ilustrasi jika Pemerintah hadir dengan memberikan layanan dasar yang saat ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.150.000/bulan x 85.693 belum tertangani x 12 bulan maka diperlukan dana Rp.154.247.400.000,00 untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).</p> <p>Dengan langkah konkret peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas lembaga, dan implementasi program efektif, penjangkauan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan optimal. Ilustrasinya, Pemerintah telah memberikan layanan dasar yang saat ini sudah dilaksanakan, memenuhi</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>Pemerintah Kota Malang perlu melakukan langkah-langkah konkret, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan alokasi anggaran; ✓ Peningkatan kapasitas lembaga terkait; ✓ Implementasi program-program yang efektif; ✓ Program pemberdayaan ekonomi (berupa kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan); ✓ Program perlindungan sosial (berupa kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan); <p>Program rehabilitasi sosial (berupa bimbingan fisik, mental, dan sosial).</p>	<p>kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti yang sudah terlampir.</p>
13.	<p>Program pembinaan atlet paralympic yang masih belum dikerjakan di tahun anggaran 2022 harus segera dilaksanakan di tahun anggaran mendatang, mengingat Kota Malang merupakan kota inklusi yang wajib menggali semua potensi di setiap klaster yang ada di masyarakat;</p>	<p>Disporapar pada tahun 2022 telah melaksanakan Program Pembinaan Atlet Paralipian dengan bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan lomba paralimpian Tingkat Kota diikuti oleh 100 Atlet difabel dari berbagai Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi di Kota Malang. Kategori lomba dibagi menjadi dua yaitu: 	<p>Tujuan Pembinaan Atlet Paralimpian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi fasilitas kepada atlet berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti <i>event</i> olahraga; 2. Mencari bibit olahragawan dari atlet berkebutuhan khusus yang memiliki potensi; 3. Mempersiapkan atlet atlet berkebutuhan khusus Kota

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>a. Lomba lari 100 meter putra kategori tuna rungu wicara</p> <p>b. Lomba lari 100 meter putri kategori tuna rungu wicara</p> <p>2. Pengiriman Atlit Paralimpian ke Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PAPAPERDA) I Tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Kota Malang mengirimkan 3 atlet paralimpik, 2 atlet dari cabang olahraga bulutangkis. Dengan mengirimkan atlet tersebut Kota Malang mendapatkan 2 medali emas dari cabang olah raga atletik dan bulutangkis, dan 1 medali perunggu dari cabang olahraga atletik;</p> <p>3. Mamberikan Fasilitas tempat Latihan bulutangkis pada Yayasan Warung Inklusi Malang di Garuda <i>Sport Center</i>.</p>	<p>Malang agar dapat mengikuti <i>event</i> Tingkat Provinsi Nasional dan Internasional.</p> <p>Masalah dari program pembinaan Atlet Paralimpian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya atlet berkebutuhan khusus; 2. Terbatasnya pelatih bagi atlet berkebutuhan khusus; 3. Kurangnya sarana dan prasarana bagi atlet berkebutuhan khusus.
14.	Sekolah Penggerak di Kota Malang masih belum bisa diwujudkan di tahun 2022 padahal tenaga didik penggerak sudah sangat banyak. Untuk itu DPRD Kota Malang	Tahun 2023 Kota Malang telah berhasil meloloskan sekolah dalam program sekolah penggerak dengan rincian jenjang TK 10 lembaga, jenjang SD 27 lembaga dan jenjang SMP 11 lembaga	Untuk mewujudkan visi pendidikan agar dapat berkembang maju, berdaulat, mandiri dan berkompeten perlu membentuk pelajar Pancasila dalam pengembangan hasil belajar siswa

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	mendorong pelaksanaan sekolah penggerak di tahun 2023 serta melengkapi instrumen pendukungnya;	sehingga ada 48 lembaga	secara <i>holistic</i> yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah, guru/pendidik) Dukungan yang diperlukan : Perlu percepatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik dengan pelatihan-pelatihan, agar Program Sekolah Penggerak berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai harapan
15.	Dengan bertambahnya jumlah sekolah negeri, maka berdampak pada penurunan PPDB di sekolah swasta sehingga DPRD Kota Malang mendorong agar Pemerintah Kota Malang meningkatkan bantuan sarana dan prasarana agar tetap eksis dalam ikut mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas;	Penambahan sekolah negeri (SMPN 28, 29, & 30) di tahun 2022 hanya berdampak pada SMPS di sekitarnya saja, tetapi untuk tambahan bantuan sarpras sudah ditindaklanjuti.	Ada 3 hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan: 1. Sarana prasarana (berbasis kebutuhan), 2. Tenaga pendidik (guru), dan 3. Kurikulum pembelajaran (inovasi)
16.	Program unggulan Dinas Kesehatan yaitu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, yaitu peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama dengan aplikasi BPJS Cekat	Sampai saat ini di setiap Kelurahan dan PD terkait (Dispendukcapil, Dinsos P3AP2KB, Disnaker PMPTSP, Dinkes dan BPJS Kesehatan) sudah ada petugas (tenaga admin).	Pemahaman yang sama antar petugas (admin JKN Cekat) di Kelurahan

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>yang ada di setiap kelurahan. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat Ketika mengurus melalui aplikasi Cekat di kelurahan ada pemahaman yang tidak sama antar petugas di kelurahan. Untuk itu DPRD Kota Malang mendorong agar adanya petugas khusus untuk pelayanan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Cekat;</p>	<p>Dinas Kesehatan terus melakukan pendampingan kepada seluruh admin JKN Cekat baik di Kelurahan maupun di PD terkait melalui WA Grup yang dilakukan setiap hari, pertemuan secara luring maupun daring secara berkala.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kominfo menyediakan dukungan/<i>support</i> pemanfaatan sistem informasi e-JKN Cekat melalui sarana / grup pendampingan kepada petugas wilayah yg terhubung secara langsung ke Dinkes, Diskominfo dan juga BPJS; 2. Diskominfo pada tahun 2023 juga telah menginisiasi layanan helpdesk TIK dan manajemen pengetahuan SPBE bagi seluruh perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan yang dapat diakses melalui spbe.malangkota.go.id/ 	<p>Tindak lanjut dimaksud memberikan kemudahan layanan bagi petugas yang memerlukan koordinasi aspek teknis aplikasi e-JKN Cekat dengan tim teknis Diskominfo.</p>
17.	<p>Agar pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah berjalan efektif diperlukan sinergi dan koordinasi</p>	<p>Satpol PP telah melakukan inventarisasi terhadap 15 Peraturan Daerah yang telah ditegakkan untuk mengetahui</p>	<p>Tindak lanjut tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat pelaksanaan penegakkan Peraturan</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>Satpol PP dengan OPD teknis, DPRD Kota Malang mendesak dilakukan inventarisasi keberadaan Peraturan Daerah sesuai TUSI pada masing-masing OPD dan melakukan review Perda-Perda yang tidak efektif/kadaluarsa, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya amanah regulasi terbaru;</p>	<p>Peraturan Daerah yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan maupun terdapat perubahan akibat amana regulasi baru.</p> <p>Daftar Peraturan Daerah yang telah efektif ditegakkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul; 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan; 5. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengamanan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis; 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan; 	<p>Daerah berjalan dengan efektif dan disertai dengan koordinasi yang baik bersama PD teknis.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.</p> <p>Daftar Peraturan Daerah yang belum efektif ditegakkan:</p> <p>1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota belum dapat ditegakkan dikarenakan tidak adanya pelaporan terkait pelanggaran Perda tersebut dari perangkat Daerah pengampu kepada Satpol PP Kota Malang;</p> <p>2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir belum efektif untuk ditegakkan karena di dalam Perda tersebut ditujukan untuk Penertiban Pengelolaan Parkir, sedangkan untuk penertiban pelanggar parkir tidak pada tempatnya dikenakan dengan Perda No. 2 Tahun 2012</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan;</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi belum efektif karena kerancuan kewenangan antara Pemerintah Daerah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;</p> <p>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak ditegakkan karena adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya;</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan tidak mengandung sanksi pidana hanya ada sanksi administrasi dan sanksi administrasi tersebut dilaksanakan perangkat daerah pengampu;</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum dilaksanakan karena Perda ini baru akan ditegakkan di tahun 2024 untuk menggantikan Perwal Penerapan Disiplin & Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sbg Upaya Pencegahan & Pengendalian Corona Virus Disease 2019;</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dikarenakan tidak adanya pelaporan terkait pelanggaran Perda tersebut dari perangkat Daerah pengampu kepada Satpol PP Kota Malang.</p> <p>Satpol PP pada tahun 2023 sudah mulai melakukan koordinasi dengan PPNS yang ditugaskan di luar Satpol PP dengan harapan PPNS tersebut tetap dapat melakukan tugasnya sebagai PPNS;</p> <p>Pada tahun 2024 ini Satpol PP juga mulai akan melakukan pertemuan rutin dengan PD yang mengampu</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		Perda/Perkada sesuai TUSI untuk membahas Perda/Perkada mana yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya perubahan akibat amanah regulasi baru	
18.	DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang, melakukan kajian penyusunan rencana induk potensi kebakaran dalam rangka usulan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran;	Telah dibentuk tim pembuat Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang telah melaksanakan survei dan penyusunan RISPKP dengan sasaran 18 sasaran pusat perbelanjaan.	Tindak lanjut tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya risiko ataupun potensi-potensi kebakaran yang dapat terjadi pada 18 tempat perbelanjaan tersebut. Disisi lain hal ini juga menjadi dasar untuk usulan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran.
19.	Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang berkomitmen melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya: 1. Mempercepat pelaksanaan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat Kota Malang dengan melaksanakan Jemput Bola IKD ke Instansi Pemerintah, Perbankan, Rumah	Untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Malang, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 meliputi 13 (tiga belas) item perubahan. DPRD Kota Malang menekankan agar Pemerintah Kota Malang berkomitmen melaksanakan ketentuan dimaksud;</p>	<p>Sakit, Sekolah, Kampus dan <i>Event</i> yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam rangka peningkatan kepemilikan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk Kota Malang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kerja sama dan pemanfaatan data kependudukan dengan OPD se-Kota Malang; 3. Kemudahan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri melalui Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri); 4. Meningkatkan pelayanan admindukcapil melalui Jemput Bola, <i>Event</i>/GISA, pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), sekolah, tempat ibadah maupun pelayanan di kelurahan-kelurahan; 5. Sosialisasi baik melalui media banner, spanduk, radio dan <i>website</i> bahwa Pelayanan Adminduk tidak dipungut biaya (GRATIS); 6. Meningkatkan Inovasi dari Aplikasi SI APEL versi 3 menjadi SI APEL TEGAS dan Terciptanya Aplikasi 	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>LAPOR PAK untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Sosialisasi kepada pegawai dan Masyarakat Kota Malang mengenai sanksi terkait manipulasi data kependudukan, pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan serta penyalahgunaan dalam mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan.</p>	
20.	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 ditetapkan secara nasional, sebagai Perangkat Daerah dengan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pada tahun 2022 diusulkan sebagai Perangkat Daerah dengan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Bebas Korupsi (WBBM) namun belum berhasil. DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota melakukan evaluasi atas kegagalan tersebut dan melakukan langkah-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu, melakukan pendampingan/desk dengan fokus perbaikan atas catatan hasil evaluasi pembangunan ZI 2021 2. Mengusulkan 3 (tiga) Perangkat Daerah Tahun 2022: <ul style="list-style-type: none"> - Dispendukcapil Kota Malang-WBBM - Bapenda Kota Malang-WBK - Disnaker, PMPTSP-WBK 3. Hasil (Surat MenpanRB Nomor: B171/PW.04/2022 tanggal 6 Desember 2022) 	<p>Mengusulkan kembali Dispendukcapil Kota Malang untuk penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	langkah perbaikan merespon hasil penilaian;	<ul style="list-style-type: none"> - Bapenda Berhasil memperoleh Predikat WBK - Dispendukcapil Belum Berhasil predikat WBBM - Disnaker, PMPTSP Belum Berhasil predikat WBBM 	
21.	Bahwa di era digital sekarang ini, keamanan cyber memiliki peran yang sangat penting, dari banyaknya laporan menyebutkan bahwa situs milik pemerintah menjadi target utama dalam serangan cyber. Ancaman gangguan cyber sebagian besar ditujukan pada situs atau sistem yang dikelola oleh pemerintah. Dalam rangka menjalankan pengamanan sekaligus antisipasi terhadap ancaman bagi keamanan data dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang mendesak agar segera dibentuk Government CSIRT (Computer Security Incident Response Team) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS);	Pembentukan TTIS Kota Malang/CSIRT Malang Kota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kota Malang dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/159/35.73.112/2023 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Khusus Kota Malang; 2. <i>Launching</i> Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kota Malang/CSIRT Malang Kota oleh BSSn RI, telah dilaksanakan pada 08 November 2023 berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor : 256/CSIRT.01.2.01/BSSN/09/2023 	Dengan dibentuknya TTIS Kota Malang/CSIRT Malang Kota serta telah terbitnya Sertifikat ISO/IEC 27001:2022, maka diharapkan ancaman keamanan <i>cyber</i> di Kota Malang akan lebih dapat diminimalisir.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
22.	<p>Masyarakat sulit mengakses informasi kebijakan publik, walaupun teknologi sudah berkembang dengan pesat. Data lapangan menunjukkan bahwa permohonan informasi terkait dengan informasi kebijakan publik yang diakses tidak semua Perangkat Daerah bersedia memberikan informasi. Di sisi lain persoalan yang terjadi dalam konteks kekinian adalah walaupun informasi begitu mudah diakses melalui teknologi, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses informasi tersebut, karena akses informasi melalui tehnomogi masih terpusat di beberapa wilayah dan kelompok tertentu, DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan aksesibilitas informasi kebijakan publik bagi masyarakat;</p>	<p>Atas rekomendasi terhadap aksesibilitas informasi kebijakan, dapat disampaikan bahwa mendasarkan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka masyarakat dapat mengakses dan memperoleh informasi melalui berbagai kanal informasi yang tersedia meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tersaji dan/atau disajikan oleh media massa; - Informasi yang didapatkan dan dimohonkan pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah) Kota Malang; - Informasi yang disajikan melalui portal <i>website</i> Pemerintah Kota Malang dan/atau <i>website</i> pada masing masing Perangkat Daerah; - Informasi yang didapatkan pada forum perencanaan pembangunan (musrenbang); - Monitoring, evaluasi dan koordinasi pemenuhan permohonan informasi publik terus ditingkatkan melalui 	<p>Tindak lanjut tersebut membuka seluas-luasnya akses informasi masyarakat terhadap program, kegiatan maupun anggaran Pemerintah Kota Malang sehingga keterbukaan informasi publik di Kota Malang dapat terwujud.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>WAG PPID Kota Malang serta berbagai Forum Diskusi antar pelaksana PPID.</p> <p>Upaya keterbukaan informasi juga digelar melalui serta memberikan kemudahan masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi maka telah dilaksanakan program Ngombe (Ngobrol Mbois Ilakes) setiap hari selasa pagi. Pemerintah Kota Malang juga telah menyiapkan aplikasi berbasis android dengan nama aplikasi Malang Mbois, yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ragam informasi pelayanan public.</p>	
23.	<p>Untuk mempercepat keterpaduan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat penda, maupun nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 18/2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional</p>	<p>Atas rekomendasi dimaksud Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Keputusan Walikota Malang Nomor:188.45/195/35.73.112/2023 tentang Arsitektur SPBE dan Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/196/35.73.112/2023 tentang Peta Rencana SPBE.</p>	<p>Tindak lanjut tersebut memperkuat seluruh aspek dalam domain kebijakan SPBE Kota Malang sehingga pengembangan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis digital semakin terarah selaras dengan agenda strategis nasional dan daerah</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Keterpaduan pembangunan dan pengembangan SPBE baik instansi pemda maupun nasional akan meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang lebih sistematis, sederhana, dan terpadu. Terkait dengan hal tersebut DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota Malang untuk segera menyelesaikan regulasi teknik yakni Peraturan Walikota tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;</p>		
24.	<p>Saat ini, Pemerintah Kota Malang sedang mengembangkan Malang Satu Data sebagai bagian dari perwujudan satu data nasional. DPRD Kota Malang menekankan untuk terus di dorong pemanfaatannya, utamanya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kedepan serta dapat memvalidasi data kemiskinan di Kota Malang lebih akurat;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan indikator kesejahteraan Sosial; 2. Pencermatan data dasar kemiskinan yang berasal dari DTKS serta P3KE; 3. Identifikasi kebutuhan (<i>need</i>) guna intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Malang; 4. Penyiapan <i>database</i> kesejahteraan sosial; 5. Penyiapan serta pembangunan aplikasi DPKTSAM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Portal Malang Satu Data sebagai <i>Big Data</i> Kota Malang yang berfungsi sebagai bank data untuk kebutuhan perencanaan sampai evaluasi pembangunan Kota Malang; 2. Pengembangan aplikasi PDKTSAM sebagai <i>tools</i> bagi petugas Puskesmas untuk melakukan <i>update</i> data kemiskinan Kota Malang sebelum

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>6. Sosialisasi serta Bimbingan Teknis bagi surveyor;</p> <p>7. Pelaksanaan validasi data kemiskinan Kota Malang oleh surveyor;</p> <p>8. Pengolahan data serta analisa hasil validasi data kemiskinan Kota Malang oleh statistisi penanggung jawab data kemiskinan Kota Malang;</p> <p>9. Penyajian dalam <i>dashboard</i> kesejahteraan sosial Kota Malang.</p> <p>Ke depan dilakukan <i>input</i> data ke Satu Data (SATA) Pemerintah Kota Malang.</p> <p>Kota Malang saat ini telah menggunakan satu data sebagai dasar penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Kota Malang telah melakukan validasi data kemiskinan melalui kegiatan pendataan kesejahteraan sosial masyarakat yang tertuang dalam database PDKTSAM dan terpublikasi secara agregat dalam Satu Data Kota Malang. Dengan satu data Dinas Sosial, P3AP2KB akan</p>	<p>dimasukkan dalam sistem SIKS-NG milik Kementerian Sosial;</p> <p>3. Pengembangan validasi data stunting Kota Malang.</p> <p>Ketermanfaatan Satu Data dalam menyusun kebijakan perencanaan.</p> <p>Data kemiskinan yang lebih akurat</p> <p>Konsistensi penganggaran dalam pendataan, pengelolaan serta pemanfaatan data dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.</p> <p>Konsistensi penganggaran mencakup kesinambungan</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>menindaklanjuti dengan melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proses pendataan sesuai dengan SOP yang telah disusun dan ditetapkan; ✓ Melaksanakan pemutakhiran dan verifikasi validasi data berkesinambungan; ✓ Pemanfaatan satu data sebagai data pijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran; ✓ Meningkatkan keamanan data dan pemanfaatan data. <p>Dinas Sosial, P3AP2KB akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut setelah implementasi satu data, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proses pendataan sesuai SOP yang telah disusun dan ditetapkan; ✓ Pemutakhiran dan verifikasi validasi data secara berkesinambungan; ✓ Pemanfaatan satu data sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran; 	<p>pendataan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendataan yang dilakukan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, data dikelola efisien, dan dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan dokumen perencanaan yang konsisten dan relevan.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		✓ Peningkatan keamanan dan pemanfaatan data.	
25.	Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut. Namun pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih terkendala di lapangan. Akibatnya, banyak pengembang dan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan PBG sebagai syarat untuk mendirikan bangunan, DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota Malang segera melakukan pertemuan dan konsolidasi Perangkat Daerah pengampu, terkait sistem Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF), untuk mencari solusi dari kendala yang terjadi dalam proses pengurusan PBG dan juga SLF;	<p>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Simulasi Pengurusan PBG dan SLF yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Malang dan diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, BAPPEDA, DPUPRPKP, DISNAKER PMPTSP dan Bagian Organisasi dalam rangka memetakan kendala dan permasalahan dalam proses pengurusan PBG dan SLF di Kota Malang.</p> <p>Pemerintah Kota Malang melalui Sekretariat Daerah dan PD terkait telah melakukan konsolidasi dan simulasi pelayanan PBG serta mengambil beberapa langkah percepatan pelayanan di antaranya menetapkan TPA yang dapat melakukan pelayanan sewaktu-waktu, melakukan publikasi Penyedia Jasa untuk pemenuhan dokumen teknis,</p>	<p>Solusi atas kendala proses pengurusan PBG dan SLF</p> <p>Kendala lapangan dalam pengurusan PBG dan SLF</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		serta menjadwalkan konsultasi ke kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri.	
26.	Untuk memenuhi ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Naker PMPTSP terus berupaya mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS) dengan melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin usaha dan izin komersial operasional serta terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, terkait komitmen pemohon melalui OSS;	Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pelaku usaha dilaksanakan bersama melalui Subsistem Pengawasan Perizinan Berusaha secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> . Secara teknis melalui Keputusan Walikota Nomor: 188.45/3/35.73.112/2023 telah dibentuk Tim Pengawasan yang beranggotakan unsur dari Disnaker, PMPTSP, Satpol PP, DPUPRPKP, DLH, DISHUB, DINKES, DISDIKBUD, DISPANGTAN, DISKOPINDAG, DISPORAPAR, BKAD, POLRESTA Malang Kota, Kejaksaan Negeri, Kantor Pertanahan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	Tim Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
27.	Dalam upaya mendorong perubahan strategi pelayanan perizinan reklame DPMPTSP Kota Malang perlu	Sistem Informasi Pengelolaan Reklame telah dimulai dengan pengembangan aplikasi si-IZOL Disnaker PMPTSP,	Sistem Informasi Pengelolaan Reklame.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>mempunyai sistem pelayanan perizinan reklame yang dapat menyimpan database pemetaan titik reklame yang memuat koordinat reklame, informasi status reklame, dan dokumentasi reklame. Terkait dengan hal tersebut DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Reklame;</p>	<p>dimana saat ini dalam aplikasi si-IZOL telah dilengkapi koordinat reklame, informasi status reklame, dan dokumentasi reklame. Sedangkan untuk pemetaan titik reklame akan dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Walikota tentang aturan pelaksanaan dari Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota tentang RDTRK.</p>	
28.	<p>Hasil penilaian sistem merit 2022 Pemerintah Kota Malang mendapat total nilai 291,5 dengan katagori Baik ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 dengan total nilai 256,5 dengan kategori Baik. Untuk mencapai total nilai 325-400 dengan kategori Sangat Baik, DPRD Kota Malang merekomendasikan Pemerintah Kota melakukan akselerasi capaian kinerja dari Aspek Pengadaan dan Pengembangan Karier, yang meliputi:</p>	<p>Hasil penilaian sistem merit tahun 2023 telah mengalami peningkatan nilai, yaitu dengan total nilai 297 kategori Baik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 277/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Adapun rekomendasi DPRD Kota Malang guna peningkatan hasil penilaian sistem merit, akan segera ditindaklanjuti.</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Pengadaan, yaitu Menetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN; • Aspek Pengembangan Kompetensi/Karier, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Standar Kebijakan Jabatan (SKJ) untuk Jabatan Fungsional dan Pelaksana; - Menerapkan analisis kesenjangan kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi untuk seluruh Pegawai; - Menyusun program pengembangan kompetensi yang terjadwal dan berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja masing-masing pegawai. 	<p>Adapun beberapa langkah yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang telah dilaksanakan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur dan saat ini sedang menunggu rekomendasi perbaikannya; • Standar Kompetensi Jabatan Fungsional dan Pelaksana sedang dalam proses penyusunan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; • Program pengembangan kompetensi pegawai telah disusun dan dilaksanakan. Untuk tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa diklat manajerial, diklat teknis dan diklat fungsional dengan jumlah peserta total sebanyak 481 orang pegawai; 	
29.	Tahun 2022 ini Pemerintah Kota Malang dapat merealisasi capaian	Pada tahun 2023 hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>kinerja utama (IKU) melalui penetapan sasaran strategis meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN dengan indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN, yaitu dari realisasi tahun 2021: 74,68 kategori sedang dicapai 76,32 dengan kategori sedang. Dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk secara konsisten meningkatkan profesionalitas ASN dan fokus pada peningkatan kompetensi yang memiliki bobot penilaian 40 % dan Kinerja dengan bobot 30 %, sehingga dapat meningkatkan indeks IP ASN mencapai 81-90 dengan kategori tinggi;</p>	<p>Malang telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu dengan nilai total 88,51 dengan kategori tinggi. Dengan dukungan dari berbagai pihak serta perhatian dari DPRD Kota Malang, Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi ASN dengan tujuan akhirnya adalah peningkatan layanan kepada masyarakat Kota Malang yang lebih baik.</p>	
30.	<p>Penerapan Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen resiko pada tahun 2022 belum maksimal, DPRD Kota Malang mendesak</p>	<p>Pendampingan Penyusunan Register Resiko telah dilakukan kepada semua Perangkat Daerah dan akan selalu dilaksanakan evaluasi/asistensi pada</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>Pemerintah Kota Malang melakukan pengawalan penerapan manajemen kinerja berbasis resiko agar dikawal secara intens oleh inspektorat bersama Perangkat Daerah lain untuk meminimalisir adanya potensi penyimpangan kinerja di seluruh Perangkat Daerah;</p>	<p>setiap tahun Anggaran/tahapan proses penganggaran.</p> <p>BKPSDM akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kota Malang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang guna optimalisasi penerapan manajemen resiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk meminimalisir adanya penyimpangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
31.	<p>Progres keberhasilan Pemerintah Kota Malang dalam capaian Monitoring Center Of Prevention (MCP) Tahun 2022 menempati Peringkat 115 dengan Indeks 92, dengan rincian score Per Area intervensi sebagai berikut meliputi : Perencanaan dan penganggaran APBD : 97, Pengadaan Barang dan jasa : 98, Perizinan : 100, Pengawasan APIP : 91, Manajemen ASN : 94, Optimalisasi Pajak Daerah : 77, Pengelolaan BMD : 84. DPRD Kota</p>	<p>Telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian MCP Kota Malang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penekanan oleh Walikota Malang kepada Perangkat Daerah untuk pemenuhan Indikator area intervensi MCP Tahun 2023 2. Monitoring dan pendampingan pemenuhan dokumen area intervensi MCP kepada Perangkat Daerah Pengampu oleh Inspektorat Daerah Kota Malang. 	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	Malang mendesak Pemerintah Kota Malang fokus dan serius meningkatkan capaian MCP utamanya area intervensi Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan BMD;		
32.	Nilai Indeks integritas Anti Korupsi atau Survey Penilaian integritas Pemerintah Kota Malang pada tahun 2022 mencapai 77,07 dari target 82, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan indeks Integritas Anti Korupsi sehingga mencapai target yang ditetapkan;	Dapat disampaikan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Integritas Anti Korupsi telah dilakukan dengan pemesanan spanduk/baliho /surat himbauan/ <i>WhatsApp</i> kepada seluruh pengguna layanan publik	
33.	Agar permasalahan pembangunan yang terjadi dan lokasinya berada di Kota Malang yang menjadi kewenangan daerah provinsi mendapat perhatian dan penanganan secara cepat, Pemerintah Kota Malang didorong untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki	Pemerintah Kota Malang telah melakukan Kesepakatan Bersama dengan Provinsi Jawa Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Nomor: 120.23/17/011.3/KSB/2021 dan Nomor: 415.4/01/35.73.111/2021. Akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama terkait hal-hal teknis	Dilakukan koordinasi antara Perangkat Daerah Kota Malang dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penanganan penyelesaian permasalahan pembangunan tersebut dalam bentuk pemberian izin atau kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota;</p>	<p>dengan Perangkat Daerah terkait.</p>	
34.	<p>Pemerintah Kota Malang diharapkan melakukan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk penanganan permasalahan di Jl. Danau Jonge yang sampai saat ini tidak bisa dimanfaatkan secara optimal;</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi perbatasan kota dan kabupaten dalam hal rencana tata ruang termasuk didalamnya sinkronisasi pola ruang dan struktur ruang (rencana jalan terintegrasi).</p> <p>BKAD sudah melakukan perubahan peruntukan dari lahan pertanian menjadi tanah jalan di kawasan Jalan Danau Jonge sebagai upaya menunjang peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di daerah perbatasan kota/kabupaten, nilai manfaat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Malang tetapi juga masyarakat Kabupaten Malang.</p> <p>Kerja Sama Daerah dengan daerah lain terutama daerah yang berbatasan,</p>	<p>Koordinasi perbatasan kota dan kabupaten dalam hal rencana tata ruang termasuk didalamnya sinkronisasi pola ruang dan struktur ruang (rencana jalan terintegrasi).</p> <p>Peningkatan perekonomian masyarakat dan memberikan fasilitas sarana prasarana bagi Masyarakat perbatasan kota/kabupaten.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.</p>	
35.	<p>Sesuai target dan amanah Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) harus sudah tuntas pada bulan Januari 2024, DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota Malang untuk lebih intens melakukan komunikasi dan Koordinasi guna penyelesaian;</p>	<p>Telah diundangkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2024</p> <p>Penyusunan sampai dengan pengundangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah telah selesai dilakukan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 1 Januari 2024. Saat ini sedang proses pengajuan izin penandatanganan ke Menteri Dalam Negeri terkait Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak</p>	<p>Diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai tindak lanjut adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) tepat waktu.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		daerah dan Retribusi Daerah.	
36.	<p>Pembangunan Zona Integritas (ZI) sudah dilakukan secara masif di Pemerintah Kota Malang dengan ada beberapa Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan secara nasional, yaitu ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk Dispendukcapil pada tahun 2021 dan ZI menuju WBK untuk Bapenda dan Naker PMPTSP pada tahun 2022, DPRD Kota Malang mendorong bagi unit yang sudah ditetapkan agar terus menularkan hal-hal yang sudah dilakukan, terutama dalam inovasi pengawasan dan pelayanan publik sehingga setiap Perangkat Daerah memiliki standar dan pemahaman yang sama;</p>	<p>1. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu, pendampingan/desk dengan fokus perbaikan atas catatan hasil evaluasi pembangunan ZI 2022</p> <p>2. Mengusulkan 3 (tiga) Perangkat Daerah Tahun 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispendukcapil Kota Malang - WBBM - Dikbud Kota Malang. -WBK - Puskesmas Janti -WBK <p>(Disnaker PMPTSP tidak diusulkan dikarenakan PD belum sanggup memenuhi dokumen komponen penilaian)</p> <p>3. Hasil (Surat MenpanRB No. B/231/PW.04/2023 tanggal 27 November 2023)</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2023 oleh KemenpanRB bahwa Dispendukcapil tidak memenuhi kriteria desk evaluasi, dengan catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan bukti dukung masih belum cukup pada setiap 	<p>Inspektorat Daerah Kota Malang memasukkan Kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pembangunan ZI ke dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Tahun 2024</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>area, khususnya area pengawasan;</p> <p>b. Pada area pengawasan, matriks risiko yang melampirkan hanya memuat risiko-risiko pada aspek pelayanan, belum terdapat identifikasi risiko-risiko terkait aspek integritas;</p> <p>Tidak terdapat laporan pemantauan realisasi mitigasi risiko.</p>	
37.	<p>Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SAKIP, DPRD Kota Malang mendorong Perangkat Daerah (Kecamatan-Kelurahan) meningkatkan Core Values BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan lebih peran ASN sebagai Agen Perubahan yang memiliki Super Agility, yakni mampu beradaptasi dengan perubahan apapun;</p>	<p>Perangkat Daerah melaporkan progress pelaksanaan rencana tindak agen perubahan di perangkat daerah masing-masing yang berisi nilai-nilai Core Values ASN Berakhlak setiap 3 (tiga) bulan</p>	<p>Penerapan Core Values ASN Berakhlak yang tertuang dalam rencana tindak agen perubahan masing-masing perangkat daerah dapat termonitor</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
38.	<p>Dengan tidak terpenuhinya target pendapatan dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat berpengaruh terhadap struktur belanja daerah. Untuk itu diharapkan optimalisasi pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan terobosan dan inovasi;</p>	<p>Terobosan dan Inovasi dalam optimalisasi pendapatan dari sektor pajak daerah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstensifikasi yang bersifat monitoring digital, dengan media sosial Bapenda mendapatkan banyak sasaran wajib pajak baru seperti halnya PBJT makan minum, hotel, hiburan, parkir, pajak penyelenggaraan reklame dan kategori pajak lainnya dari Instagram, TikTok, Twitter, Youtube, Grab Food, Go Food, Shopee Food, Google Map dan media digital lainnya; 2. Gencar melakukan pembinaan dengan pemasangan sticker peringatan menunggak pajak; 3. e-SPPT yang dilengkapi QRIS untuk mempermudah pembayaran PBB; 4. Pengembangan aplikasi PERSADA dan e-tax untuk merekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh WP; 5. Pembayaran PBB melalui Bank Jatim, Agen Laku Pandai, 	<p>Dengan monitoring digital Bapenda Kota Malang mendapatkan banyak titik sasaran baru yang belum menjadi wajib pajak untuk di data dan di daftarkan untuk segera memenuhi kewajiban pajaknya.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>Indomaret, Alfamart, GoPay, Tokopedia, OVO, dan Kantor Pos;</p> <p>6. Pengembangan aplikasi e-BPHTB;</p> <p>7. Pembayaran Pajak Daerah menggunakan Kode Billing/ VA melalui BNI dan BCA;</p> <p>8. Kegiatan penagihan dan pembayaran PBB melalui giat Sambang Kelurahan, Sambang Perumahan.</p> <p><i>Tax Online Monitoring Room</i> untuk memonitoring transaksi WP secara <i>real time</i></p>	
39.	<p>Pemerintah Kota Malang perlu melakukan pendekatan secara humanis kepada masyarakat terkait dengan kenaikan NJOP yang berpengaruh secara langsung terhadap pajak BPHTB yang sempat ada polemik di masyarakat, termasuk juga penerapan pajak resto bagi para pelaku UMKM;</p>	<p>Dilaksanakan kunjungan rutin ke warga masyarakat di tingkat perumahan sekaligus sosialisasi terkait Pajak PBB dan BPHTB serta telah dilakukannya stimulus dari pemerintah.</p> <p>Pajak Resto bagi para UMKM, Bapenda Kota Malang melakukan pemetaan dengan pendataan yang dituangkan di Berita Acara Pendataan bahwa Pajak Resto untuk UMKM yang berpatokan</p>	<p>Kenaikan NJOP yang berpengaruh terhadap pajak BPHTB akan semakin dipahami oleh masyarakat</p> <p>Dengan pemetaan dan pendataan sesuai omzet, penerapan pajak resto bagi para UMKM sesuai dengan aturan yang berlaku</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat (2) huruf a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)</p> <p>a. Edukasi publik melalui flyer, banner dan media social; b. Sosialisasi disetiap kegiatan Pemerintah Kota Malang</p>	<p>a. Pemerataan pendapatan dan pajak b. Pengendalian harga <i>property</i> c. Peningkatan pendapatan daerah d. Pengendalian persaingan sektor usaha kuliner</p>
40.	Melihat potensi pajak reklame yang demikian besar di Kota Malang sangat disayangkan ketika target pendapatan dari pajak reklame tidak memenuhi target, walaupun target tersebut sebenarnya adalah target yang sangat minimal. Untuk itu Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu melakukan peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak reklame;	Optimalisasi Pajak Reklame, Bapenda Kota Malang berkolaborasi dengan Satpol PP dan Disnaker, PMPTSP dalam hal penertiban dan pembinaan melalui media pemasangan stiker peringatan, dan apabila sudah di pasang sticker belum ada pembayaran pajak atas reklame yang sudah tampil akan di lepas dan di bongkar.	Dengan Kolaborasi antar PD yang bersifat membina dan menertibkan bertujuan mengantisipasi lost potensi atas kurang tertibnya penyelenggara reklame dalam memenuhi kewajiban pajak reklamennya.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
41.	Meningat masih rendahnya pencapaian sertifikasi aset dari 8.264 bidang tanah aset pemerintah dan masih tersertifikasi 1.706 bidang (20,64%), sehingga perlu dilakukan langkah-langkah terukur dan terencana agar semua aset Pemerintah Kota Malang bisa 100% tersertifikasi;	Total bidang tanah milik Pemerintah Kota Malang yang tercatat adalah 8.264 bidang tanah, sementara bidang tanah yang telah bersertipikat sebanyak 3.601 bidang tanah (43,57%), data per 23 Januari 2024. Selama tahun 2023 BKAD sudah berupaya melakukan permohonan sertifikasi tanah sebanyak 900 berkas permohonan namun hanya 67 sertipikat berhasil terbit yang terdiri dari 195 bidang tanah tersertifikasi.	Pengamanan hukum BMD berupa pensertipikatan tanah sehingga semua tanah telah 100% tersertifikasi
42.	Meningat Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah diterapkan, maka Pemerintah Kota Malang perlu membuat road map/peta jalan didalam pengelolaan dan optimalisasi aset daerah agar dapat memberikan pendapatan asli daerah untuk Pemerintah Kota Malang;	Telah adanya SOP terkait sewa dan ijin pemakaian sehingga pelaksanaan pengelolaan dan optimalisasi aset daerah dapat terlaksanan sesuai ketentuan yang berlaku	Terlaksananya pengelolaan dan optimalisasi daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
43.	Meningat aktivasi Gedung MCC sudah berjalan di tahun 2023 maka Pemerintah Kota Malang perlu	Pemerintah Kota Malang melalui MCC melakukan sinergi antar <i>stakeholder</i> , dengan cara melakukan koneksi,	Sesuai dengan konsep pengelolaan MCC bahwa akan ada area MCC yang digunakan sebagai

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>melakukan optimalisasi terkait kemanfaatan dari Gedung tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Malang perlu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder agar pengembangan ekonomi kreatif dapat terwujud;</p>	<p>kolaborasi <i>hexahelic</i> sebagai <i>stakeHolder</i> Ekonomi Kreatif yaitu : <i>Academic, Bussines, Community, Government, Media, Financial Institution.</i></p> <p>Kerja sama ini dijabarkan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Academic: Dengan melakukan peningkatan kapabilitas peserta didik dan melakukan pengembangan kajian-kajian tentang ekonomi kreatif. Pada tahun 2022 terbentuk AACE (Asosiasi Akademisi Ekonomi Kreatif atau <i>Academic Association of Creative Economy</i>). AACE yang beranggotakan beberapa akademisi lintas perguruan tinggi dan <i>concern</i> melakukan pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas penelitian, pelatihan, dan pengabdian pada masyarakat di MCC. Dengan peran agregator, AACE berfungsi untuk mengoleksi potensi dan sumber daya tri 	<p>pemberdayaan dan beberapa area lain yang digunakan sebagai area komersial. Sebagai dasar kerja sama pemanfaatan Gedung MCC telah dilaksanakan penilaian/ <i>appraisal</i> untuk memberikan suatu opini nilai atas Gedung MCC. Adapun konsep pemanfaatan Gedung MCC direncanakan akan dilaksanakan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam bentuk sewa untuk area komersial yang ditetapkan oleh Pengelola Barang Milik Daerah. Hasil Sewa Gedung MCC merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Hal ini dapat dicatat sebagai pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>Terwujudnya kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder agar pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang dapat terwujud</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>dharma perguruan tinggi di Kota Malang untuk dapat dioptimalkan dalam peningkatan inovasi dan daya saing industri kreatif melalui wadah MCC. Selain dengan AACE, kerja sama akademik juga dilakukan dengan sekolah-sekolah yang rutin melaksanakan kegiatan akademik, pembelajaran dalam menunjang mata kuliah, kunjungan-kunjungan serta peningkatan keterampilan serta pameran yang dilaksanakan di MCC;</p> <p>2. Kolaborasi dengan kelompok bisnis: Secara berkala kelompok bisnis melakukan <i>gathering</i> dan bertemu dgn UMKM untuk melakukan pemetaan potensi umkm dalam formulasi kerja sama termasuk menyediakan galeri untuk tempat UMKM bisa memasarkan produknya di showroom mereka;</p> <p>3. Kolaborasi dengan komunitas:</p>	<p>Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai <i>stakeholder</i> dari 17 sub sektor ekonomi kreatif.</p> <p>Dikarenakan banyaknya jumlah tenaga pendidik dan peserta didik maka diharapkan ada peningkatan sarana prasarana Gedung MCC khususnya untuk parkir dan lift.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>KOMunitas berperan dalam dukungan di setiap <i>event</i> kreatif di MCC, identitas jenama komunal dan membangun kesadaran digital transformation di MCC;</p> <p>4. Media berperan sebagai pendukung publisitas dan campaign tentang eksistensi ekonomi kreatif di MCC dan dipublikasikan baik skala Malang Raya secara nasional maupun internasional;</p> <p>5. Financial Institution sebagai pendukung akses permodalan, business hub serta coaching dan business matching dengan sasaran pelaku usaha ekonomi kreatif;</p> <p>6. MCC sebagai wadah kolaborasi para pelaku ekonomi kreatif telah menyelenggarakan 3.269 <i>event</i>, dengan melibatkan sebanyak 2.802 pelaku, 258.221 penerima manfaat dan 25 ribu lebih pengunjung. (Data per 10</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>Desember 2023)</p> <p>Disporapar dengan PD terkait akan mewujudkan MCC sebagai tempat ruang promosi bagi pelaku Ekraf untuk menampilkan produk produk yang dpt di kunjungi oleh wisatawan. MCC sebagai destinasi wisata edukasi Ekraf</p> <p>Pemerintah Kota Malang telah melakukan fasilitasi, kolaborasi dan sinergi bersama <i>stakeholders</i> dari 17 sub sektor ekonomi kreatif yang terakomodir melalui Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang dan Perangkat Daerah terkait serta peran serta perguruan tinggi, media masa dan pelaku bisnis yang menjadi activator aktivitas ekraf di gedung MCC.</p> <p>Pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memanfaatkan gedung MCC untuk beberapa kegiatan dengan melibatkan tenaga pendidik di Kota Malang. Ke depan akan</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		diagendakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa PAUD dan kegiatan-kegiatan pembinaan kelembagaan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun yang dilaksanakan oleh IGTKI, Himpaudi, MGMP, KKG, MKKS, K3S dan kelompok belajar (Kombel) lainnya.	
44.	Masyarakat sangat membutuhkan pelatihan dan/atau pendampingan yang berkesinambungan khususnya terhadap apa yang sudah diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada Masyarakat baik berupa bibit ikan, binatang ternak penghasil lainnya dan benih tanaman untuk urban farming agar keberlanjutan program tersebut dapat terjaga;	Dispangtan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan monitoring, pendampingan dan evaluasi baik berupa <i>workshop</i> , sarasehan atau pertemuan teknis bagi peserta dan penerima bantuan sarana prasarana <i>urban farming</i> , budidaya perikanan dan peternakan perkotaan.	Para penerima manfaat dapat berdiskusi dan mendapat solusi atas masalah terkait <i>urban farming</i> , budidaya perikanan dan peternakan perkotaan. Sehingga secara berkelanjutan budidaya yang dilakukan dapat terus bertahan dan berkembang.
45.	Diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang bisa melakukan kerja sama dengan perangkat daerah terkait lainnya didalam penanganan inflasi daerah	- Dispangtan melakukan pendampingan serta koordinasi dengan Dinsos, P3AP2KB, Kantor Pos dan Bulog pada program Badan Pangan Nasional untuk	Menekan angka inflasi dan menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di Kota Malang

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	<p>khususnya dalam rangka ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat;</p>	<p>menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) / Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan pemberian bantuan berupa beras, telur ayam dan daging ayam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispangtan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) program Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), Kelompok Tani (Poktan) dan UKM dari wilayah sektitar titik lokasi GPM. - Dispangtan memberikan surat rekomendasi kepada Perumda Tunas untuk melaksanakan distribusi beras SPHP di pasar-pasar tradisional maupun kelurahan-kelurahan di Kota Malang. - Melalui APBD TA. 2023 Dispangtan berkoordinasi dengan Dinsos, P3AP2KB dan Dinkes selaku pemilik data penerima bantuan, melaksanakan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat rentan terdampak inflasi (KRS dan KPM) 	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>sebanyak 3.220 paket bantuan berupa beras, sayur, buah, ikan, telur ayam, daging ayam dan susu.</p> <p>- Dalam usaha penanganan inflasi, Dispangtan menyalurkan bantuan bibit cabai sebanyak 5.000 paket (bibit, media tanam, pupuk NPK, ajir, pestisida organik, weting agen) kepada Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan Kelompok <i>Urban Farming</i>.</p>	
46.	<p>Perubahan dari Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan menjadi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha dengan menambah core business yang begitu luas. Diharapkan Perumda TUNAS mampu menjalankan kegiatan usaha yang tentunya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Namun kenyataannya sampai saat ini Perumda TUNAS masih tidak mampu menghasilkan apa-apa bahkan mengalami kerugian. Untuk itu Kuasa Pemilik Modal dalam hal ini</p>	<p>1. Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor: 500/4449/35.73.121/2023 tanggal 1 November 2023 perihal: laporan perkembangan tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kemendagri bahwa Perumda TUNAS untuk dilakukan restrukturisasi dalam jangka waktu 1 tahun dan fokusnya adalah RPH, Perdagangan untuk sembako dan daging ayam, sewa properti, <i>fattening</i> dan <i>breeding</i>, dan PJUTS.</p>	<p>Mengatasi kendala keterbatasan modal, SDM dan teknologi sekaligus meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam rangka mempertahankan <i>Going concern</i> atau <i>sustainability</i> perusahaan.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	Walikota agar dapatnya melakukan evaluasi dan pembinaan secara komprehensif atas Perumda TUNAS;	2. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perumda TUNAS.	
47.	Sampai dengan hari ini masih banyak keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan dari Perumda Tugu Tirta baik mengenai volume air yang sangat kecil, tidak mengalir, maupun keluhan-keluhan lainnya. Untuk itu diperlukan pembenahan secara masif atas pelayanan Perumda Tugu Tirta, khususnya segera menyelesaikan proses pengelolaan air permukaan;	Keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan Perumda Air Minum Tugu Tirta sudah ditindaklanjuti oleh manajemen secepat mungkin.	Pelayanan di pelanggan belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan air baku yang dimiliki dan Perumda Air Minum Tugu Tirta berupaya melakukan beberapa langkah yaitu program penambahan suplai melalui pengeboran dari 10 titik yang dicanangkan, 8 titik sudah terealisasi dan 2 lainnya masih dalam proses. Serta untuk kerja sama dengan PJT1 terkait pengelolaan air permukaan ,saat ini belum dapat diimplementasikan dikarenakan dalam proses pengurusan perijinan.
48.	Perjanjian kerja sama pengelolaan sumber air dengan Pemerintah Kabupaten Malang sudah terselesaikan dengan baik khususnya untuk sumber air yang berasal dari Wendit dan Sumber Pitu. Untuk itu	Sudah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pengusahaan sumber daya air dari mata air wendit dan sumber pitu di wilayah Kabupaten Malang untuk	Perjanjian Kerja Sama pengelolaan air dengan Pemerintah Kabupaten Malang sudah terselesaikan dengan baik. Pengelolaan sumber air dengan Pemerintah Kota Batu belum berakhir sampai dengan

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
	DPRD Kota Malang meminta agar Pemerintah Kota Malang sesegera mungkin untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama pengelolaan sumber air dengan Pemerintah Kota Batu;	usaha air minum di Kota Malang Nomor: 134.4/58/35.73.07.022/2022 dan Nomor: 415.4/68/35.73.111/2022 yang ditandatangani pada hari Jumat tgl 30 Desember 2022 di Surakarta.	tahun 2028.
49.	Keberadaan BPR Tugu Artha Sejahtera kalau dijalankan secara professional akan mempunyai nilai manfaat yang sangat besar terutama didalam memerangi bisnis keuangan dengan bunga tinggi terutama yang dijalankan oleh Lembaga swasta maupun perorangan yang sering kita kenal dengan nama Bank Titil. Namun kendala penyertaan modal dari Pemerintah Kota Malang yang minim merupakan salah satu hambatan bagi BPR Tugu Artha Sejahtera untuk berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut kami sarankan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal khususnya bagi BPR Tugu Artha Sejahtera agar segera dapat dilakukan perubahan;	BPR Tugu Artha Sejahtera telah berkordinasi dengan Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA terkait untuk merealisasikan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal	Penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Perda 12 Tahun 2019. Dengan tujuan : 1. Perubahan Modal Dasar, sehingga Pemegang saham khususnya Pemerintah Kota Malang dapat melakukan penyertaan modal untuk memperkuat modal BPR Tugu Artha Sejahtera; dan 2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, bila diperlukan sekaligus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan kegiatan usaha lainnya.

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
50.	BPR Tugu Artha masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar keberadaan BPR Tugu Artha dapat diakses masyarakat Kota Malang secara mudah dan diharapkan dapat menambah gerai-gerai layanan khususnya di pasar-pasar milik Pemerintah Kota Malang;	BPR Tugu Artha Sejahtera telah mengoperasionalkan jaringan kantor yaitu kantor Kas BPR Tugu Artha Sejahtera di Mall Pelayanan Publik Merdeka Malang. Selain itu sosialisasi pemberian brosur di pusat keramaian seperti <i>Car Free Day</i> (CFD) maupun grebeg pasar setiap minggu telah dilakukan untuk pasar-pasar yang belum dijangkau/belum optimal, maka upaya sosialisasi akan ditingkatkan.	Tujuan tindak lanjut tersebut sebagai upaya mengenalkan produk BPR Tugu Artha Sejahtera melalui lokasi kantor kas yang berada di pusat kota, maupun diversifikasi produk sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan sosialisasi lebih mudah diterima masyarakat.
51.	DPRD Kota Malang mengharapkan kepada Pemerintah Kota Malang agar optimalisasi manajemen pengelolaan <i>Malang Creative Center</i> (MCC) benar-benar dijalankan secara profesional sehingga apa yang menjadi pemikiran dasar dibangunnya Gedung MCC bisa terwujud.	Saat ini, pengelolaan MCC di bawah bidang perindustrian Diskopindag dilaksanakan oleh tenaga ahli profesional sebagai manager serta supervisor yang membawahi beberapa bidang pekerjaan dan dibantu staff yang sesuai dengan bidang keahlian, sehingga operasional MCC dapat berjalan secara profesional. Pemerintah Kota Malang melalui MCC juga melakukan sinergi antar <i>stakeholder</i> dengan melakukan koneksi, kolaborasi <i>hexahelic</i> sebagai	Sesuai dengan konsep pengelolaan MCC bahwa akan ada area MCC yang digunakan sebagai pemberdayaan dan beberapa area lain yang digunakan sebagai area komersial. Sebagai dasar kerja sama pemanfaatan Gedung MCC telah dilaksanakan penilaian/ <i>appraisal</i> untuk memberikan suatu opini nilai atas Gedung MCC. Adapun konsep pemanfaatan Gedung MCC direncanakan akan dilaksanakan kerja sama dengan pihak ke tiga

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p><i>stakeholder</i> Ekonomi Kreatif yaitu : <i>Academic, Bussines, Community, Government, Media, Financial Institution.</i></p> <p>Kerja sama ini dijabarkan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akademik : Dengan melakukan peningkatan kapabilitas peserta didik dan melakukan pengembangan kajian-kajian tentang ekonomi kreatif. Pada tahun 2022 terbentuk AACE (<i>Asosiasi Akademisi Ekonomi Kreatif atau Academic Assocation of Creative Economy</i>). AACE yang beranggotakan beberapa akademisi lintas perguruan tinggi dan <i>concern</i> melakukan pengelolaan dan pelaksanaan aktivitas penelitian, pelatihan, dan pengabdian pada masyarakat di MCC. Dengan peran agregator, AACE berfungsi untuk mengoleksi potensi dan sumber daya tri dharma 	<p>dalam bentuk sewa untuk area komersial yang ditetapkan oleh Pengelola Barang Milik Daerah. Hasil Sewa Gedung MCC merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Hal ini dapat dicatat sebagai pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah.</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p>perguruan tinggi di Kota Malang untuk dapat dioptimalkan dalam peningkatan inovasi dan daya saing industri kreatif melalui wadah MCC. Selain dengan AACE, kerjasama akademik juga dilakukan dengan sekolah-sekolah yang rutin melaksanakan kegiatan akademik, pembelajaran dalam menunjang mata kuliah, kunjungan-kunjungan serta peningkatan keterampilan serta pameran yang dilaksanakan di MCC;</p> <p>2. Kolaborasi dengan kelompok bisnis: Secara berkala kelompok bisnis melakukan gathering dan bertemu dgn UMKM untuk melakukan pemetaan potensi umkm dalam formulasi kerja sama termasuk menyediakan galeri untuk tempat UMKM bisa memasarkan produknya di <i>show room</i> mereka. Kegiatan semacam</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		<p><i>business matching</i> yang mempertemukan antara pelaku usaha dengan pembeli potensial juga telah beberapa kali digelar oleh kolaborator;</p> <p>3. Kolaborasi dengan community : Community berperan dalam dukungan di setiap <i>event</i> kreatif di MCC, identitas jenama komunal dan membangun kesadaran <i>digital transformation</i> di MCC;</p> <p>4. Media berperan sebagai pendukung publisitas dan <i>campaign</i> tentang eksistensi ekonomi kreatif di MCC dan dipublikasikan baik skala Malang Raya secara nasional maupun internasional;</p> <p>5. <i>Financial Institution</i> sebagai pendukung akses permodalan, <i>business hub</i> serta <i>coaching</i> dan <i>business matching</i> dengan sasaran pelaku usaha ekonomi kreatif;</p>	

NO.	REKOMENDASI DPRD N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISESUAIKAN
		MCC sebagai wadah kolaborasi para pelaku ekonomi kreatif telah menyelenggarakan 3.269 event, dengan melibatkan sebanyak 2.802 pelaku, 258.221 penerima manfaat dan 25 ribu lebih pengunjung. (Data per 10 Desember 2023)	

Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Kota Malang telah melakukan inovasi mencapai 118 inovasi daerah untuk memudahkan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pada Tahun 2023 terdapat 30 (tiga puluh) Inovasi pelayanan publik unggulan dan terdapat 2 inovasi yang mampu menembus TOP 45 penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Daftar Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

No.	Unit Layanan	Judul Inovasi	Keterangan
1	SMP Negeri 10	Jarik Ma'Siti (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa)	TOP 99 dan TOP 45 KIPP Sinovik 2023
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laskar Perencana	TOP 45 KIPP KOVABLIK 2023
3	SMP Negeri 21	YANI KOMEDI (Melayani Komunikasi Edukasi Digital)	
4	Perumda Air Minum Tugu Tirta	HIDRANTS (Hibah Air Minum Demi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tepat Sasaran)	
5	SD Negeri Kotalama 1	IBUKOTA (Inovasi Bulu Kotoran Ayam)	
6	SMP Negeri 1	PERMEN SUSI (Penghargaan Istimewa Untuk Siswa Unik Berprestasi)	
7	SMP Negeri 22	SEPAKAT_22	
8	SMP Negeri 5	JIMAT-5	
9	SMP Negeri 5	SI KAWAN DUDUK	
10	SMP Negeri 25	SI PEDULI	
11	SMP Negeri 10	ROBOKAR POLI	

No.	Unit Layanan	Judul Inovasi	Keterangan
12	SMP Negeri 10	MAS KADIN BERSINAR (Mencegah Anak Sekolah Menikah Dini Bersama Inovasi Anak Remaja)	
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Validasi Data Kesejahteraan Sosial	
14	Badan Pendapatan Daerah	Aplikasi Persada	
15	SMP Negeri 11	SAUNG BATU (Satu Ruang Banyak Tujuan)	
16	SMP Negeri 24	SIUSOM (Sistem Ujian Berbasis Smartphone Tanpa Internet Dengan Aplikasi Moodle)	
17	SMP Negeri 6	Formula 270 Menuju Spentaloka <i>Smart School</i>	
18	SD Negeri Merjosari 5	BURITA PESAN TERASI	
19	SMP Negeri 16	PAK PD (Penegak Kedisiplinan Peserta Didik)	
20	SMP Negeri 12	SI KAPAK SAKTI (Sistem Informasi Kegiatan dan Program Sekolah yang Sistematis, Aktual Dan Terintegrasi)	
21	SMP Negeri 17	BAKUL EKSIS (<i>Barcode Buku Literasi SeKolah Sajian Istimewa</i>)	
22	SMP Negeri 13	NASI TIGA BERAS (Layanan Siswa Istimewa Galas Berwirausaha)	
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SIAPEL (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Elektronik)	
24	SEKRETARIAT DAERAH Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	DIBALAP (Digitalisasi Laporan Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa)	
25	SMP Negeri 14	INDIGO (<i>Internal Dream Intervention To Grow Obsession</i>)	

No.	Unit Layanan	Judul Inovasi	Keterangan
26	Puskesmas Kedungkandang	PENINGKATAN PENEMUAN TERDUGA TUBERKULOSIS MELALUI KOPI TUBRUK (Konsultasi Dan Investigasi Online Tuberkulosis)	
27	SD Negeri Gadingkasri	DALANG TAPER	
28	SMP Negeri 20	JAMBOL (Peminjaman Buku Online)	
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	ISOMAN (Integrasi Sistem Informasi Ormas dan Pemberdayaannya)	
30	Puskesmas Arjuno	KLASTER	

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Malang, 2024

Sedangkan penghargaan yang telah diraih pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Penghargaan Tingkat Nasional

Pada tahun 2023, Kota Malang meraih 27 (dua puluh tujuh) penghargaan tingkat nasional, yaitu:

1. Sertifikat Bebas Frambusia dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) dari Menko PMK Republik Indonesia;
3. Penghargaan *Public Relation Indonesia Award 2023*;
4. Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023;
5. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 ke 12 kali berturut turut dari BPK RI;
6. Penghargaan Adipura;
7. Penghargaan TOP BUMD *Award 2023* oleh Lembaga Kajian Nawacita diberikan kepada Walikota Malang

- sebagai Top Pembina BUMD;
8. Penghargaan TOP BUMD *Award* 2023 Lembaga Kajian Nawacita kepada PERUMDA AIR MINUM TUGU TIRTA Kota Malang sebagai pemenang kategori Bintang 5;
 9. Penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan;
 10. Penghargaan Pencapaian dan Komitmen terhadap Penurunan Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2022 oleh BKKBN;
 11. Penghargaan Indonesia *Awards* dari iNews atas inisiatif *Malang Creative Center (Excellent Award for Strategic Initiative Malang Creatif Center)*;
 12. Apresiasi Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
 13. Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APDI) B-Universe 2023;
 14. Piala Penghargaan *Indonesia Visionary Leader (IVL) 2023* Kategori "*Best in Creative Economy*";
 15. Piagam Penghargaan Jarik Ma'siti sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023;
 16. Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 melalui Inovasi Jarik Ma'Siti terpilih sebagai Top 99;
 17. Penghargaan Walikota Malang atas Perannya dalam Pengawasan Penggunaan LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran oleh Kementerian ESDM RI;
 18. Trofi dan Piagam Penghargaan Swasti saba Wiwerda;
 19. Trofi dan Piagam Penghargaan Terbaik I sebagai Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 20. Trofi dan Piagam penghargaan Kategori Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari TVOne;
 21. Trofi dan Sertifikat penghargaan kepada Pj. Walikota Malang sebagai *Top Leader on Digital Implementation*

- 2023;
22. Trofi dan sertifikat Penghargaan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang sebagai *Top Digital Implementation 2023* Bintang 5;
 23. Trofi dan Sertifikat Penghargaan sebagai *Top CIO on Digital Implementation 2023* Bintang 5 diberikan kepada Kepala Diskominfo Kota Malang;
 24. Piagam Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan predikat "A";
 25. Penghargaan atas Partisipasi Aktif dan Kerjasamanya dalam Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI oleh Menteri Dalam Negeri RI;
 26. Piala Penghargaan Juara I Anugerah Media Humas Kategori Media Audio Visual Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 27. Piala Penghargaan Juara III KIM *Hackathon 2023* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 28. Piagam Penghargaan Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M atas dedikasi dan dukungan dalam pelaksanaan operasi katarak gratis bagi lanjut usia;
 29. Trofi dan Piagam Penghargaan *Positive News Maker 2023* kepada Pj. Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M yang memberikan dampak positif melalui Program Kemis Mbois;
 30. Trofi dan Piagam Penghargaan *Best Traffic Management System* atas kemampuan dalam mengatur lalu lintas kota;
 31. Piagam Penghargaan Pemerintah Daerah yang berkerja sama dengan Mitra Pembangunan Peduli

- Disabilitas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
32. Trofi dan Piagam Tanda mata kepada Walikota Malang (Koordinasi dan layanan Terbaik) atas partisipasi dan Kontribusi dalam program pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023 oleh Kementerian Agama RI;
 33. Trofi dan Piagam Penghargaan sebagai satuan Kerja Terbaik I kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023 dengan nilai 3,35 (Baik) oleh BPS;
 34. Piagam Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Kategori Capaian Literasi Tinggi pada Jenjang SD;
 35. Trofi dan Penghargaan Karya Bhakti Satuan Satpol PP Kota Malang atas kemampuannya dalam menyelenggarakan penegakan perda/perkada, penyelenggaraan keteriban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

B. Penghargaan Tingkat Provinsi:

Pada tahun 2023, Kota Malang meraih 23 (dua puluh tiga) penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Penghargaan Sijalinmajataru 2023 dari Gubernur Jawa Timur;
2. Penghargaan *E-Purchasing Award* dari Gubernur Jawa Timur;
3. Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik II Tingkat Jawa Timur;
4. Penghargaan Kabupaten/Kota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik di

- Jawa Timur Tahun 2023;
5. Penghargaan Pejabat Publik yang Peduli dengan Tugas POLRI dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur;
 6. Penghargaan sebagai Kepala Daerah yang berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GNPN) di Wilayah Jawa Timur;
 7. Penghargaan *Green Leadership* Provinsi Jawa Timur 2023;
 8. Penghargaan Adiwiyata Mandiri diterima oleh SDN Lowokwaru 2, SDN Purwodadi 1, dan SD Unggulan Al-Ya'lu.
 9. Piagam Penghargaan Pembina Olahraga dari Unsur Pemerintah pada Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XL Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 10. Piagam Penghargaan Kota Malang Sebagai Terbaik III Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023;
 11. Piala Penghargaan Terbaik I Jatim *Public Relation Award* (JPRA) 2023 untuk Kategori Website tingkat Diskominfo Kab/Kota;
 12. Piala Penghargaan Terbaik I Jatim *Public Relation Award* (JPRA) 2023 untuk Kategori Program Kampanye Komunikasi Publik Tingkat Diskominfo Kab/Kota;
 13. Piala Penghargaan Terbaik II Jatim *Public Relation Award* (JPRA) 2023 untuk Kategori Video Kreatif Tingkat Diskominfo Kab/Kota;
 14. Piala Penghargaan Terbaik II Jatim *Public Relation Award* (JPRA) 2023 untuk Kategori Media Sosial Tingkat Diskominfo Kab/Kota;
 15. Penghargaan terbaik 1 tingkat provinsi Jawa Timur

- kepada Kampoeng *Heritage* Kayutangan Kota Malang sebagai Dewi Cemara (desa wisata cerdas mandiri sejahtera);
16. Surya Award Kategori Penghargaan Daerah dengan Angka Kemiskinan Terendah;
 17. Piagam Penghargaan dengan predikat CETTAR dalam Penilaian Cettar pada aplikasi Sistem Terintegrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Cettar (SIBEKISAR) Tahun 2023;
 18. Piagam Penghargaan kepada Laskar Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Sebagai Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 19. Piagam penghargaan pemerintah Daerah dengan Kategori Capaian Literasi Tinggi pada Jenjang SD;
 20. Piagam Penghargaan Kota Malang Sebagai Terbaik ke-5 Kabupaten/Kota penyelenggara Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya Tahun 2023;
 21. Piala Penghargaan Anugerah Program Ekonomi Terpuji pada Kategori Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Detik Jatim;
 22. Piagam Penghargaan Top 10 dengan Kinerja Pertumbuhan Realisasi Investasi Terbaik Jawa Timur Tahun 2023;
 23. Trofi dan Piagam Penghargaan *Positive News Maker* 2023 pada ajang Anugerah Times Indonesia 2023;
 24. Tim Bola Basket Pemerintah Kota Malang Berhasil Meraih *Gold Medal* Pada ajang Kompetisi Basket antar ASN Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2023.
 25. Piala Penghargaan Anugerah Pewarta Warga (APW) 2023 Kategori Videografis;

C. Penghargaan Tingkat Regional Malang Raya

Penghargaan Tokoh Peduli Pers di Malang Raya diberikan kepada Pj. Walikota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M atas kontribusi mendukung peningkatan kapasitas organisasi dan wartawan serta mendorong semangat PERS di Kota Malang.

BAB IV

**CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN**

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pendanaan tugas pembantuan menjadi beban anggaran instansi pemberi tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat yang alokasinya berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga pusat;
2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan Kepada Daerah dan/atau desa;
3. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD;
4. Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

5. SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/lembaga yang menugaskan;
6. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah;
7. Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik;
8. Tidak memerlukan dana pendamping;
9. Penerimaan dan saldo kas disetorkan ke kas umum negara;

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

Program dan kegiatan yang sumber pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kementerian, atau biasa diistilahkan dengan "Penyelenggaraan Tugas Pembantuan" yang harus diselesaikan/dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada Tahun Anggaran 2023 ini sebanyak 1 (satu) program dengan kegiatan sebanyak 1 (satu), dengan total anggaran penyelenggaraan tugas pembantuan sebesar **Rp3.000.000.000,00** (tiga miliar rupiah);
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang pada Tahun Anggaran 2023 ini sebanyak 3 (tiga) program dengan kegiatan sebanyak 4

(empat), dengan total anggaran penyelenggaraan tugas pembantuan sebesar **Rp303.851.000,00** (tiga ratus juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

TABEL 4.1.1a
Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana APBN dan APBD (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA			SUMBER DANA	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		
Program Perdagangan dalam negeri						
1.	Pengembangan Sarana Perdagangan dan kapasitas Logistik	3.000.000.000,00	2.401.037.667,00	80,03%	TP	
Jumlah		3.000.000.000,00	2.401.037.667,00	80,03%		

NO.	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	APBN	54.858.305.000,00	54.637.002.954,91	99,6%
T O T A L		54.858.305.000,00	54.637.002.954,91	99,6%

Tingkat serapan anggaran dana Tugas Pembantuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mencapai sebesar **Rp2.401.037.667,00** (dua miliar empat ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yaitu sebesar **80,03%** dari dana yang dialokasikan, artinya bahwa ada sebesar **Rp558.962.333,00** (lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus

tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar **0,40%** yang tidak mampu diserap dari anggaran kegiatan Tugas Pembantuan.

TABEL 4.1.1b
Pelaksanaan Program/Kegiatan Sumber Dana APBN dan APBD Provinsi (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA			SUMBER DANA	KET.
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kota Malang					
1.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	10.000.000	10.000.000	100,00%	TP	
2.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Malang)	22.234.000	22.034.000	99,10%	TP	
3.	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	9.534.000	9.534.000	100,00%	TP	
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	14.500.000	14.500.000	100,00%	TP	
Jumlah		56.268.000	56.068.000	99,64%		
	Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Tahun 2023					
		99.840.000	99.520.000	99,68%	Dekon	
Jumlah		99.840.000	99.520.000	99,68%		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
		147.743.000	34.750.000	23,52%	Dekon	
Jumlah		147.743.000	34.750.000	23,52%		

NO.	SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	APBN	303.851.000	190.338.000	62,64%
T O T A L		303.851.000	190.338.000	

Tingkat serapan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang mencapai sebesar **Rp190.338.000,00** (seratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yaitu sebesar **62,64%** dari dana yang dialokasikan, artinya bahwa ada sebesar **Rp303.851.000,00** (tiga ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar **0,40%** yang tidak mampu diserap dari anggaran kegiatan Tugas Pembantuan.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

Pelaksanaan tugas pembantuan dijalankan oleh perangkat daerah yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana disampaikan pada poin 4.1.1 (tidak perbantukan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya).

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian

Hambatan/permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dan penyelesaian selama tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.1
Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya

No.	Dinas Pelaksana	Hambatan/Permasalahan	Upaya Penyelesaian
1.	Diskopindag	Realisasi anggaran secara riil yang seringkali mendekati akhir tahun anggaran.	Efisiensi anggaran dengan mengorientasikan pada skala prioritas kegiatan berdasar waktu pelaksanaan.
		Mendadaknya jadwal kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Pusat	Optimalisasi personalia dan sarana prasarana guna meniyasati/menjawab keterbatasan waktu sebagai akibat jadwal yang mendadak dan sempit.
		Koordinasi internal dan antar instansi yang kurang kuat.	Mengintensifkan dan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi hingga terwujud efektifitas pelaksanaan tugas.
2.	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	Keterlambatan waktu pelaksanaan, hal ini dikarenakan DIPA turun pada pertengahan tahun, sehingga tidak dapat melaksanakan	penambahan personil atau SDM pelaksana kegiatan.

No.	Dinas Pelaksana	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Penyelesaian
		<p>kegiatan secara maksimal;</p> <p>Keterbatasan SDM teknis, dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun, mengakibatkan kapasitas untuk melakukan kegiatan APBD dan Tugas Pembantuan menjadi berkurang</p>	

BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2023 berjalan cukup maksimal, merupakan hasil sinergi dari pendekatan *hexahelix* dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Meskipun Pandemi COVID-19 sudah mulai menurun namun permasalahan ikutan terutama yang berkenaan dengan penguatan dan perbaikan ekonomi daerah harus dihadapi secara bersama-sama.

Seluruh keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan tersebut diraih atas kerja sama semua komponen pemerintahan daerah. Karena itu Pemerintah Kota Malang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Malang yang mendukung kondisi kota tetap terjaga kondusif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kota Malang membuka diri atas masukan, saran dan kritik guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik, lebih berdaya guna, dan lebih berhasil guna sampai pada titik terwujudnya "**Kota Malang Bermartabat**".

LAMPIRAN 3.1.1.

**PELAKSANAAN URUSAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR**

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40140 ASN	40140 ASN	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	89 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37 Dokumen	35 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Unit	15 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	109 ASN	109 ASN	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	12 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	11 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	12 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28 Jenis	28 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2160 Eksemplar	2160 Eksemplar	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kail	100 Kail	kondisional	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40000 Surat	22180 Surat	kondisional	penyesuaian target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Jenis	8 Jenis	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	2 Gedung	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	89 %			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82.88 %	99.82 %			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	92.5 %			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	3 Unit	3 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	8 Unit	menyesuaikan ketersediaan anggaran	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	1 Unit	2 Unit	menyesuaikan ketersediaan anggaran	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	26080 anak sekolah	26080 anak sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	684 lembaga	684 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	400 Orang	400 Orang	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	684 lembaga	684 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	617 lembaga	617 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	26080 Siswa	26080 Siswa			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	89.95 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15 lembaga	15 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	50 anak sekolah	50 anak sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	68 lembaga	68 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	42 lembaga	42 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15 lembaga	15 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	310 anak sekolah	310 anak sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	87 anak sekolah	174 anak sekolah	konsional menyesuaikan populasi peserta didik	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.41 %	100.22 %			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	99.5 %			
				Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	6 Gedung	7 Gedung	menyesuaikan ketersediaan anggaran	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	20 Sekolah	20 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	46 Sekolah	46 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 paket	2 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	318 Sekolah	318 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	3996 Siswa	3996 Siswa	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	152 Sekolah	152 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8 Paket	12 Paket	menyesuaikan ketersediaan anggaran	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	500 Siswa	500 Siswa	-	-	
				Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	420 Orang	480 Orang	kondisional	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200 Sekolah	200 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	598548 anak sekolah	448911 anak sekolah	kondisional menyesuaikan populasi peserta didik	melakukan pendataan ulang dan verifikasi	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2340 lembaga	195 lembaga	ketidaksesuaian sub kegiatan dengan indikator	penyesuaian indikator sesuai peraturan yang berlaku	
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Unit	2 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Unit	3 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	195 Sekolah	195 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	195 Orang	195 Orang			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Unit	3 Unit			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	106.35 %	92.07 %			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	98.54 %			
				Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	6 Ruang Kelas	5 Ruang Kelas	menyesuaikan hasil verifikasi DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	memperkuat verifikasi internal	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3 Jenis	3 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	354 Siswa	354 Siswa	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	16090 Siswa	16090 Siswa	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	107 Sekolah	107 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	30 Dokumen	107 Dokumen	kondisional	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400 Orang	400 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	45 Sekolah	45 Sekolah	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27 lembaga	27 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	21743 Siswa	21743 Siswa	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30 Sekolah	30 Sekolah	-	-	
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	91.75 %	59.86 %			
				Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 Unit	14 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35 Unit	45 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17 Unit	17 Unit			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	0 Unit	Alat tersebut (safety shower) tidak bisa digunakan apabila kelengkapan yang lain tidak ada (seperti NAAT TCM, Micro Pipet dan Autoclave) sehingga tidak dilakukan pengadaan barang tersebut	Melakukan renovasi labkesda sesuai standar BSL 2 sehingga alat kelengkapan tersebut (seperti NAAT TCM, Micro Pipet dan Autoclave) dapat disediakan dan termasuk juga safety shower	
				Sub Kegiatan Pengadaan Obat Vaksin	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Pengadaan Obat Vaksin	78 paket	78 paket			
				Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	6 paket	5 paket	Terdapat BMHP yang tidak dapat disediakan dalam rentang waktu yang ditentukan	Melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada periode penganggaran berikutnya	
				Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 paket	1 paket			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250 Item	554 Item			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	172 Unit	149 Unit	Terdapat selisih antara alat yang memerlukan kalibrasi dengan proyeksi awal	Melakukan pendataan lebih baik untuk penyesuaian dan akurasi kebutuhan pemeliharaan rutin alat kesehatan berikutnya	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Unit	7 Unit			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	84.15 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46163 Orang	38851 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat 3. Balita tidak kontak ke Puskesmas tetapi ke RS maupun dokter Praktik SpA	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(dinoyo)	2090 Orang	2090 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Mojolangu)	3792 Orang	2981 Orang	Kunjungan balita ke Posyandu belum optimal	Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan kunjungan posyandu. Melaksanakan kelas ibu balita, Melakukan kunjungan rumah pasca posyandu	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(arjuno)	968 Orang	1346 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(kedungkandang)	4164 Orang	3182 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholdeer terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(mulyorejo)	3654 Orang	3683 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(ciptomulyo)	3282 Orang	3112 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholdeer terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Kendalkerep)	3607 Orang	3558 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholdeer terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Kelas ibu balita, pendataan, validasi data dan pendampingan oleh kader	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(polowijen)	2168 Orang	1757 Orang	tidak semua balita tercatat di Puskesmas maupun di posyandu, mobilitas balita (data kependudukan tidak sesuai) cukup tinggi	menguatkan kembali koordinasi dengan Lintas Program (gizi), jejaring, kader, dawis PKK, dan kelurahan, melaksanakan validasi data secara berkala dengan jejaring, Melaksanakan kelas ibu balita	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita(polowijen)	2168 Orang	1757 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholdeer terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. menguatkan kembali koordinasi dengan Lintas Program (gizi), jejaring, kader, davis PKK, dan keturahan, melaksanakan validasi data secara berkala dengan jejaring, Melaksanakan kelas ibu balita	
				Sub KegiatanPengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Cisadea)	1687 Orang	2127 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(janti)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(dinoyo)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(mojolangu)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(kendalsari)	8 Dokumen	8 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(arjuno)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(rampalcelaket)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(kedungkandang)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(gribig)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(arjowinangun)	14 Dokumen	13 Dokumen	Dokumen pengelolaan gizi masyarakat pada bulan Agustus seharusnya 2 dokumen terisi 1 dokumen yang mana laporan pemberian vitamin A seharusnya terpisah tapi dijadikan satu dokumen	Akan meningkatkan ketelitian dalam mengisi capaian kinerja pada tahun yang akan datang	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(mulyorejo)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(ciptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(pandanwangi)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(polowijen)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(cisadea)	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Janti)	4530 Orang	4919 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Barend)	2420 Orang	2062 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat 3. Rendahnya kunjungan Balita ke Posyandu, Mobilitas Penduduk yang sangat tinggi, kurang efektif media promosi tentang posyandu	1. Peningkatan Kerja sama lintas sektor, Memperbaiki Media Promosi 2. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 3. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	99.47 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11332 Orang	11273 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Melakukan penelusuran bayi dengan berkoordinasi dengan kader, rt, rw. 4. Melakukan kroscek data bayi baru lahir dengan laporan skrining hipotiroid kongenital di Kota Malang. Jika ada bayi yang belum terdata maka segera dilakukan pelacakan."	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Arjowinangun)	746 Orang	602 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Croschec data capaian kepd Pj pelayanan bayi baru lahir sebelum menginput pada monev kinerja/evaluasi RKPD triwulanan	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	95.39 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11899 Orang	11351 Orang	Ibu hamil yang ditemukan tidak sebesar target sasaran sehingga ibu bersalin yang ditemukan juga tidak ditemukan sebesar sasaran. 2. Ibu hamil bersalin di luar Kota dan baru kembali setelah bayi berusia > 4 bulan.	Menambahkan no hp pasien pada pelaporan bulanan sehingga keberadaan pasien dapat di ikuti. 2. memaksimalkan grup WA bumil di wilayah sehingga jika ada ibu hamil yang hamil di luar kota dapat terlacak	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(kedungkandang)	925 Orang	887 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin(polowijen)	560 Orang	502 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan LP dan Dawis PKK dan Kader TPK dalam hal pendataan IH di wilayah, melakukan kunjungan rumah	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	93.7 %			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12465 Orang	11680 Orang	1. Ibu hamil yang ditemukan tidak sebanyak target sasaran. Ibu hamil yang melakukan pelayanan ANC di PMB, Klinik dan RS sudah ditelusur oleh Puskesmas. 2. Masih ada RS yang tidak disiplin dalam melakukan pelaporan bulanan KIA sehingga ibu hamil yang tidak kontak dengan Puskesmas tidak terdata dengan tepat waktu. 3. Pelayanan ANC di Praktik Dokter SPOG belum dilaporkan baik ke Puskesmas maupun Dinas Kesehatan	1. Melakukan pendataan ibu hamil di wilayah kerja sama dengan kader. 2. Koordinasi dengan Bidang Yankes terkait pelaporan RS ke Dinas Kesehatan. 3. Koordinasi dengan POGI terkait form laporan KIA yang nantinya wajib diisi dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Janti)	1087 Orang	1185 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinoyo)	854 Orang	845 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. memfasilitasi terbentuknya posyandu dilingkungan yang belum ada posyandu untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendorong peran lintas sektor terkait 2. penguatan jejaring baik FKTL, Tempat praktek Mandiri Dokter (TPMD), FKTP, Bidan Praktek Mandiri (BPM).	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Mojolangu)	837 Orang	830 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Meningkatkan kunjungan rumah serta pendampingan oleh petugas dan kader terutama wilayah perumahan. Meningkatkan kerjasama dengan PKK, dan jaringan Puskesmas. Melaksanakan ANC Mobile secara periodik	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kendalsari)	838 Orang	1485 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Arjuno)	378 Orang	470 Orang			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (RampalCelaket)	339 Orang	277 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bareng)	690 Orang	474 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Kunjungan Rumah Ibu Hamil, Pendataan ulang dan Kerja sama dengan lintas sektor	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kedungkandang)	969 Orang	916 Orang	ada bumil yang domisilinya berpindah tempat sehingga mempengaruhi pencatatan.	Memperbaiki pencatatan KIA di wilayah dan Puskesmas Kedungkandang	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Gribig)	1276 Orang	1202 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Meningkatkan kunjungan dan pembinaan kepada Bidan Praktek Madiri serta melakukan rekonsiliasi data 4. Membuka jam operasional Puskesmas Pembantu setiap hari diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ibu hamil (K1)"	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Arjowinangun)	820 Orang	841 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Mulyorejo)	1018 Orang	1084 Orang			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (CiptoMulyo)	772 Orang	689 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kendalkelep)	1000 Orang	987 Orang	Pencatatan dan pelaporan dari kader, dan rumah sakit yang kurang optimal	Kegiatan validasi data KIA, kegiatan kelas ibu hamil terintegrasi ANC Mobile, dan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor melalui P4K	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Pandanwangi)	555 Orang	690 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Polowijen)	607 Orang	570 Orang	mobilitas ibu hamil cukup tinggi (data kependudukan IH tidak sesuai)	validasi data secara berkala dengan LP dan LS, melaksanakan kelas ibu hamil di wilayah	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Cisadea)	477 Orang	458 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) mojolangu	5 Dokumen	0 Dokumen	Tidak ada kasus KLB, namun tetap melakukan laporan rutin bulanan	Tetap melakukan pelaporan KLB walaupun zero report dan tetap melaksanakan surveilans dan respon cepat bila terjadi KLB	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) arjuno	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)kedungkandang	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)arjowinangun	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)polowijen	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)cisadea	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(dinoyo)	13 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen operasional pelayanan bulanan sudah selesai di susun dan 1 dokumen tahunan dalam proses penyusunan	menyelesaikan penyusunan dokumen tahunan tidak melebihi batas waktu maksimal	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(mojolangu)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kendalsari)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(arjuno)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(rampalcelaket)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(bareng)	13 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen operasional pelayanan bulanan sudah selesai di susun dan 1 dokumen tahunan dalam proses penyusunan	menyelesaikan penyusunan dokumen tahunan tidak melebihi batas waktu maksimal	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kedungkandang)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(mulyorejo)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(ciptomulyo)	13 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen operasional pelayanan bulanan sudah selesai di susun dan 1 dokumen tahunan dalam proses penyusunan	menyelesaikan penyusunan dokumen tahunan tidak melebihi batas waktu maksimal	
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah(arjuno)	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Mojolangu)	801 Orang	625 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholdeer terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Kendalsari)	837 Orang	780 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Arjuno)	378 Orang	442 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Arjowinangun)	784 Orang	806 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Mulyorejo)	922 Orang	935 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Kedalkerep)	938 Orang	1034 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Mulyorejo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Mojolangu)	7151 Orang	5646 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat 3. banyak lansia yang tidak hadir ketika ada pemeriksaan khususnya di perumahan, kader lansia kurang aktif dalam entry data lansia yang sudah diperiksa	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan karang wrede atau lintas sektor terkait untuk melakukan kegiatan skrining di wilayah masing-masing. Serta meningkatkan monitoring entry data oleh petugas kepada kader lansia secara berkelanjutan	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	97.75 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)	150 Orang	154 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Arjowinangun)	20 Orang	53 Orang			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	87 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21986 Orang	19127 Orang	- tidak semua ibu hamil datang ke Layanan pemeriksaan HIV (Tripel Eliminasi) - Masih ada stigma dan diskriminasi pada populasi kunci sehingga masih enggan datang ke layanan bila tidak ada pendampingan dari Petugas Lapangan atau Komunitas	- Memperluas layanan dan jejaring dengan faskes yang ada di wilayah kerja untuk meningkatkan capaian - Bekerja sama dengan LSM dan Komunitas untuk meningkatkan penjangkauan dan rujukan	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	132 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16108 Orang	21262 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(ciptomulyo)	70 Orang	766 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(cisadea)	610 Orang	498 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Mojolangu)	4 Orang	956 Orang			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	59.35 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	115010 Orang	68258 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Melakukan pelatihan kader oleh masing-masing puskesmas untuk memaksimalkan penguasaan SIMLANSIA 4. Peningkatan pemanfaatan posyandu bagi lansia""	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Rampal Celaket)	2889 Orang	3152 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas bareng)	5803 Orang	3311 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas gribig)	10885 Orang	8182 Orang	Belum semua posyandu terdapat kunjungan rumah dan sosialisasi kepada lansia untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin	Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan jejaring, membuka posyandu lansia untuk semua posyandu seiring dengan dicanangkannya posyandu CoE, meningkatkan intensitas kunjungan rumah lansia dan juga memperbanyak sosialisasi mengenai pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi lansia dengan berbagai media	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Janti)	7095 Orang	10586 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Arjuno)	2500 Orang	3158 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Ciptomulyo)	5699 Orang	5451 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat 3. Melakukan kunjungan rumah yang lebih insentif kepada lansia	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. KIE kepada warga sekitar lansia	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Kedalkerep)	8629 Orang	4673 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Pandanwangi)	4948 Orang	4832 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat 3. tidak semua lansia mau datang ke Posyandu lansia, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan lansia sesuai standar	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. bekerja sama dengan kader dan RT/RW untuk kunjungan rumah bagi lansia yang mempunyai keterbatasan mengakses Posyandu Lansia/layanan Puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Mojolangu)	36 Orang	131 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Arjuno)	58 Orang	70 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Rampil Celaket)	28 Orang	37 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Ciptomulyo)	66 Orang	267 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kedalkerep)	127 Orang	124 Orang		Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, meningkat skrining kesehatan jiwa di masyarakat dan sekolah	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Polowijen)	63 Orang	143 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Janti)	1167 Orang	1780 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Arjuno)	614 Orang	777 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kedungkandang)	1388 Orang	1711 Orang			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Mulyorejo)	1185 Orang	807 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat 3. data terduga dari RS belum di masukkan	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholdeer terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Lebih teliti lagi dalam pengisian capaian realisasi	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kedalkerep)	1169 Orang	1418 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Janti)	800 Orang	1069 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ciptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	90.29 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98176 Orang	88639 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholdeer terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Meningkatkan koordinasi dengan sekolah terkait jadwal kegiatan puskesmas dan kegiatan sekolah	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Mojolangu)	6291 Orang	19125 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (rampalcelaket)	2533 Orang	5976 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (bareng)	7500 Orang	8924 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (kedungkandang)	7186 Orang	8157 Orang			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Arjowinangun)	6536 Orang	5938 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(mulyorejo)	9135 Orang	9135 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(ciptomulyo)	7670 Orang	10414 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Pandanwangi)	6222 Orang	5140 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(cisadea)	5303 Orang	5161 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Janti)	8548 Orang	16734 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Kedalkerep)	7236 Orang	13718 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Polowijen)	2737 Orang	2751 Orang			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	87.16 %			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	606212 Orang	528404 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat 3. Pelaporan pelayanan skrining dari kader Posbindu PTM dan jejaring puskesmas seperti klinik belum berjalan optimal dan Tim bina wilayah belum berjalan optimal untuk melakukan skrining di luar jadwal posbindu "	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Kerjasama lintas program dan sektor dengan Posbindu yang ada di organisasi lain seperti Posbindu Muslimat NU, Aisyiah dll karena sudah semua ada di masing-masing kelurahan, dan Lembaga/organisasi masyarakat lainnya serta posbindu di perguruan tinggi (sesuai wilayah Puskesmas) - Kerjasama dengan tim bina wilayah untuk melakukan skrining dan entry data online dengan aplikasi ASIK dan offline - Melaksanakan Program Jebol Perintis PTM (Jemput Bola Periksa Gratis Penyakit Tidak Menular) di semua wilayah puskesmas kota malang	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(cisadea)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(mojolangu)	21 Dokumen	21 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(kendalsari)	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(arjuno)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(arjuno)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Rampil Celaket)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(gribig)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Arjowinangun)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Ciptomulyo)	24 Dokumen	24 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Pandanwangi)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(janti)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(dinoyo)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(mojolangu)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(kendalsari)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Arjuno)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(rampalcelaket)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kedungkandang)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(gribig)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(arjowinangun)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(mulyorejo)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(cisadea)	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(polowijen)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kendalkerep)	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(janti)	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendalsari)	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(arjuno)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(rampalcelaket)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kedungkandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(gribig)	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(arjowinangun)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(mulyorejo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(ctptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(kendalkerep)	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(pandanwangi)	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(polowijen)	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(cisadea)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan(mojolangu)	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan(kedungkandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan(arjowinangun)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub KegiatanPengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ciptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub KegiatanPengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ciptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1688 Orang	1650 Orang	Masyarakat terutama Keluarga Pasien masih banyak yang kurang memahami edukasi tentang sistem rujukan dan pemantauan minum obat pasien sehingga sering kambuh dan tidak stabil	Kerjasama dengan lintas sektor seperti Satpol PP, Babinsa, babinkamtibmas, dinas sosial, dan dispendukcapil untuk mengatasi ODGJ yang bermasalah dan membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan ke Rumah Sakit	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	16 Orang	16 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128 Dokumen	91 Dokumen	Sistem penjumlahan pada laporan yang terinput belum sesuai dengan rincian laporan per TW	- Pengecekan kembali pada laporan ketika submit laporan	
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(janti)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(dinoyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mojolangu)	64 Dokumen	64 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kendalsari)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(arjuno)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(rampalcelaket)	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(bareng)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kedungkandang)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(gribig)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(arjowinangun)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(mulyorejo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(ciptomulyo)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(kendalkerep)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(pandanwangi)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(polowijen)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(cisadea)	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	17 Dokumen	17 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(janti)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(gribig)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(arjowinangun)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(kendalkerep)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(pandanwangi)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(polowijen)	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas(cisadea)	13 Dokumen	13 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0 Unit	16 Unit			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Janti)	55353 Orang	55711 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mojolangu)	16120 Orang	40860 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Arjuno)	16000 Orang	23597 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kedungkandang)	47169 Orang	36189 Orang	kurangnya kegiatan skrining kesehatan di masyarakat, pandu PTM belum berjalan maksimal	meningkatkan kegiatan skrining kesehatan integrasi lintas program dan lintas sektor, mengaktifkan pandu PTM, koordinasi dengan promkes terkait meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melakukan skrining kesehatan pada usia produktif	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mulyorejo)	47880 Orang	34769 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Cisadea)	25543 Orang	10639 Orang	1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023 2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat	1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholder terkait 2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dg lintas program dan lintas sektor	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20771 Orang	20771 Orang			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	74.4 %			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	230070 Orang	171260 Orang	<p>1. Terdapat diferensiasi antara proyeksi kelompok sasaran yang digunakan pada saat perencanaan dengan data riil pada saat pendataan sepanjang tahun 2023</p> <p>2. Terdapat kelompok sasaran yang mengakses layanan pada faskes diluar puskesmas yang datanya tidak dilaporkan ke puskesmas wilayah setempat</p> <p>3. Banyak pasien yang berobat di klinik/dokter praktek mandiri sehingga tidak semua penderita hipertensi berobat ke Puskesmas sehingga pelaporan jejaring puskesmas belum berjalan optimal</p> <p>4. Kurangnya pemahaman pada pasien Hipertensi sehingga tidak rutin kontrol atau minum obat karena merasa tidak adanya gejala/keluhan sakit"</p>	<p>1. Melakukan koordinasi tentang peningkatan akurasi data proyeksi untuk perencanaan bersama stakeholdeer terkait</p> <p>2. Meningkatkan komunikasi dalam pelaporan antara jejaring faskes dan puskesmas</p> <p>3. Menjangkau Semua Pelayanan penderita hipertensi dilakukan di FKTP lainnya seperti Klinik dan Praktik Dokter Mandiri secara aktif untuk melaporkan Penderita Hipertensi yang sudah berobat</p> <p>4. Melakukan kunjungan rumah ke rumah pada penderita hipertensi agar terkendali - memaksimalkan prolans di puskesmas dan faskes tignkat pertama lainnya"</p>	
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	97.75 %			
				Sub KegiatanPengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Gribig)	139 Orang	153 Orang			
				Sub KegiatanPengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Pandanwangi)	60 Orang	122 Orang			
				Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	42 Unit	42 Unit			
				Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(dinas)	16 Unit	16 Unit			
				Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(RSUD)	3 Unit	3 Unit			
				Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	66 Unit	66 Unit			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	1 Unit	1 Unit			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR-PKP	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	28 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38 laporan	40 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 laporan	43 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	106 OB	113 OB	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	96,3 %			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62 Unit	62 Unit	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20 %	20 %			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82,21	81,64			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90 Orang	100 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	2 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	4 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120 paket	157 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100 %	98,62 %			
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ha	11.1 Ha			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4 Km	4.05 Km	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Perlu dilakukan inventarisasi DI kota malang, untuk update berapa luasan sawah saat ini	Melakukan inventarisasi DI beserta bangunan yang ada didalamnya dengan menggunakan aplikasi epaksi	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Aset dibawah irigasi belum dilakukan inventarisasi	Melakukan inventarisasi aset terkait dibawah irigasi	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	71,45 %	53,8 %			
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	630 m3	630 m3			
				Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	75 Unit	44 Unit	Adanya genangan akibat hujan yang tidak surut dalam waktu yang lama, tidak adanya saluran keluar di lokasi genangan	Dibangunnya sumur resapan pada lokasi genangan	
				Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Kegiatan/Usaha	1 Kegiatan/Usaha	Diskusi pemenuhan ketersediaan debit yang mendukung prioritas nasional di fasilitasi oleh IUWASH TANGGUH	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	94,16 %	96,55 %			
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1466 SR	1466 SR			
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1 Unit	3 Unit	Kebutuhan Sarana dan prasarana air bersih di lingkungan permukiman Kota Malang	Memelihara sarana dan prasarana air bersih yang telah terbangun	
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Diskusi pemenuhan Sarana dan prasarana air bersih yang mendukung prioritas nasional di fasilitasi oleh IUWASH TANGGUH	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3,5 Liter/Detik	4 Liter/Detik	Kebutuhan Sarana dan prasarana air bersih di lingkungan permukiman Kota Malang	Evaluasi dan Monitoring setiap progress kegiatan	
				Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	142 Penyelenggara SPAM	142 Penyelenggara SPAM	Kebutuhan peningkatan kapasitas dari pengurus HIPPAM Kota Malang	Memberikan pembinaan rutin kepada pengurus HPPAM	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	85,47 %	85,92 %			
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1466 SR	1466 SR			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	400 Rumah tangga	400 Rumah tangga	Kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang telah terbangun	Pengurusan, perbaikan bak kontrol dan perbaikan jaringan, penambahan fasilitas pendukung seperti kolam, atap	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	750 Rumah tangga	314 Rumah tangga	Kebutuhan Sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik di lingkungan permukiman Kota Malang	Diperlukan pembangunan tangki septik pada lingkungan permukiman	
				Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	57 kelompok	57 kelompok	Memberikan pemahaman tentang air limbah domestik, pengolahan serta teknologinya kepada calon penerima manfaat kegiatan pengelolaan air limbah domestik	Diperlukan sosialisasi	
				Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	120 Orang	100 Orang	Terdapat peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan monitoring dan peningkatan kinerja pengolahan air limbah domestik	Diadakannya kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga pengelola ALD	
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	220 Rumah tangga	220 Rumah tangga	-	-	
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Unit	2 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150 Rumah tangga	140 Rumah tangga	Masyarakat yang mengajukan penyedotan lumpur tinja melalui DPUPRPKP mengeluhkan tingginya nilai retribusi penyedotan kakus	mengkampanyekan tangki septik aman	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	50 M ³ /Hari	50 M ³ /Hari	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	84,52 %	87,18 %			
				Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	22 Km	21,63976717 Km			
				Sub Kegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	53 Dokumen	53 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3536 Meter	4303,18 Meter	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	3000 Meter	10419,41 Meter	-	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	4020 Meter	6917,177167 Meter	-	-	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	80 %	99,45 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	89 Lokasi	120 Lokasi			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sistem Jaringan	2 Sistem Jaringan	-	-	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	75 %	96,16 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	89 Lokasi	120 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sistem Jaringan	2 Sistem Jaringan	-	-	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14 Gedung	14 Gedung			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	24 Unit	24 Unit	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	160 Dokumen	284 Dokumen	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen	Target 4 dokumen berupa perencanaan DED gedung tidak dilaksanakan karena usulan kegiatan fisiknya di TA 2024 dihapus (agar tidak KDP)	Mengusulkan kegiatan perencanaan (T-1) apabila dipastikan ada pekerjaan konstruksi yang dianggarkan (tender) di tahun depannya	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100 %	99,15 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14 Gedung	14 Gedung			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit	masih terdapat 3 bangunan gedung yang perlu dilakukan perbaikan	mengalokasikan pada tahun anggaran berikutnya	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	24 Unit	24 Unit	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	160 Dokumen	284 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen	Target 4 dokumen berupa perencanaan DED gedung tidak dilaksanakan karena usulan kegiatan fisiknya di TA 2024 dihapus (agar tidak KDP)	Mengusulkan kegiatan perencanaan (T-1) apabila dipastikan ada pekerjaan konstruksi yang dianggarkan (tender) di tahun depannya	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	9 %	2,77 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100 m2	100 m2			
				Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 kawasan	3 kawasan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	96,91 %	98,85 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	80 Km	89,41929 Km			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	10 Km	48,516 Km	-	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	35 Km	77,86529 Km	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	6 Km	16,28 Km	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	35 Kali	59 Kali	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	24 Kali	18 Kali	kurangnya penyewa	meningkatkan layanan dan promosi jasa layanan	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	14 Unit	14 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	2,5 Km	2,588 Km	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	94,74 %	34,86 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	80 Km	80 Km			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	10 Km	48,516 Km	-	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	35 Km	77,86529 Km	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	2,5 Km	2,588 Km	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95,24 %	96,83 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	28 Lokasi	206 Lokasi			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	55 Meter	23,5 Meter	Pihak Ketiga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan progres pekerjaan yang cukup minim	memberikan kesempatan akan tetapi pihak ketiga tetap tidak dapat menyelesaikan, sehingga dilakukan putus kontrak pekerjaan dan akan dilaksanakan penganggaran ulang di tahun mendatang	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	25 Meter	62,6 Meter	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	70 Meter	120 Meter	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	70,41 %	67,31 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2500 Titik	2500 Titik			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	469 Titik	550 Titik	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	2250 Titik	2250 Titik	-	-	
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100 %	125,37 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60 Orang	60 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60 Orang	60 Orang	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	3 Dokumen	2 Dokumen	Awalnya direncanakan kegiatan penyusunan database asosiasi BUJK, kemudian setelah melakukan koordinasi awal, dimana data yang dibutuhkan dari BUJK mencakup hingga KBLLI, SBU/LSBU, hingga ketersediaan personel bersertifikat yang dimiliki, dinilai bahwa kebutuhan tersebut akan sulit didapatkan karena beberapa BUJK menganggapnya sebagai data yang sensitif.	Pemenuhan data Asosiasi BUJK dilakukan dengan bersurat saja, sebatas pada data-data yang sekiranya dapat dipenuhi saja.	
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	250 Badan Usaha	250 Badan Usaha			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	250 Orang	450 Orang	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100 %	100 %			
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1 Materi Teknis	1 Materi Teknis			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Kesulitan menentukan tema sosialisasi	Survey kebutuhan informasi penataan ruang yang dibutuhkan masyarakat	
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100000 m2	100000 m2			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Server Diskominfo untuk Sistem Informasi Penataan Ruang belum bisa diakses	koordinasi dengan Diskominfo	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	89 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi	6 Lokasi			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	Pelaksanaan kegiatan Februari - Desember 2024	Melakukan proses kegiatan sesuai dengan jadwal RUP	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas PUPR-PKP	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0 %	0,55 %			
				Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	294 Unit	294 Unit			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	288 Unit	288 Unit	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	0 %			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4 Unit	0 Unit	Belum ada SK Bencana	Koordinasi dengan BPBD	
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	73,61 %	93,25 %			
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha	6,55 %	18,04 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	80 %	54,49 %			
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	40 PSU	52 PSU			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	4 laporan	52 laporan	-	-	
5	Ketertiban, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Dasar Hukum : 1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, 3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	85.80 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 laporan	22 laporan			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 %	91.80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang	102 Orang	Ada 20 ASN yang pensiun dan mutasi	Menginventarisir kebutuhan gaji pada tahun berikutnya	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.20 %	88.20 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 paket	8 paket	Kebutuhan sudah tercukupi dengan 8 paket	menginventarisir kebutuhan untuk tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 paket	24 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	0 paket	Kegiatan jambore dan hut dialihkan ke jambore linmas yang sudah dianggarkan pada sub kegiatan yang lain	menunggu jadwal perencanaan jambore dan hut pada tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	4 paket	salah memasukkan target	membenarkan target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1066 Dokumen	1572 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	109 laporan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	112.89 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2400 Surat	3528 Surat			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	11 Bulan	Belum terbayarkannya tagihan pada bulan Desember	Segera membayar tagihan pada tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 laporan	16 laporan			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	69.15 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	43 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	13 Unit	Tidak dilaksanakan pengadaan lainnya karena nilai TKDN yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan	Akan melaksanakan pengadaan yang nilai TKDN memenuhi syarat sesuai ketentuan (PPKOM bersedia membuat justifikasi teknis apabila barang yang dibutuhkan harus impor)	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 Angka	81 Angka			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 paket	5 paket			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang	15 Orang	Sudah mengajukan pendaftaran namun tidak semuanya mendapatkan panggilan, mengingat kuota pendidikan dan pelatihan sesuai tuis terbatas	Akan mengajukan pendaftaran ketika ada pendidikan dan pelatihan sesuai tuis yang dibuka	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	94.97 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	45 Unit	jumlah kendaraan yang memasuki waktu pemeliharaan sejumlah 45 unit kendaraan	melakukan inventarisasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan pada tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	24 Unit			
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3 Angka	3 Angka			
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteritiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	114.58 %			
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteritiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	104 Kasus	100 Kasus	Penurunan terjadi karena tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) menjadi lebih baik	Menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keindahan tetap baik agar pengaduan masyarakat menurun	
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteritiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	1 Dokumen	1.33 Dokumen			
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	67.22 %			
				Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	15 perda/perwal	15 perda/perwal			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12 laporan	8 laporan	Target pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan sebanyak 5.082 data dalam 11 bulan, masih teralisasi 3.788 data	Akan dilakukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan pembinaan sesuai SOP	
				Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	12 laporan	12 laporan			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2 Angka	2 Angka			
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	48.21 %			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	1 Dokumen	0.83 Dokumen	Masih tersedia data Pemutakhiran Data dan Sarana Prasarana Anggota Satlinmas Sesuai Dengan Ketentuan	Akan dilaksanakan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan serta laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3100 Orang	416 Orang	Salah menentukan target	Target akan disesuaikan	
				PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	6 Unit	6 Unit			
				Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	19 Orang	19 Orang			
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	85 -	80.15 -			
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1930 Orang	2613 Orang	-	-	
			Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	85 -	80.15 -			
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	89.63 %			
				Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	700 Orang	869 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	850 Unit	850 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	59 -	50 -			
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250 Orang	223 Orang	Jumlah korban bencana hanya mencapai 223	Mengurangi target korban bencana	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100 %	100 %			
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	84.50 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	200 Orang	169 Orang	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik sebanyak 169	Mengurangi target korban bencana	
			Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	85 -	80.15 -			

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50 %	50 %			
				Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
			Mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat secara optimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang	229 Orang	Ada beberapa Jabatan yang kosong		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	105 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	60 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	66 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	97.78 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 paket	15 paket	Pengadaan accu tidak jadi dibeli dikarenakan accu yang lama masih bisa di pergunakan	akan dievaluasi kembali pembelian tersebut	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit	34 Unit	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	84.34 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	25 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20 Unit	15 Unit	Perbaikan mebel sesuai dengan kebutuhan	akan dilaksanakan appraisal terhadap aset	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120 Unit	99 Unit	Perbaikan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan kebutuhan	akan dilaksanakan appraisal terhadap aset	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	
7	Sosial	Dinas Sosial-P3AP2KB	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	65 Orang	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Orang	50 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82 Unit	82 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5 Unit	5 Unit	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 %	100 %			
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	452 Orang	452 Orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	202 Orang	202 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	83 lembaga	83 lembaga	-	-	
				Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 lembaga	17 lembaga			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.26 %	20.21 %			
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	14.26 %	20.21 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	942 Orang	942 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan sandang	400 Orang	66 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Orang	126 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	464 Orang	514 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang	52 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	28 Orang	64 Orang	*	*	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	40 Orang	81 Orang	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	30 Orang	-	-	
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	92.77 %			
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20 Orang	28 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	90 Orang	4 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15 Orang	3 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	5 Orang	0 Orang	-	-	
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	92.77 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	6400 Orang	6204 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	20 Orang	4 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	75.5 %	20.16 %			
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9505 KELUARGA	10555 KELUARGA	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7000 KELUARGA	18615 KELUARGA	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	10 Anak	10 Anak			
				Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	5 Orang	7 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	10 Orang	45 Orang	-	-	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	340 Orang	191 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	200 Orang	20 Orang	-	-	

No	Urusan pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	75 Orang	102 Orang	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50 Orang	50 Orang	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi	-	-	

LAMPIRAN 3.1.2.

**PELAKSANAAN URUSAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tenaga Kerja	Disnaker, PMPTSP	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 laporan	33 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	65 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	5 laporan	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.00 %	83.47 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.00 %	83.47 %			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211 Unit	211 Unit	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.00 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37 Unit	37 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327 Unit	327 Unit	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 -	84.09 -			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65 Orang	65 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.00 %	100.00 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	5 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 laporan	251 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24 laporan	24 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 laporan	2 laporan	-	-	
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan nilai penanaman modal	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1 %	3.56 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	683 Orang	739 Orang			
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	742 Orang	739 Orang	Peserta dari usulan Pokir tidak hadir pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan	Melakukan evaluasi dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya kepada lembaga pengusul musrenbang/pokir	
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	65 %	100 %			
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	40 lembaga	59 lembaga			
				Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	40 lembaga	40 lembaga	-	-	
			Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	77.00 %	77.02 %			
				Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	34 BKK	36 BKK			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	192 Orang	192 Orang	-	-	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.30 %	17.31 %			
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	70.00 %	84.62 %			
				Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Kasus	22 Kasus	Dari 26 kasus perselisihan hubungan industrial yang dimediasi dengan hasil Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 22 kasus dan 4 kasus diselesaikan dengan Anjuran	Melaksanakan pemantauan atas 22 PB dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 lembaga	1 lembaga	-	-	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, P3AP2KB	-	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	96.5 %	100 %			
				Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	85 OPD	80 OPD			
				Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	85 OPD	85 OPD	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 lembaga	25 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	225 Orang	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	10 %	100 %			
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang	34 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 OPD	5 OPD	-	-	
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 lembaga	2 lembaga			
				Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0.06 %	1 %			
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2802 Orang	2802 Orang			
				Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	58 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	58 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 layanan	2 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	10 laporan			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76 OB	76 OB			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	4 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Dokumen	36 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	121 laporan			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	13 Unit			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27 Unit	27 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit			
			Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0.099 -	0.123 -			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2 %	2 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 laporan	4 laporan			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1 Unit	1 Unit			
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	645870 Rupiah	715370 Rupiah			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 laporan	2 laporan			
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2 %	2 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	15 PSAT	9 PSAT			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen			
4	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kebijakan terkait Bidang Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 laporan	9 laporan			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	772 Orang	772 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 laporan	14 laporan			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dinas Lingkungan Hidup)	9 Dokumen	9 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1300 STEL	1300 STEL			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 ASN	5 ASN			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	277 Unit	277 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277 Unit	277 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	48 Unit	48 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.8 -	100 -			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 Dokumen	100 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan			
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	64.81 %	64.81 %			
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	35 TITIK	35 TITIK			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	1 laporan	1 laporan			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0.87 %	0.87 %			
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	95.3155146 Ha	95.3155146 Ha			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	141.34911461 Ha	141.34911461 Ha	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	141.34911461 Ha	141.34911461 Ha	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	141.34911461 Ha	141.34911461 Ha	-	-	
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	25 %	25 %			
				Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B	20 Kegiatan/Usaha	20 Kegiatan/Usaha			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	25 %	25 %			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67 Kegiatan/Usaha	67 Kegiatan/Usaha			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	115 Dokumen	58 Dokumen	Jumlah Realisasi sesuai dengan jumlah pengajuan pemohon yang didasarkan pada sistem OSS yang berlaku secara Nasional.	Menyesuaikan target dengan peraturan yang terbaru yaitu OSS yang bersifat pelayanan by sistem	
				Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69 laporan	72 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	47.50 %	60.45 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110 Sekolah	140 Sekolah			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	77 lembaga	77 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	90 %	90 %			
				Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	38 Dokumen	38 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	72 %	72 %			
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	180069 Ton/Tahun	180069 Ton/Tahun			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Pengelolaan Sampah dari Semesteran dijadikan dalam 1 Dokumen/Tahun	Akan dijadikan dalam 1 Dokumen/Tahun	
				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3 laporan	3 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	180069 Ton/Tahun	180069 Ton/Tahun	-	-	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	180069 Ton/Tahun	180069 Ton/Tahun	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	26500 Unit	26500 Unit	-	-	
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	33.33 %	33.33 %			
				Kegiatan Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	35 RW	35 RW			
				Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	54 Entitas	58 Entitas	-	-	
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah 2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan 3. Meningkatnya sistem layanan publik yang cepat, mudah dan terintegrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99 %	99.92 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	70 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	100 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 Unit	26 Unit	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Kendaraan	29 Kendaraan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	2 Gedung	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 -	99.20 -			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	93.24 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148 Orang	138 Orang	Ada beberapa karyawan yang purna tugas, mutasi dan ijin tidak mengikuti peningkatan kapasitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang	Mengoptimalkan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85 Paket	85 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 Paket	13 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	60 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	97 %	83.06 %			
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	960387 Dokumen	797699 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	12 laporan	-	-	
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94 %	106.09 %			
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	24566 Dokumen	26063 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2 layanan	2 layanan	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	96 %	84.18 %			
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	984.953 Dokumen	829094 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, P3AP2KB	-	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.7 %	1.79 %			
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	1 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	1 laporan	1 laporan	-	-	
				KegiatanPemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas	1 laporan	1 laporan			
				Sub KegiatanImplementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	1 laporan	1 laporan	-	-	
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	75.5 %	75.88 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Kali	5 Kali			
				Sub Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Kali	4 Kali			
				Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 lembaga	4 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 laporan	5 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	4 laporan	4 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	1 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	32 Orang	32 Orang			
				Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	114 Orang	114 Orang			
				Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	5 Organisasi	-	-	
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 laporan	4 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1202 Orang	1110 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 %	5 %			
				Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 lembaga	5 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	6 lembaga	5 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	92.75 %	93.33 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 laporan	2 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	30 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1950 Orang	1950 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 laporan	3 laporan	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8 lembaga	8 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi K)	5 lembaga	5 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 lembaga	5 lembaga	-	-	
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Meningkatkan Kuantitas, Kualitas, Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	85 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 %	85 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94 OB	94 OB	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	6 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	90 %			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66 Unit	66 Unit	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 Angka	83.55 Angka			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	220 Buah	220 Buah	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	6 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Dokumen	48 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	29 %	3 %			
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 -	1 -			
				Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 laporan	6 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	13 Paket	13 Paket	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	6 laporan	-	-	
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	63.00 %	33.61 %			
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.74 -	1 -			
				Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	912 Unit	912 Unit	-	-	
				Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	85.50 %	101.91 %			
				Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	37 %	36.23 %	-	-	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	3 Unit	3 Unit	-	-	
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	85.55 %	101.91 %	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8 Unit	8 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10000 Buku	10000 Buku	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8 SARANA	8 SARANA	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.05 %	1.05 %			
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3 Dokumen	1 Dokumen	Dari Target 3 (tiga) Dokumen yang meliputi 1) Feasibility Studi; 2) Appraisal dan 3) Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Fasilitas Parkir hanya tercapai Dokumen FS, mengingat Pengadaan Lahan Parkir bukan dilaksanakan pada tahun 2024, melainkan pada tahun 2025.	Merumuskan Penyusunan Dokumen pembangunan Fasilitas Parkir sesuai dengan tahapan pembangunan dan persayarakatan Perijinan	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan	3 laporan	-	-	
8	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	53 Orang	53 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 laporan	1 laporan	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90 %	90 %			
				Kegiatan Administrasi Umum	2 laporan	2 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum	4 Paket	4 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum	15 Unit	15 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum	80 %	80 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23 Unit	23 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum	90 %	90 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum	80 %	80 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 Unit	7 Unit	-	-	
			Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	72 %	70 %			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 layanan	2 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 layanan	2 layanan	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81 %	98 %	-	-	
				Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	62 %	60 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen			
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	86 %	98 %			
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	800 Unit	838 Unit	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90 Unit Kerja	90 Unit Kerja			
				Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Unit	4 Unit	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90 layanan	92 layanan			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	90 Unit Kerja	92 Unit Kerja	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 %	70 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskopindag		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3542 Orang	2604 Orang			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3542 Orang	2604 Orang	Ada beberapa ASN yang purna tugas, promosi dan mutasi pegawai.	Penyesuaian peta jabatan OPD Diskopindag	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96 Orang	96 Orang			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96 Orang	96 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Kali	105 Kali			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	105 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54 paket	60 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16 paket	16 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 Unit	20 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55 Unit	9 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55 Unit	55 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	7 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	57.97 %	85.71 %			
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	440 Unit	362 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Unit	75 Unit	Beberapa koperasi belum memahami kertas kerja pemeriksaan kelembagaan dan laporan keuangan koperasi	Mendatangi beberapa koperasi yang kesulitan mengisi kertas kerja dan atau membuat surat himbauan untuk aktif mendatangi kegiatan2 terkait bimtek dan klinik koperasi.	
				Sub Kegiatan Pengawasan kekuatan kesehatan	85 Unit	75 Unit	Beberapa koperasi belum memahami pengisian kertas kerja kelembagaan koperasi dan penyusunan laporan keuangan koperasi	Mendatangi beberapa koperasi yang kesulitan mengisi kertas kerja dan atau membuat surat himbauan untuk aktif mendatangi kegiatan2 terkait bimtek dan klinik koperasi.	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	68.51 %	41.35 %			
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	520 Orang	215 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	520 Orang	215 Orang	Pemilihan tema pelatihan kurang begitu diminati oleh pengurus Koperasi	Sebelum melaksanakan pelatihan perlu pemetaan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengurus koperasi	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	73.78 %	102.30 %			
				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	958 Orang	980 Orang			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	958 Orang	980 Orang			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.40 %	10.14 %			
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2048 Usaha mikro	2299 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	120 Unit	130 Unit			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	212 Usaha mikro	212 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1946 Unit	1957 Unit			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60 Orang	60 Orang			
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.60 %	3.54 %			
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	327 Usaha mikro	672 Usaha mikro			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	327 Usaha mikro	672 Usaha mikro			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Penanaman Modal	Disnaker, PMPTSP	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan nilai penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60.00 %	66.67 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6 Kali	6 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	90 %	87.76 %			
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6000 Ijin	23830 Ijin			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	23830 Pelaku Usaha	-	-	
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	90 %	76.21 %			
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	5000 Ijin	4897 Ijin			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	4897 Pelaku Usaha	Beberapa perizinan berusaha yang terkategori persyaratan dasar perizinan berusaha telah terintegrasi melalui OSS-RBA	Melaksanakan koordinasi kepada perangkat daerah teknis untuk percepatan proses layanan perizinan	
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	55 Orang	-	-	
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100 %	43.93 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	80.00 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Kegiatan/Usaha	452 Kegiatan/Usaha	Kewenangan Disnaker PMPTSP pada penagihan retribusi dan penerbitan PBG/IMB, sedangkan pemrosesan PBG/IMB dilaksanakan oleh perangkat daerah lain	Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk pemrosesan PBG sesuai ketentuan	
			Terwujudnya sistem pemerintah berbasis elektronik	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	80.00 %	83.33 %			
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23 Perusahaan	52 Perusahaan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan/Usaha	55 Kegiatan/Usaha	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	600 Pelaku Usaha	754 Pelaku Usaha	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	170 Kegiatan/Usaha	170 Kegiatan/Usaha	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100 %	55.34 %			
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
11	Kepemudaan dan Olah Raga	Disporapar	Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sertatata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	73.55 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	79.92 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	10 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	16 laporan			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	75 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	724 Orang	692 Orang	Terdapat pegawai yang purna tugas dan mutasi	Dilaksanakan perencanaan yang lebih tepat	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	99.88 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %	98.11 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 Unit	67 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185 Unit	185 Unit	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	95 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	95.78 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	68.65 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106 Unit	106 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 -	87 -			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71 Pegawai	71 Pegawai	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 %	98.96 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 paket	16 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22 paket	22 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2355 laporan	1665 laporan	Efisiensi kegiatan dan jumlah tamu yang berkunjung juga tidak sebanyak yang direncanakan	Dilaksanakan Perencanaan ditahun depan yang lebih tepat	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1 %	1.64 %			
				Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Wirusaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	8629 Orang	9104 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	165 Orang	113 Orang	Peserta tidak memenuhi syarat kualifikasi	Dilakukan seleksi yang lebih tepat	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	307 Orang	307 Orang			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda Advokasi Akses Pengembangan Diri Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan	3332 Orang	4585 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	4500 Orang	3849 Orang	Kesalahan dalam perhitungan	Dilaksanakan perhitungan yang lebih tepat	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	325 Orang	250 Orang	Peserta pikir dialihkan kegiatan minuman kekinian dengan jumlah peserta yang lebih sedikit	Dilakukan perencanaan yang lebih tepat diwaktu yang akan datang	
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.005 %	24.005 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0.16 %	0.24% %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	70 Orang	70 Orang	-	-	
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	11 paket	11 paket			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	11 Unit	11 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5 %	13.21 %			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	48 cabor	49 cabor			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	220 Orang	619 Orang	-	-	
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	70 -	1 -			
				Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 laporan	1 laporan			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	12.10 %	6.07 %			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	21180 Orang	24008 Orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	6 Organisasi	6 Organisasi	-	-	
12	Statistik	Diskominfo	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	70 %	110 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70 %	110 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	75 Orang	100 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	180 Orang	180 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	10 Unit	12 Unit	-	-	
13	Persandian	Diskominfo	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	29 %	417 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %	107 %			
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28 OPD	28 OPD	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kab/Kota	50 %	100 %			
				Sub KegiatanOperasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah Kab/Kota	28 OPD	28 OPD	-	-	
14	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tercapainya pengembangan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	59 %	50 %			
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 %	0 %			
				Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	150 Orang	150 Orang	kegiatan belum dianggarkan	diusulkan pada tahun anggaran selanjutnya	
				Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	50 Orang	48 Orang	Jumlah pelaku seni budaya yang masuk dalam kriteria Berprestasi dan Berkontribusi Luar biasa hanya 48 orang	Standart penentuan kriteria akan diturunkan	
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	14 Objek	13 Objek	Hanya terdapat 13 komunitas penghayat di Kota Malang	melakukan pendataan ulang terhadap komunitas penghayat kepercayaan	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100 %	132 %			
				Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 %	0 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100 Orang	132 Orang	banyaknya minat SDM kesenian yang mengikuti diklat SDM	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	0 %	0 %	anggaran digunakan untuk Pokir DPRD untuk 43 penerima	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola lembaga kesenian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya	
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	100 %	71 %			
				Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 %	0 %			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	7 Komunitas	5 Komunitas	Hanya terdapat 5 komunitas sejarah yang terdata di Kota Malang	melakukan pendataan ulang terhadap komunitas sejarah	
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100 %	135 %			
				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100 %	135 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	85 Objek	135 Objek	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2 Gedung	2 Gedung			
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	10000 Orang	11123 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	2 Gedung	2 Gedung	-	-	
				Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	200 Jenis	233 Jenis	ada penambahan koleksi museum pada tahun 2023 dari hibah dan eskavasi di masyarakat	-	
15	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah	Meningkatnya Layanan Budaya Baca	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	17 %	22 %			
				Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 %	40 %			
				Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	1000 Eksemplar	1345 Eksemplar	untuk pelaporan sub kegiatan pengembangan bahan pustaka terdiri dari data jumlah pembelian buku cetak 505 eksemplar dan buku elektronik 840 eksemplar sesuai dengan rincian penghitungan DPA, sedangkan target indikator dari sub kegiatan adalah 1000 eksemplar. Terjadi kurang sinkronnya penentuan antara target indikator dan rincian perhitungan sehingga terjadi perbedaan.	Akan lebih teliti dalam hal sinkronisasi untuk target indikator dan rincian perhitungan pada DPA agar terjadi jumlah yang sama.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	5000 Eksemplar	5001 Eksemplar	Untuk pelaporan sub kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka terdiri dari data jumlah pembelian buku cetak 505 eksemplar, buku elektronik 840 eksemplar dan penerimaan buku sumbangan masyarakat. Target indikator sub kegiatan sejumlah 5000 eksemplar sehingga terdapat kekurangan capaian target sebesar 49 eksemplar di mana kekurangan tersebut adalah bahan perpustakaan yang tidak layak saji dan tidak dapat dilayankan. Kekurangan tersebut terjadi di karenakan proses seleksi pengolahan bahan perpustakaan yang seiring proses pengolahan sehingga pada akhir kegiatan terjadi kekurangan target.	Akan di tentukan seleksi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengolahan bahan perpustakaan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlah koleksi yang layak saji.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 %	40 %			
				Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155 perpustakaan	155 perpustakaan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	196 perpustakaan	196 perpustakaan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Wilayah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	9 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 perpustakaan	1 perpustakaan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	10 perpustakaan	10 perpustakaan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	50 Orang	50 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	6 lokus	6 lokus	-	-	
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5 %	7 %			
				Kegiatan KEGIATAN PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 naskah	2 naskah			
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perwatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	2 Orang	-	-	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang	665 Orang	Ada 4 orang yang pensiun, 1 orang meninggal duniadan 2 orang PPPK yang sudah dianggarkan namun belum terisi	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48 Orang	49 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48 Orang	49 Orang	Ada tambahan Arsiparis yang mengikuti Diklat Kearsipan	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	9 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 laporan	47 laporan	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199 Unit	199 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198 Unit	198 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	15 Unit	Karena ada 1 unit kendaraan roda 2 yang sudah rusak sehingga tidak dilakukan pemeliharaan	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	23 Unit	23 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 Unit	75 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	
16	Kearsipan	Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	42 %	43.95 %			
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	41 OPD	42 OPD			
				Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	10 Berkas	9 Berkas	Hanya melakukan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis sebanyak 9 nomor berkas, ada 1 nomor berkas (kode klasifikasi) yang tidak pernah diciptakan yaitu nomor kode 200 (politik)	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis sesuai dengan kebutuhan dinas	
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	10 OPD	5 OPD			
				Sub Kegiatan Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	8000 Arsip	8208 Arsip	Realisasi Kegiatan tidak mencapai target disebabkan hanya 5 OPD yang menyerahkan arsip statis ke Dispusipda (LKD) karena OPD belum membuat daftar arsip yang akan diserahkan ke LKD	Melakukan monitoring dan pengawasan Kearsipan ke OPD	
				Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100 database	100 database			
				Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	760 Pengguna	761 Pengguna	-	-	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	13 %	10.7 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1 OPD	1 OPD			
				Sub Kegiatan Pendataan Penusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 daftar arsip	1 daftar arsip	-	-	

LAMPIRAN 3.1.3.

**PELAKSANAAN URUSAN
PILIHAN**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perikanan dan Kelautan	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.5 %	2.5 %			
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	143.44 Ton	158.60 Ton			
				Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	637 Peserta	752 Peserta			
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan	246,67 -	300 -			
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	13 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha			
				Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60 Orang	60 Orang			
				Sub Kegiatan pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	70 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha			
2	Pariwisata	Disporapar	Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sertatata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	65 %	121.79% %			
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Jenis	34 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	19 Lokasi	19 Lokasi	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	5 Lokasi	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	60 %	166 %			
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	2120 Pelaku Usaha	2020 Pelaku Usaha			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 laporan	1 laporan	-	-	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	60 %	54.51 %			
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	550 Pelaku Industri	1064 Pelaku Industri			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	15 laporan	15 laporan	-	-	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	50 %	51.41 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	784 Pelaku Usaha	962 Pelaku Usaha			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 Orang	100 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1134 Orang	2203 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	60 Orang	-	-	
3	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22000 Ton	25147 Ton			
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Penerapan Teknologi	1 Penerapan Teknologi			
				Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.88 Ton	9.67 Ton			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	64611.19 Ton	60158.87 Ton			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4 Jenis	6 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 laporan	2 laporan			
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan	2 laporan			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	83 %	83 %			
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1 -	1 -			
				Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7 Unit	7 Unit			
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2 %	143 %			
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 %	0 %			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1820 Kali	1820 Kali			
				Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	8 laporan	8 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	8 laporan	8 laporan			
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1000 Angka	1042 Angka			
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	30 Orang	27 Orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 Unit	1 Unit			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1 Unit	1 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Perdagangan	Diskopindag		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	66 Gudang	60 Gudang			
				Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	11 Dokumen			
				Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	5 Dokumen	0 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	5 Dokumen	0 Dokumen	1. Animo atau antusias dari pelaku usaha untuk mengurus ijin waralaba masih kurang 2. Terkendala didalam persyaratan yang masih terdapat kekurangan terutama dipersyaratan dasar tentang penyesuaian tata ruang	1. Sosialisasi terkait waralaba 2. Pengajuan melalui media sosial (instagram) agar pelaku usaha mengetahui prosedurnya	
				Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	5 Dokumen	14 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	5 Dokumen	14 Dokumen			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.69 %	7.69 %			
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 Pasar	22 Pasar			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	22 Unit			
				Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.75 %	1 %			
				Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	365 hari	366 hari			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan			
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0.70 %	0.70 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	45 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha			
5	Perindustrian	Diskopindag		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5 %	33.65 %			
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3759 IKM	2026 IKM			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2000 IKM	2026 IKM	1	1	
				Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	100 %	80 %			
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 IKM	1 IKM			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen			

LAMPIRAN

**PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
LAINNYA**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengawasan	Inspektorat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	47 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90 %	90 %			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	14 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	14 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	50 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung ktr dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85 Angka	86.89 Angka			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35 Orang	35 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	6 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 paket	10 paket	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	5 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 Dokumen	100 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	52 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	103 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 layanan	3 layanan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36 laporan	36 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.5 Angka	16.92 Angka			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	27 OPD	27 OPD	-	-	
				Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 laporan	11 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	28 laporan	28 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	15 laporan	15 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 laporan	20 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	10 laporan	-	-	
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100 %	100 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10 Kegiatan	10 Kegiatan			
				Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	-	-	
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100 %	100 %			
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	27 OPD	27 OPD			
				Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	28 OPD	28 OPD	-	-	
				Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 OPD	4 OPD	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	28 OPD	29 OPD	-	-	
2	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	155.78 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	82.14 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Pegawai	22 Pegawai	Sesuai dengan kondisi riil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terisi 22 jabatan	Akan menata ulang penyesuaian kebutuhan pegawai	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	100 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13 Unit	13 Unit			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	18 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 Angka	80.40 Angka			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	0 Orang	Ada pergeseran kegiatan	Mematangkan perencanaan untuk tahun berikutnya	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	150 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104 Dokumen	113 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 laporan	283 laporan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	328.92 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1050 laporan	3319 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1050 laporan	3319 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan			
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	13 %	13.10 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	13 %	13.10 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10000 Orang	10078 Orang			
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	60 %	122.90 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	60 %	122.90 %			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Poli	10 Orang	10 Orang			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Poi	300 Orang	625 Orang			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	35 %	35 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	35 %	35 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	120 Orang			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	75 %	79.73 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	75 %	79.73 %			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	2126 Orang			
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	75 %	74.11 %			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	75 %	74.11 %			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik	2272 Orang	2245 Orang	Sesuai dengan kondisi riil, bahwa yang menghadiri 2245 orang	Melakukan pendataan peserta	
3	Pendukung DPRD	Sekretariat DPRD	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 %	90,85 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang	420 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	540 Orang	540 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4 paket	4 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	-	-	
				Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	22 paket	22 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	22 paket	22 paket	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 %	70 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 %	6 %	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28 Unit	28 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 paket	5 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	400 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 laporan	15 laporan	-	-	
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	100 %			
				Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	26 Dokumen	26 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	dokumen promperda ditargetkan 2 dokumen jika dikhawatirkan terjadi perubahan dokumen promperda yang telah disepakati, namun tahun 2023 dokumen yang telah disepakati tidak mengalami perubahan	di tahun 2024 ditargetkan 1 dokumen, jika terjadi perubahan maka akan dilakukan perubahan target saat perubahan renja	
				Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 Dokumen	2 Dokumen	belum maksimalnya bahasan naskah akademik dprd	akan dimaksimalkan di tahun berikutnya	
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	10 laporan	10 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 laporan	10 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 laporan	10 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 laporan	10 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	100 %			
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	95 %	84,80 %			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	213 Dokumen	213 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	31 Dokumen	31 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	9 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	136 Dokumen	136 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	135 Dokumen	135 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	0 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	belum melaksanakan agenda penyusunan	dilaksanakan di pelantikan anggota DPRD yang akan datang tahun 2024	
				Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	576 Dokumen	576 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	384 Dokumen	384 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	192 Dokumen	192 Dokumen	-	-	
4.1	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Kedungkandang	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34 %	100 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	34 %	100 %			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjowinangun	20 Unit	20 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumiayu	30 Unit	30 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buring	10 Unit	10 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cemorokandang	17 Unit	17 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungkandang	26 Unit	26 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotalama	34 Unit	34 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lesanpuro	14 Unit	14 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madyopuro	15 Unit	15 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mergosono	6 Unit	6 Unit	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawojajar	40 Unit	40 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogowaru	19 Unit	19 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokoyo	13 Unit	13 Unit	-	-	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43 %	53.76 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mergosono	18 lembaga	18 lembaga	-	-	
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	10 lembaga	10 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	19 lembaga	19 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bumiayu	22 lembaga	22 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Buring	15 lembaga	15 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cemorokandang	15 lembaga	15 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungkandang	18 lembaga	18 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kotalama	18 lembaga	18 lembaga	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Lesanpuro	16 lembaga	16 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Madyopuro	18 lembaga	18 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mergosono	17 lembaga	17 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sawojajar	18 lembaga	18 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tlogowaru	18 lembaga	18 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Wonokoyo	27 lembaga	27 lembaga	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96 %	100 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 kelompok	8 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun	3 kelompok	3 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumiayu	12 kelompok	12 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring	4 kelompok	4 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cemorokandang	7 kelompok	7 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang	3 kelompok	3 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama	4 kelompok	4 kelompok	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro	7 kelompok	7 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono	9 kelompok	9 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawojajar	7 kelompok	7 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogowaru	9 kelompok	9 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo	3 kelompok	3 kelompok	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8 lembaga	8 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Arjowinangun	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bumiayu	4 lembaga	4 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan buring	4 lembaga	4 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Cemorokandang	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Kedungkandang	10 lembaga	10 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Kotalama	2 lembaga	2 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Lesanpuro	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Madyopuro	4 lembaga	4 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Mergosono	8 lembaga	8 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Sawojajar	9 lembaga	9 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Tlogowaru	8 lembaga	8 lembaga	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Wonokoyo	8 lembaga	8 lembaga	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	930 -	919 -			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan bumiayu	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan buring	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kotalama	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kotalama	12 laporan	12 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Madyopuro	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mergosono	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mergosono	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sawojajar	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	12 laporan	12 laporan	-	-	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	Tidak ada perubahan SOP Kecamatan	Merencanakan kegiatan Penyusunan SOP Kecamatan	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang	123 Orang	Banyaknya PNS yang Pensiun dan belum mendapatkan pengganti	Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memenuhi kekurangan PNS yang pensiun	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.00 %	100 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	15 Unit	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Angka	85 Angka			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85 Angka	91.24 Angka			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 Angka	85 Angka			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145 Orang	123 Orang	Banyaknya PNS yang Pensiun	Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memenuhi PNS yang pensiun	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 Angka	85 Angka			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Angka	85 Angka	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Angka	85 Angka	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80.04 Angka	85 Angka			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Arjowinangun	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Bumiayu	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Buring	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Cemorokandang	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kedungkandang	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kotalama	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Lesanpuro	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Madyopuro	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Mergosono	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Sawojajar	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Tlogowaru	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Wonokoyo	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	0 Dokumen	Belum ada perubahan data profil dan monografi Kelurahan	melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan data monografi dan profil kelurahan	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Arjowinangun	3 Dokumen	0 Dokumen	Belum ada perubahan data profil dan monografi Kelurahan	Meng up date atau memperbaharui data profil dan monografi	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Bumiayu	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Cemorokandang	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kedungkandang	3 Dokumen	0 Dokumen	Belum ada perubahan data profil dan monografi Kelurahan	Meng up date atau memperbaharui data profil dan monografi	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kotalama	3 Dokumen	0 Dokumen	Belum ada perubahan data profil dan monografi Kelurahan	Meng up date atau memperbaharui data profil dan monografi	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Lesanpuro	3 Dokumen	0 Dokumen	Belum ada perubahan data profil dan monografi Kelurahan	mengupdate atau memperbaharui data profil dan monografi	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Madyopuro	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Mergosono	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Sawojajar	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Tlogowaru	3 Dokumen	0 Dokumen	Belum ada perubahan data profil dan monografi Kelurahan	Mengupdate atau memperbaharui data profil dan monografi	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Wonokoyo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Kali	5 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
4.2	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Klojen	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang	128 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Orang	4 Orang	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	100 %			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	2 Jenis	2 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	17 Jenis	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	11 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.6 %	88.42 %			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	39 Orang	ASN yang memiliki level kepemimpinan tertinggi di tingkat kecamatan dan kelurahan; dengan tidak mengorbankan pelayanan kepada masyarakat	Akan lebih diperhatikan keperluan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan ASN	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46 Jenis	46 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Jenis	6 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	6 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	475 Kotak	2075 Kotak	Seringnya rapat yang bersifat insidentil; sehingga untuk pengadaan mamin menjadi bertambah	lebih memperhitungkan kembali kebutuhan kemungkinan rapat insidentil	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kali	13 Kali	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1100 Surat	2513 Surat	banyaknya surat yang tak terduga datang melalui suradi	menganalisa kembali kemungkinan berapa surat yang datang; dan selanjutnya target diubah pada saat Aplikasi Anggaran dibuka	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2000 m2	2000 m2	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.4 -	88.42 -			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 -	14 -	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Klojen	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Rampal Celaket	12 laporan	12 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Samaan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kidul Dalem	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sukoharjo	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kasin	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kauman	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Oro oro dowo	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bareng	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gading Kasri	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Penanggungan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di kelurahan Klojen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan rampal celaket	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Samaan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan kidul dalam	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan sukoharjo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan kasin	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Kauman	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan oro oro dowo	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Bareng	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan gading kasri	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kelurahan Penanggungan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 -	5 -			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 unsur	3 unsur	-	-	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43 %	37.42 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 unsur	6 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 unsur	6 unsur	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan rampalcelaket	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Samaan	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kiduldalem	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukoharjo	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kasin	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kauman	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan oro dowo	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bareng	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gading Kasri	6 unsur	6 unsur	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Penanggungan	6 unsur	6 unsur	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	65 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klojen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klojen	7 kelompok	7 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rampil Celaket	13 kelompok	13 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samaan	9 kelompok	9 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kidul Dalam	10 kelompok	10 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukoharjo	8 kelompok	8 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasin	13 kelompok	13 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan oro oro dowo	36 kelompok	36 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bareng	13 kelompok	13 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gadingkasri	17 kelompok	17 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penanggungan	3 kelompok	3 kelompok	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Klojen	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rampil celaket	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Samaan	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kidul Dalam	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sukoharjo	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kasin	6 lembaga	6 lembaga	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kauman	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Oro oro Dowo	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bareng	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gading Kasri	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Penanggungan	6 lembaga	6 lembaga	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Klojen	5 kelompok	5 kelompok	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	678 -	678 -			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48 Patroli	48 Patroli	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Klojen	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Rampal Celaket	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Samaan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kidul Dalam	12 laporan	12 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sukoharjo	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kasin	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Kauman	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan oro oro dowo	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bareng	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gading Kasri	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Penanggungan	12 laporan	12 laporan	-	-	
			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34 %	100 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	34 %	100 %			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klojen	12 Unit	12 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rampal celaket	51 Unit	51 Unit	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Samaan	37 Unit	37 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	19 Unit	19 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukoharjo	9 Unit	9 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasin	13 Unit	13 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	11 Unit	11 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro oro dowo	9 Unit	9 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bareng	18 Unit	18 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gading Kasri	25 Unit	25 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penanggungan	13 Unit	13 Unit	-	-	
4.3	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Sukun	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang	133 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 laporan	13 laporan			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82 Angka	81.5 Angka			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Orang	50 Orang			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Tagihan	12 Tagihan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82 Angka	81.5 Angka			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82 Angka	81.5 Angka			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	6 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	5 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Jenis	4 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis	3 Jenis			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.3 Angka	83.03 Angka			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.3 Angka	83.03 Angka			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sukun	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bandulan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Karangbesuki	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pisangcandi	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mulyorejo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tanjungrejo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bakalankrajan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bandungrejosari	12 laporan	12 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Ciptomulyo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gadang	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kebonsari	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80.3 Angka	83.03 Angka			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Sukun	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bandulan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Karangbesuki	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Pisangcandi	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Mulyorejo	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tanjungrejo	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bandungrijosari	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Ciptomulyo	3 Dokumen	3 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Gadang	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kebonsari	3 Dokumen	3 Dokumen			
			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96 %	70 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	96 %	70 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tingkat Kecamatan	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tanjungrejo	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukun	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pisangcandi	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mulyorejo	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kebonsari	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Karangbesuki	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gadang	12 unsur	12 unsur			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ciptomulyo	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bandungrejosari	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bandulan	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bakalan Krajan	12 unsur	12 unsur			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalan Krajan	12 Titik	12 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandulan	21 Titik	21 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandungrejosari	24 Titik	24 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciptomulyo	29 Titik	29 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gadang	35 Titik	35 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangbesuki	10 Titik	10 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonsari	10 Titik	10 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyorejo	30 Titik	30 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pisangcandi	11 Titik	11 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukun	30 Titik	30 Titik			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungrejo	13 Titik	13 Titik			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	3 Organisasi	3 Organisasi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalan Krajan	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandulan	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandungrejosari	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciptomulyo	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gadang	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangbesuki	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyorejo	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pisangcandi	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukun	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo	3 Organisasi	3 Organisasi			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	96 %	70 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bandulan	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Karangbesuki	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pisangcandi	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mulyorejo	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sukun	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tanjungrejo	9 lembaga	9 lembaga			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Bakalankrajan	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Bandungrejosari	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Ciptomulyo	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Gadang	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Kebonsari	9 lembaga	9 lembaga			
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94 %	93 %			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	920 Lokasi	920 Lokasi			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bakalankrajan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bandulan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bandungrejosari	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ciptomulyo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gadang	12 laporan	12 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangbesuki	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mulyorejo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pisangaandi	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sukun	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tanjungrejo	12 laporan	12 laporan			
4.4	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Blimbing	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang	134 Orang			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.58 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	134 Orang	107 Orang	karena ada yang mutasi dan memasuki masa pensiun dan belum ada penambahan ASN	Mengoptimalkan ASN yang ada	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.58 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	4 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 paket	7 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 paket	3 paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 paket	2 paket			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 paket	12 paket			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 laporan	13 laporan			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit	9 Unit			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.58 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit	34 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.58 %	83 %			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.58 %	100 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Balarjosari	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Arjosari	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Polowijen	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan purwodadi	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Blimbing	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Pandanwangi	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Purwantoro	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Bunulrejo	7 Dokumen	7 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Kesatrian	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Polehan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan Jodipan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	80.58 Angka	80.58 Angka			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Balearjosari	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Arjosari	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Polowijen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Purwodadi	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Blimbing	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Pandanwangi	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Purwantoro	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Bunulrejo	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Kesatrian	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Polehan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan kelurahan Jodipan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96 %	99 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12 lembaga	12 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Balearjosari	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Arjosari	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Polowijen	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Purwodadi	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Blimbing	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pandanwangi	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Purwantoro	9 lembaga	9 lembaga			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bunulrejo	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kesatrian	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Polehan	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jodipan	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balearjosari	5 ormas	5 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjosari	1 ormas	1 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen	4 ormas	4 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi	1 ormas	1 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blimbing	1 ormas	1 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandanwangi	1 ormas	1 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwantoro	1 ormas	1 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bunulrejo	6 ormas	6 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian	1 ormas	1 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polehan	2 ormas	2 ormas			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jodipan	1 ormas	1 ormas			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	132 Dokumen	132 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balearjosari	15 paket	15 paket			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjosari	56 paket	56 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polowijen	48 paket	48 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodadi	15 paket	15 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blimbing	16 paket	16 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandanwangi	78 paket	78 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwanto	663 paket	663 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bunulrejo	40 paket	40 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesatrian	280 paket	280 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polehan	65 paket	65 paket			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jodipan	8 paket	8 paket			
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12 lembaga	12 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Balearjosari	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Arjosari	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polowijen	10 lembaga	10 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwodadi	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Blimbing	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandanwangi	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwanto	9 lembaga	9 lembaga			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bunulrejo	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kesatrian	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polehan	9 lembaga	9 lembaga			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jodipan	9 lembaga	9 lembaga			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94 %	100 %			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Balearjosari	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arjosari	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Polowijen	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwodadi	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blimbing	12 laporan	12 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandanwangi	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwantoro	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bunulrejo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kesatrian	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Polehan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jodipan	12 laporan	12 laporan			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	95.87 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	95.87 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen			
4.5	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Lowokwaru	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126 OB	126 OB			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	126 Orang	126 Orang			
				Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	126 Orang	126 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	4 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Paket	8 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	4 laporan			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	50 Unit	50 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	9 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Lowok waru	12 laporan	12 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Dinoyo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tunggul Wulung	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Merjosari	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sumbersari	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Mojolangu	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tunjung Sekar	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tasikmadu	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Ketawang Gede	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Jatimulyo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tlogomas	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Tulus Rejo	12 laporan	12 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Lowokwaru	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Dinoyo	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Sumbersari	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Ketawanggede	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Jatimulyo	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tunjungsekar	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Mojolangu	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tulusrejo	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tasikmadu	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tunggulwulung	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tlogomas	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Merjosari	3 Dokumen	3 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Kali	12 Kali			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80 %	80 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9 unsur	9 unsur			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Lowok waru	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di kelurahan Dinoyo	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tunggul wulung	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Merjosari	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumber Sari	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mojolangu	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tunjung sekar	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tasikmadu	6 lembaga	6 lembaga			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ketawanggede	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatimulyo	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tulusrejo	6 lembaga	6 lembaga			
				Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tlogomas	6 lembaga	6 lembaga			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96 %	96 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90 %	90 %			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lowokwaru	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunggul Wulung	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Merjosari	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Sari	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojolangu	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tasikmadu	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ketawanggede	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimulyo	6 kelompok	6 kelompok	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tulusrejo	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomas	6 kelompok	6 kelompok	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94 %	94 %			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lowokwaru	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Dinoyo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Merjosari	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tunggulwulung	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sumbersari	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mojolangu	12 laporan	12 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tunjungsekar	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tasikmadu	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Ketawanggede	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Jatimulyo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tulusrejo	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Tlogomas	12 laporan	12 laporan			
			Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	356 Unit	356 Unit			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lowokwaru	20 Unit	20 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dinoyo	20 Unit	20 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan jatimulyo	12 Unit	12 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketawanggede	12 Unit	12 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Merjosari	20 Unit	20 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojolangu	20 Unit	20 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Sari	32 Unit	32 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tasikmadu	12 Unit	12 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogomas	42 Unit	42 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tulusrejo	12 Unit	12 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggulwulung	12 Unit	12 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunjungsekar	12 Unit	12 Unit			
				Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lowokwaru	20 Unit	20 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dinoyo	20 Unit	20 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggulwulung	12 Unit	12 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Merjosari	20 Unit	20 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Sari	32 Unit	32 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojolangu	20 Unit	20 Unit			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunjungsekar	12 Unit	12 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tasikmadu	12 Unit	12 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketawanggede	12 Unit	12 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan jatimulyo	12 Unit	12 Unit	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tulusrejo	12 Unit	12 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogomas	42 Unit	42 Unit	-	-	
5.1	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15 Dokumen	15 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	15 Dokumen	15 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	
5.2	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 %	100 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	16 Dokumen	16 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
5.3	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 %	83.71 %			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	16 Dokumen	23 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	124 Peserta	179 Peserta	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	0 Produk Hukum	0 Produk Hukum			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	0 Produk Hukum	0 Produk Hukum			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	644 Dokumen	768 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	31 Kasus	0 Kasus	Bantuan hukum masyarakat miskin tahun 2023 baru efektif setelah Peraturan Walikota di sahkan akhir bulan September dan peran LBH kurang maksimal	Pendekatan pada LBH untuk memaksimalkan pengajuan pada kegiatan ini agar tahun depan bisa lebih maksimal	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	100 Orang	79 Orang	Kondisi riil di peserta yang hadir sebanyak 79 orang dikarenakan berhalangan hadir dan tidak bisa menintervensi peserta dari OPD untuk hadir	diupayakan pendekatan kepada kepala OPD agar tahun depan bisa hadir dan maksimal	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	11 sidang	11 sidang			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	150 sidang	460 sidang			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	0 Buku	0 Buku			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	270 Orang	256 Orang	Kondisi riil di lapangan peserta hadir 256 di karenakan berhalangan hadir	diupayakan pendekatan peserta melalui kelurahan terkait agar kegiatan berjalan lebih maksimal di tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 Orang	107 Orang			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	500 Orang	234 Orang	Kegiatan yang semula dilaksanakan untuk 10 kelurahan hanya dapat dilaksanakan untuk 5 kelurahan, tidak dapat terlaksana karena perubahan kebijakan terkait kegiatan yang menghadirkan masyarakat	diupayakan kegiatan akan berjalan lebih maksimal di tahun berikutnya	
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	16 Dokumen	16 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4 Dokumen	4 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	5 Produk Hukum	5 Produk Hukum			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100 %	100 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	3 laporan	3 laporan			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	0 Dokumen	0 Dokumen	tidak mempunyai sda perikanan dan kelautan	membuat rekomendasi perubahan nomenklatur tupoksi	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
5.5	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya layanan PBJ Kota Malang	Program Perekonomian dan Pembangunan	200 Dokumen	145 Dokumen			
				Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	200 Dokumen	145 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200 Dokumen	145 Dokumen	meningkatkan pelaksanaan PBJ dengan metode e-purchasing pada katalog elektronik sehingga tidak memerlukan proses tender dan juga adanya proses konsolidasi PBJ yaitu strategi menggabungkan beberapa paket sejenis	memberikan sosialisasi terhadap pelaku pengadaan untuk menetapkan dokumen persiapan yaitu RUP	
				Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	7 Dokumen	7 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	900 Orang	1582 Orang			
5.6	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Umum	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23530 Meter	23530 Meter	-	-	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150 Orang	150 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35 Jenis	70 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 Jenis	70 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35 Jenis	36 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Jenis	15 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35 Jenis	35 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	28 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	700 Kegiatan	1368 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kali	811 Kali	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	7 Unit	sudah sesuai jumlah kebutuhan	menghitung ulang jumlah kebutuhan pada awal perencanaan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	30 Jenis	30 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 Jenis	70 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Jenis	33 Jenis	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14500 Surat	14500 Surat	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250 Kegiatan	189 Kegiatan	Jumlah Riil Kegiatan pada Tahun 2023	hitung ulang jumlah kegiatan pada setiap tahun	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Jenis	20 Jenis	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	50 Jenis Layanan	50 Jenis Layanan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	20 Jenis	20 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	20 Jenis	20 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	-	-	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	54 Unit	54 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Jenis	100 Jenis			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Unit	104 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	10 Jenis	10 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Gedung	10 Gedung	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Jenis	14 Jenis	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Jenis	14 Jenis	-	-	
5.7	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.3 Nilai	3.12 Nilai			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44 Nilai	39.54 Nilai			
				Kegiatan Penataan Organisasi	15 Dokumen	18 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	6 Dokumen	Realisasi kegiatan melebihi target sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah Kota Malang	-	
				Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
5.8	Fungsi Sekretariat Daerah	Bagian Prokopim	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	27 laporan	27 laporan			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	11 laporan	11 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 laporan	4 laporan	-	-	

LAMPIRAN

**PELAKSANAAN URUSAN
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	RENSTRA dan RENJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 SPM	611 SPM	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	26 Kendaraan	26 Kendaraan	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 -	80 -			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43 Orang	43 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58 Jenis ATK	58 Jenis ATK	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	12 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12000 Kotak	11856 Kotak	Terdapat penyelenggaraan rapat yang sedianya dilakukan secara offline dilakukan secara daring	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kali	247 Kali	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29 Unit	29 Unit	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Kendaraan	26 Kendaraan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8000 Liter	8000 Liter	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	33 Unit	-	-	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13 Unit	13 Unit	-	-	
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 laporan	3 laporan			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 laporan	3 laporan	-	-	
				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	105.39 %			
				Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80 %	100 %			
				Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	32 laporan	32 laporan	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	16 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	99.92 %			
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	99 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPd)	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPd)	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	-	
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	1 Rakortek	1 Rakortek	-	-	
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	80 %	62.18 %			
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80 %	62.12 %			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	
2.1	Keuangan	BKAD	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang	52 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	120 laporan	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	-	-	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Paket	14 Paket	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	3 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38 Unit	38 Unit	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	4 Dokumen	1 (satu) kajian/studi tentang tukar guling dan 1 jasa konsultansi penyusunan SHS tidak dapat dilakukan.Khusus untuk SHS pada tahun 2023 hanya menyusun draf penyempurnaan atas Perwal No.38 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan	Telah dilakukan evaluasi internal berjenjang pada Sekretariat dan Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	516 Dokumen	516 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	190 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinikronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7 laporan	7 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	Karena pelimpahan kasus Tuntutan Ganti Kerugian di Tingkat Sidang Majelis hanya 1 (satu) kasus dari 4 (empat) kasus yang dianggarkan	Telah dilakukan evaluasi internal berjenjang pada Sekretariat dan Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 laporan	5 laporan	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang	-	-	
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.02 %	2.06 %			
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	60.12 %	60.12 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	3 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	10 laporan	10 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen	210 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 laporan	132 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang	-	-	
2.2	Keuangan	Bapenda	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	161 Dokumen	175 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87 Pegawai	85 Pegawai	Terdapat ASN yang pensiun serta mutasi		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	161 Dokumen	175 Dokumen			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	125 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16 Unit	16 Unit			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16 Unit	16 Unit			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Jenis	12 Jenis			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Jenis	12 Jenis			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96 Unit	84 Unit			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80 Unit	73 Unit	7 kendaraan belum memasuki masa pemeliharaan	akan dilakukan pemeliharaan pada tahun 2024	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	10 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	3 Unit	3 Gedung yang terpelihara meliputi : Gedung B, Gedung Arsip, Gedung Control Room	lebih memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan di tahun 2024	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	81 %			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86 Orang	59 Orang			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87 Orang	59 Orang	jumlah pegawai yang mengikuti diklat menyesuaikan jumlah kebutuhan personil yang diajukan oleh BKPSDM	Pegawai yang belum mengikuti diklat akan diusulkan untuk mengikuti diklat di tahun berikutnya	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	141 Dokumen	224 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	3 paket			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	8 paket	Realisasi Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor menyesuaikan dengan kebutuhan	menghitung ulang rencana kebutuhan 2024	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 paket	2 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 paket	3 paket	-	-	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11 Jenis	11 Jenis	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	-	-	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	185 laporan	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5000 Surat	7511 Surat			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 Surat	7511 Surat			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850 Meter	850 Meter			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	83.4 %	79 %			
				Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	9 Jenis	9 Jenis			
				Sub KegiatanPendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1200 Wajib Pajak	1200 Wajib Pajak			
				Sub Kegiatan Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	321508 Berkas	321508 Berkas			
				Sub KegiatanPenetapan Wajib Pajak Daerah	60000 Wajib Pajak	60000 Wajib Pajak			
				Sub KegiatanPenelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40000 Wajib Pajak	40000 Wajib Pajak			
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	80000 Wajib Pajak	103963 Wajib Pajak			
				Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	59997860546.98 Rupiah	41264556586.80 Rupiah	- Banyak wajib pajak (PDL) yang tutup tetapi tidak melakukan pelaporan penutupan sehingga menambah piutang - Untuk Wajib Pajak PBB banyak objek yang masih berupa tanah kosong dan bangunan tak berpenghuni sehingga sulit untuk melakukan penagihan	- Melakukan verlap internal dengan mendatangi langsung lokasi yang tutup dan melaporkan pada bidang penetapan - Melakukan verlap agar mengetahui nama pemilik dan bisa melakukan penagihan tunggakan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	900 Wajib Pajak	792 Wajib Pajak	Banyaknya wajib pajak yang ditetapkan secara jabatan, tetapi keberatan untuk melakukan pembayaran	Melakukan pendekatan secara persuasif kepada WP agar membayarkan tunggakan dan memberikan sosialisasi tentang pembayaran pajak daerah	
				Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1300 Wajib Pajak	1987 Wajib Pajak			
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Aplikasi	8 Aplikasi			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	2 laporan			
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM	Meningkatnya Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	87.13 %	77.22 %			
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	35 %	20 %			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	4 Orang	2 Orang	belum ada pelaksanaan uji kompetensi dari instansi pembina	terus berkoordinasi dengan instansi pembina tentang pentingnya uji kompetensi bagi pejabat fungsional	
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	15 %	12.35 %			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	200 Orang	200 Orang			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	63 %	51.93 %			
				Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	974 Orang	974 Orang			
				Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 laporan	1 laporan			
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	454 Dokumen	489 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	42 lembaga	42 lembaga			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	2000 Orang	2039 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	1019 Dokumen			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	1000 Dokumen	1020 Dokumen			
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1898 Orang	2964 Orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	176 Orang	176 Orang			
				Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 laporan	1 laporan			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0 %	0.11 %			
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6600 ASN	6963 ASN			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	1 laporan			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18 Kasus	7 Kasus			
				Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	200 Orang	213 Orang			
			Meningkatnya Kinerja ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	83.35 %	99.21 %			
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	76 %	99 %			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	85 Orang	85 Orang			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100 %	95 %			
				Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	179 Orang	179 Orang			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	3 laporan	3 laporan			
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %			
				Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	13 laporan	0	0	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	552 Orang	552 Orang	-	-	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	438 Dokumen			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	80 %			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	85 %			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	16 Unit			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23 Unit	23 Unit			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 Unit	67 Unit			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 -	81.11 -			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	3 Paket			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1800 Dokumen	1800 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	200 laporan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 laporan	8006 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
4	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda	Renstra Renja	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	80 %	100 %			
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	60 %	71.42 %			
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Sub Kegiatan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Jurnal Penelitian	2 Jurnal Penelitian	-	-	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100 %	100 %			
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	